

**PEMAHAMAN PRAKTISI BMT DI YOGYAKARTA
TERHADAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK NO. 59) AKUNTANSI PERBANKAN SYARI'AH
PRODUK *FUNDING***



Oleh:
Enny Iroh Hayati
NIM : 04913009

TESIS

Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2007**

**PEMAHAMAN PRAKTISI BMT DI YOGYAKARTA
TERHADAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK NO. 59) AKUNTANSI PERBANKAN SYARI'AH
PRODUK *FUNDING***



Oleh:
Enny Iroh Hayati
NIM : 04913009

Pembimbing:
Dr. Muhammad, M.Ag.

TESIS

Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2007**



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lt. II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 121/PS-MSI/Peng./II/2007

TESIS berjudul : PEMAHAMAN PRAKTISI BMT DI YOGYAKARTA
TERHADAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) NO. 59 AKUNTANSI PERBANKAN
SYARI'AH PRODUK FUNDING

Ditulis oleh : Enny Iroh Hayati

NIM : 04913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 17 Pebruari 2007
Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Enny Iroh Hayati
Tempat/tgl.lahir : Magelang, 21 September 1975
N. I. M. : 04913009
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PEMAHAMAN PRAKTISI BMT DI YOGYAKARTA
TERHADAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) NO.59 AKUNTANSI PERBANKAN
SYARIAH PRODUK FUNDING**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Dr. Muhammad, M.Ag.

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 6 Pebruari 2007

Pukul : 08.00–09.00 WIB

Hasil / Nilai : **89 / A**



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 304/PS-MSI/ND/II/2007

**TESIS berjudul : PEMAHAMAN PRAKTISI BMT DI YOGYAKARTA
TERHADAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) NO.59 AKUNTANSI PERBANKAN
SYARIAH PRODUK FUNDING**

Ditulis oleh : Enny Iroh Hayati

NIM : 04913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 1 Pebruari 2007

Ketua Program,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : Pemahaman Praktisi BMT Di Yogyakarta Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah Produk *Funding*.

Ditulis oleh : Enny Iroh Hayati, S.E.

NIM : 04913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, Januari 2007

Pembimbing

Dr. Muhamad, M.Ag.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan
apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat),
dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
QS. Al-Hasyr (59): 18

“... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib)
sesuatu kaum (orang, bangsa) sehingga mereka mengubah
keadaan diri mereka sendiri.
Dan apabila Allah menghendaki kehancuran sesuatu kaum,
maka tidak ada yang sanggup mencegahnya,
dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Allah.”
QS. Ar-Ra'd (13): 11

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini,



untuk yang melahirkan, mengasuh dan membesarkanku

untuk teman hidupku

untuk Haikal & Ghayas belahan jiwaku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	śa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh :

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. ditulis *jamā'ah*
جماعة
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh : كرامة الاولياء ditulis *karāmatul-auliā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan *dammah* ditulis *u*,

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī* dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya' mati ditulis ai, contoh: بينكم ditulis *bainakum*,
2. Fathah+wāwu mati ditulis au, contoh: قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

انتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, contoh :

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء ditulis *as-Samā*

الشمس ditulis *asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh :

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

اهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islām*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat karunia-Nya, selesai sudah penulisan tesis ini. Rasa syukur yang mendalam ini penulis panjatkan karena karya ini lahir dari proses yang cukup panjang dan juga menyita banyak waktu. Bukanlah hal yang mudah bagi penulis untuk dapat segera menyelesaikan penelitian ini. Di tengah padatnya urusan pekerjaan dan rumah tangga, penulis harus mengatur waktu atau paling tidak memanfaatkan sedikit kesempatan yang ada untuk mengurus segala sesuatu yang terkait dengan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna untuk dikatakan sebagai karya ilmiah. Meskipun secara formal penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar akademik Magister Studi Islam (MSI) pada konsentrasi Ekonomi Islam Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, namun demikian karya ini telah memberikan kepuasan tersendiri bagi penulis. Paling tidak karya ini menjadi telah menjadi *locus individuasi* dari penulis dalam hal penguasaan metodologi dan cara kerjanya.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, mulai dari lahirnya rancangan penelitian sampai selesainya penulisan, banyak uluran tangan yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sudah selayaknya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus.

Pertama-tama ucapan terima kasih ditujukan kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui Kepala Biro ADUM yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk mengikuti program magister ini.

Penghargaan dan terima kasih juga ditujukan kepada Dr. Muhammad, M.Ag. yang di sela-sela kesibukannya berkenan membimbing hingga mencapai akhir dan

melalui bimbingan dan arahan beliau pula telah memperluas cakrawala berpikir penulis.

Ucapan terima kasih yang mendalam untuk Aa' Ujang atas pengertian dan bantuannya. Juga untuk dua buah hatiku Haikal dan Ghiyas yang telah merelakan tersitanya waktu dan perhatian untuk mereka sejak masa perkuliahan dan terutama demi terselesaikannya tesis ini.

Rasa hormat dan ungkapan terimakasih yang tulus penulis tujukan kepada ayahanda H. Tatag (alm) dan ibunda Hj. Siti Zani'ah yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan kasih sayang serta do'a restu yang tiada hentinya. Juga kepada Ayah mertua M. Sholeh beserta ibu dan keluarga besar di Sukabumi, Jawa Barat yang telah memberikan perhatian dan do'a restunya.

Ucapan terimakasih ditujukan kepada rekan-rekan dosen dan staf pada Fakultas Sains dan Teknologi dan Bagian Keuangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, utamanya Ibu Dra. Maizer Said Nahdi, M.Si (Dekan Fakultas Sains dan Teknologi), Bapak Drs. Sjamsul Hady, M.Pd.I, dan Ibu Dra. Yuli Annisah yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk mengurus segala sesuatu yang terkait dengan penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada teman-teman kuliah di MSI, utamanya Ibu Permata Ulfa dan Mbak Atik yang telah memberikan saran-saran yang sangat berharga.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Program, Kepala Bidang Akademik, staf sekretariat, dan staf perpustakaan Program Pascasarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan layanan administratif yang memuaskan sejak masa kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih untuk manajer dan staf PUSKOPSYAH BMT Mitra Nugraha Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian pada anggota PUSKOPSYAH BMT Mitra Nugraha Yogyakarta. Ucapan terima kasih juga kepada responden anggota PUSKOPSYAH

BMT Mitra Nugraha Yogyakarta yang bersedia membantu penulis selama mengadakan penelitian.

Akhirnya kepada Allah jualah dikembalikan segala sesuatunya. Semoga imbalan yang berlipat ganda senantiasa berlimpah dari rahmat-Nya, dan semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi semua fihak yang berkepentingan. Amin.



Yogyakarta, Pebruari 2007

Penulis

Enny Iroh Hayati, S.E.

NIM: 04913009

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR - i

HALAMAN SAMPUL DALAM - ii

HALAMAN PENGESAHAN - iii

HALAMAN TIM PENGUJI - iv

HALAMAN NOTA DINAS - v

HALAMAN PERSETUJUAN - vi

HALAMAN MOTTO - vii

HALAMAN PERSEMBAHAN - viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN - ix

KATA PENGANTAR - xii

DAFTAR ISI - xv

DAFTAR TABEL - xviii

DAFTAR GAMBAR - xx

ABSTRAK - xxi



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah - 1

B. Rumusan Masalah - 7

C. Pembatasan Masalah - 8

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian - 8

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian - 9

F. Telaah Pustaka - 11

G. Sistematika Pembahasan - 15

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka - 17

1. Pengertian Umum Akuntansi - 17

2. Prinsip Akuntansi Dalam Islam (Akuntansi Syari'ah) - 25
3. *Baitul Māl wat Tamwīl* – 29
 - a. Karakteristik Usaha *Baitul Māl wat Tamwīl* – 29
 - b. Produk-produk Jasa Keuangan BMT – 30
 - c. Perlunya Akuntansi Yang Sesuai Syariat Islam Di BMT - 37
4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 – 38
5. Pemahaman – 49
 - a. Proses Menuju Pemahaman – 49
 - b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman - 55
- B. Kerangka Berpikir - 60
- C. Hipotesis - 62

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

- A. Pendekatan Penelitian - 64
- B. Jenis Penelitian - 64
- C. Tahapan Penelitian - 65
- D. Lokasi Penelitian – 66
- E. Subyek Penelitian - 66
- F. Populasi - 67
- G. Teknik Pengambilan Sampel (*Sampling*) - 68
- H. Identifikasi Variabel Penelitian - 71
- I. Teknik Pengumpulan Data - 72
 1. Pengembangan Instrumen Penelitian - 74
 2. Uji Validitas dan Reliabilitas - 75
- J. Teknik Analisa Data - 79

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian - 84
 1. Gambaran Umum Daerah Penelitian - 84

2. Gambaran Praktek Akuntansi Di BMT Anggota PUSKOPSYAH dan Pandangan Praktisi BMT Terhadap PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syari'ah - 88
3. Gambaran Mengenai Karakteristik Responden - 94
4. Deskripsi Pemahaman Responden Terhadap PSAK No. 59 Pengakuan dan Pengukuran Produk *Funding* - 101
 - a. Deskripsi Pemahaman Responden Terhadap PSAK No. 59 Pengakuan dan Pengukuran Produk *Funding* Menurut Kelompok Umur, Lama Bekerja, Latar Belakang Pendidikan, dan Frekuensi Mengikuti Pelatihan - 104
 - b. Deskripsi Mengenai Jawaban Responden Terhadap Butir Angket Skala Pemahaman - 112
5. Hasil Uji Statistik Mengenai Pengaruh Umur, Lama Bekerja, Latar Belakang Pendidikan, dan Frekuensi Mengikuti Pelatihan Terhadap Pemahaman - 115
 - a. Uji F Untuk Analisis Korelasi Ganda - 115
 - b. Uji t Untuk Analisis Korelasi Parsial - 117
- B. Pembahasan Hasil Penelitian - 120

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan - 130
- B. Saran-saran - 131
- C. Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi -132

DAFTAR PUSTAKA – 133

LAMPIRAN

BIOGRAFI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah BMT Anggota Puskopsyah DIY Pada Tiap Subpopulasi - 67
Tabel 3.2	<i>Sample Fraction</i> dan Jumlah Sampel Pada Tiap Subpopulasi - 69
Tabel 3.3	Jumlah Sampel BMT dan Responden Pada Tiap Subpopulasi - 71
Tabel 3.4	Penyebaran Nomor Butir Angket Skala Pemahaman - 75
Tabel 3.5	Interpretasi Dari Nilai r - 82
Tabel 4.1	Jumlah BMT Yang Diadakan Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner - 88
Tabel 4.2	Tingkat Penerapan PSAK No. 59 di BMT Anggota Puskopyah DIY - 89
Tabel 4.3	Sumber Informasi Tentang PSAK No. 59 Menurut Responden - 90
Tabel 4.4	Tingkat Kesulitan Dalam Mempraktekkan PSAK No. 59 Menurut Responden - 91
Tabel 4.5	Latar Belakang Pendidikan Responden - 92
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Kelompok Umur - 95
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Menurut Lamanya Responden Bekerja di BMT - 97
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan - 99
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Responden Dalam Mengikuti Pelatihan - 100
Tabel 4.10	Kategori Tingkat Pemahaman - 102
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman Responden Terhadap PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah Pengakuan dan Pengukuran Produk <i>Funding</i> - 102
Tabel 4.12	Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman Responden Menurut Kelompok Umur - 104

- Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman Responden Menurut Lamanya Bekerja - 106
- Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan - 108
- Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman Responden Menurut Frekuensi Mengikuti Pelatihan - 110
- Tabel 4.16 Tingkat Jawaban Responden Terhadap Butir Pertanyaan Standar Akuntansi Yang Sesuai Untuk BMT - 113
- Tabel 4.17 Tingkat Jawaban Responden Terhadap Butir Pertanyaan Perbedaan Antara Tabungan dengan Giro - 114
- Tabel 4.18 Tingkat jawaban responden terhadap Butir Pertanyaan No. 13 - 114
- Tabel 4.19 Hasil Pengujian dengan Analisa Korelasi - 116
- Tabel 4.20 Hasil Uji F Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat - 117
- Tabel 4.21 Koefisien Korelasi Parsial Variabel Umur, Lama Bekerja, Latar Belakang Pendidikan, dan Frekuensi Mengikuti Pelatihan Terhadap Variabel Pemahaman - 118
- Tabel 4.22 Uji t Hubungan Secara Parsial Antara Umur, Lama Bekerja, Latar Belakang Pendidikan, dan Frekuensi Mengikuti Pelatihan Terhadap Pemahaman - 119

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Histogram Kelompok Umur Responden - 96
- Gambar 4.2 Histogram Lamanya Responden Bekerja di BMT - 98
- Gambar 4.3 Histogram Latar Belakang Pendidikan Responden - 99
- Gambar 4.4 Histogram Frekuensi Responden Mengikuti Pelatihan - 101
- Gambar 4.5 Histogram Tingkat Pemahaman Responden Terhadap PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah Pengakuan dan Pengukuran Produk *Funding* - 103
- Gambar 4.6 Histogram Tingkat Pemahaman Responden Menurut Kelompok Umur - 105
- Gambar 4.7 Histogram Tingkat Pemahaman Responden Menurut Lamanya Bekerja - 107
- Gambar 4.8 Histogram Tingkat Pemahaman Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan - 109
- Gambar 4.9 Histogram Tingkat Pemahaman Responden Menurut Frekuensi Mengikuti Pelatihan - 111

ABSTRAK

Pemahaman Praktisi BMT di Yogyakarta Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Produk Funding

Lembaga bisnis Islami (syari'ah) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islami. Maka, hadirnya lembaga keuangan syariah seperti Baitul māl wat tamwīl (BMT) tentunya akan mempengaruhi organisasi akuntansi yang akan digunakan. Dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, diharapkan sebagai instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam menabung dan berbisnis dengan bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sistem perbankan syariah dalam operasional BMT yang belum maksimal bisa disebabkan karena prinsip-prinsip syariah yang menjadi *frame of reference* dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT sendiri. Hal ini dikarenakan masih lemahnya sumber daya insani pengelola BMT dan juga tidak adanya kepastian hukum yang jelas yang secara spesifik mengatur keberadaan lembaga keuangan mikro syariah.

Tujuan penelitian ini adalah berusaha memberi gambaran mengenai pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK 59. Jadi penelitian ini mempunyai sifat deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Tetapi, untuk mengungkapkan dan memperjelas antara konsep dan realita juga digunakan pendekatan kualitatif. Populasinya adalah BMT yang menjadi anggota PUSKOPSYAH DIY, dan subyek penelitiannya adalah manajer dan staf akuntansinya. BMT yang diambil sebagai sampel penelitian adalah 30% dari 80 anggota yang masih aktif. Karena jumlah elemen tiap subpopulasi tidak sama, maka untuk menentukan jumlah sampel yang diambil di tiap-tiap subpopulasi digunakan *proportional sampling* dan pengambilan sampel digunakan *simple random sampling*. Sedang untuk angketnya digunakan *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, variabel bebas terdiri dari: usia; latar belakang pendidikan; lama bekerja di institusi BMT; dan frekuensi mengikuti pelatihan. Sedangkan variabel terikatnya yaitu pemahaman praktisi BMT pada PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk funding. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, observasi, dan wawancara. Sedangkan analisa data meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial.

Hasil penelitian ini adalah tingkat pemahaman responden dibagi dalam 3 kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dari data yang terkumpul diketahui bahwa 95.8% responden berada pada kategori tingkat pemahaman tinggi dan 4.2% berada pada kategori tingkat pemahaman sedang. Kemudian berdasarkan uji analisis hubungan, ternyata variabel usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingginya tingkat pemahaman responden.

ABSTRACT

Yogyakarta BMT Practitioners' Understanding on the Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 59 on Shari'ate Banking Accountancy for Funding Product

Islamic (shari'ate) business institution is one of the instruments used to introduce shari'ate economic regulation. Thus, the present of shari'ate financial institutions such as Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) will undoubtedly influence the kind accountancy organization used. The introduction of the Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 59 on Shari'ate Banking Accountancy, as one of the accountancy organizations, is expected to help enhance public's trust, especially to save their money and conduct their business with shari'ate banks and shari'ate micro financial institutions. Many problems related to shari'ate banking system and the operational of BMT possibly because shari'ate principles used as the frame of reference in the operational of BMT, are not well understood yet by most of BMT administrators. This is because the shari'ate bank system is not supported yet by qualified human resources, coupled by the absence of fixed law ruling the existence of shari'ate micro financial institutions in the law about banking in Indonesia.

The objective of this research is to explore BMT practitioners' understanding about the SFAS No. 59 on Shari'ate Banking Accountancy for funding product. For this reason, the research is conducted using descriptive method. Field research using quantitative approach is also used. However, qualitative approach is also used to explore and to clarify as well as to compare between the concept and the real situation. The population used in this study is member of PUSKOPSYAH DIY, and the subjects of this research are the managers and accounting staff of these BMTs. The sample consists of 30% of 80 active members. However, since the magnitude of each sub-population is different, proportional sampling method is used to determine the number of sample taken from each sub-population, and purposive sampling method is used as the sampling method. The independent variables used in this research are age, educational background, the length of time working in BMT, and the frequency of training or workshop joined by the subjects. Meanwhile, the dependent variable in this research is the BMT practitioners' understanding about SFAS No. 59 for funding product. Data gathering method used in this research was questionnaire, field observation and interview. Meanwhile, data analysis for this study includes descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis.

For the purpose of this study, the understanding level of the subjects was divided into 3 categories, high, medium and low level. From the data collection, it was obtained that 95,8% the subjects are the high level category, and 4,2% are in the medium category. Meanwhile, no subject is categorized under low level category. Furthermore, based on test analysis on the relationship between independent variables and dependent variables, it was obtained that there is a significant relationship between the level of understanding and age, the length of work time, educational background as well as the frequency of training and workshop joined by the subjects.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian dan pembicaraan ekonomi Islam semakin merebak ke seluruh dunia. Bersamaan dengan itu, instrumen-instrumen ekonomi yang bernafaskan Islam juga mulai bermunculan.¹ Sebagaimana diketahui, lembaga keuangan merupakan instrumen penting di hampir seluruh sistem ekonomi dunia.

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, telah memberi inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah (*grass root*).² Semula harapan ini hanya tertumpu pada BMI. Namun harapan ini terhambat oleh Undang-undang Perbankan, karena usaha kecil/mikro tidak mampu memenuhi prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh Undang-undang. BMI sebagai bank umum terkendala dengan prosedur ini. Meskipun misi keumatannya cukup tinggi, namun realitas di lapangannya mengalami banyak hambatan, baik dari sisi prosedur, plafon pembiayaan maupun lingkungan bisnisnya.

¹ Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi Dalam Alquran*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 1.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hal. 72.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah, dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).³ Harapan kepada BPRS menjadi sangat besar, mengingat cakupan bisnis bank ini lebih kecil. Namun dalam realitasnya sistem bisnis BPRS juga terjebak pada pemusatan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik modal. Komitmen untuk membantu meningkatkan derajat hidup masyarakat bawah mengalami kendala baik dari sisi hukum dan praktis. Dari sisi hukum, prosedur peminjaman bank umum dengan BPRS sama, begitu juga dari sisi teknis. Padahal inilah kendala utama pengusaha kecil, sehingga harapan besar pada BPRS hanya menjadi realita.

Dari persoalan diatas, mendorong munculnya lembaga keuangan syari'ah alternatif. Yakni lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis juga sosial.⁴ Lembaga keuangan yang bersifat mikro, yang bergerak di kalangan ekonomi bawah, yaitu BMT (*Baitul Maal wat-Tamwil*). BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar, tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol yang lebih dominan.

Sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, maka BMT di

³ Sesungguhnya dalam Islam tidak mengenal istilah perkreditan tetapi pembiayaan. Penggunaan istilah perkreditan ini menjadikan makna pembiayaan menjadi kabur. *Ibid*.

⁴ *Ibid*, hal. 73-74.

Indonesia dinaungi oleh departemen tersebut.⁵ Sampai akhir 2005 lalu, jumlah lembaga keuangan mikro syariah *Baitul Māl wat tamwīl* (BMT) di Indonesia telah mencapai lebih dari 3.000.⁶ Sedangkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, menurut data dari PUSKOPSYAH per Agustus 2006 sudah berdiri sebanyak 82 BMT, namun jumlah ini belum termasuk yang berada diluar PUSKOPSYAH.

Namun demikian, kendati lahirnya banyak BMT di tanah air dapat dipahami sebagai fenomena menggembirakan, bukan berarti proses ini berjalan mulus. Banyak permasalahan penting (*crucial problems*) yang perlu segera dipecahkan untuk dicarikan solusinya. Salah satu permasalahan itu adalah dalam hal implementasi prinsip-prinsip syariat Islam dalam bidang akuntansi. Keberadaan akuntansi dalam lembaga keuangan merupakan hal yang sangat vital, karena hampir setiap hari lembaga-lembaga keuangan senantiasa berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan yang memerlukan suatu pedoman.

Islam sebagai ideologi tentunya sangat sarat dengan nilai. Dengan demikian, bangunan akuntansi yang berlaku dalam masyarakat Islam tentunya harus menyesuaikan diri dengan karakteristik Islam itu sendiri. Sehingga universalitas ajaran Islam tentunya dapat dijadikan acuan secara menyeluruh bagi semua kelompok masyarakat.⁷

⁵ Akhyar Adnan, dkk. *Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Ekonomi Islam (Perspektif Lembaga Keuangan Syariah Di DIY)*. Laporan Penelitian. (Yogyakarta: MSI UII, 2005), hal. 26.

⁶ www.republika.co.id

⁷ Muhamad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 10.

Akuntansi syari'ah memandang bahwa tujuan dasar dari akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Ia (akuntansi syari'ah) melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat "penghubung" antara *stockholders*, *entity* dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah sehingga informasi yang disampaikan bisa benar-benar sesuai dengan kondisi riil tanpa ada rekayasa dari pihak manapun sehingga ada "nilai ibadah" secara individu bagi *stockholders* dan para akuntan, dan "ibadah sosial" bagi terciptanya peradaban manusia yang lebih baik.

Secara legal dan formal, BMT berbadan hukum koperasi. Namun standar akuntansi yang digunakan berbeda-beda.⁸ Ada yang memakai akuntansi koperasi, akuntansi perseroan terbatas, bahkan ada yang memakai standard akuntansi bank.

Karena biasanya BMT berbadan hukum koperasi, BMT menggunakan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi sebagai standar akuntansinya. Mengenai hal ini Triyuwono berpandangan bahwa bentuk koperasi yang berwatak sosial memberikan warna yang sama pada praktik, atau standar akuntansi keuangan koperasi.⁹ Namun, meski akuntansi berada dalam wadah koperasi yang berwatak sosial, ia masih diwarnai oleh watak aslinya yang kapitalistik (lebih mementingkan anggota

⁸ "BMT Perlu Standard Akuntansi" dalam www.republika.co.id

⁹ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah dan Koperasi Mencari Bentuk Dalam Metafora Amanah*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Volume 1 No.1 Mei 1997, hal. 38-42.

koperasi/*stockholders*) yang tentu saja kurang sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan syariah.

Sementara itu Amin Aziz, Ketua Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) mengakui bahwa operasional BMT memang sudah sangat mirip dengan bank dan sudah berbeda dari koperasi. Bila koperasi hanya menerima tabungan dan meminjamkan dana hanya untuk anggotanya, maka BMT banyak yang melayani di luar anggota.¹⁰

Hal senada juga dikemukakan Yaya.¹¹ Ia menyatakan bahwa sebagai lembaga yang berdasarkan ajaran Islam, BMT dan Bank Syari'ah beroperasi berdasarkan kaidah fiqh yang sama. Baik BMT maupun Bank Syari'ah mesti mendasari operasinya berdasar fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam menentukan dasar hukum suatu transaksi. Oleh karenanya dalam praktek di lapangan, tidak ada perbedaan antara transaksi di BMT maupun transaksi di Bank Syari'ah.

Berdasar hal tersebut, perlu dilakukan sinkronisasi praktek akuntansi BMT dengan PSAK 59.¹² Hal ini disebabkan adanya kesamaan *underlying transaction* antara transaksi di BMT dengan transaksi di Bank Syariah. Hanya saja mengingat PSAK 59 secara eksplisit dinyatakan untuk aktifitas bank Syariah (PSAK 59 paragraf

¹⁰ Amin Aziz dalam "*Jangan Paksa BMT Besar Jadi BPRS*" dalam [www. republika.co.id](http://www.republika.co.id)

¹¹ Rizal Yaya, "*Mengkritisi Konsep Akuntansi Keuangan bagi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*". Workshop Merancang Format Akuntansi Keuangan Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Hotel Inna Garuda-Yogyakarta tanggal 9-12 Agustus 2004 oleh Pusat Pengembangan Ekonomi (PPE) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Hidayatul Muamalah Wonogiri, hal. 7-8.

¹² *Ibid*, hal 10.

1), akan menimbulkan keengganan pada BMT untuk mengikutinya.¹³ Dalam hal ini, perlu untuk menjembatani kesamaan kepentingan akan penggunaan standar akuntansi syari'ah bagi lembaga keuangan maupun non keuangan yang berlandaskan syari'ah dengan menambahkan beberapa beberapa klausul dalam *scope* penerapan standar.

Jadi, karena realitanya operasional BMT tidak berbeda dengan bank maka secara substantif BMT dapat disamakan dengan bank. Oleh karena itu, kiranya kurang tepat apabila BMT menggunakan standar akuntansi PSAK 27. BMT lebih tepat menggunakan PSAK No. 59 tentang Akuntansi perbankan syari'ah. Sebagaimana yang diungkapkan Adnan, meskipun secara formal konsep akuntansi lembaga keuangan mikro syari'ah belum disusun namun secara normatif dapat mengacu kepada standar yang sementara sudah ada yaitu PSAK No.59 dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan.¹⁴

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sistem perbankan syariah dalam operasional BMT yang belum maksimal itu juga bisa disebabkan karena prinsip-prinsip syariah yang menjadi *frame of reference* dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT sendiri.¹⁵ Hal ini dikarenakan masih lemahnya sumber daya insani pengelola BMT

¹³ *Ibid*, hal 9.

¹⁴ Akhyar Adnan, "*Kritik atas Konsep Akuntansi Keuangan Lembaga Syariah Mikro*" dalam Workshop Merancang Format Akuntansi Keuangan Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Hotel Inna Garuda-Yogyakarta tanggal 9-12 Agustus 2004 oleh Pusat Pengembangan Ekonomi (PPE) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Hidayatul Muamalah Wonogiri, hal. 10.

¹⁵ Makhalul Ilmi, *Teori.*, hal.49.

dan juga tidak adanya kepastian hukum yang jelas yang secara spesifik mengatur keberadaan lembaga keuangan mikro syariah di tengah tata hukum perbankan Indonesia.

Berangkat dari fenomena diatas, sangat menarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemahaman praktisi terhadap PSAK 59 pada lembaga keuangan mikro syariah (BMT) di Yogyakarta. Karena pemahaman dari para praktisi BMT terutama manajer dan akuntannya akan berimbas pada kebijakan dan juga teknik akuntansi yang digunakan.

B. Pembatasan Masalah

Standar akuntansi sangat diperlukan bagi sebuah lembaga yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan nilai keadilan, kebenaran dan juga pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan. Bagi lembaga keuangan syariah BMT, akuntansi yang sesuai syariah dibutuhkan untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, pemahaman praktisi BMT terhadap akuntansi yang sesuai syariah sudah menjadi suatu keharusan.

Oleh karena luasnya cakupan akuntansi syariah, maka dalam penelitian ini akan dibatasi pada pemahaman praktisi BMT terhadap pengakuan dan pengukuran produk-produk pendanaan (*funding*) menurut standar akuntansi keuangan Islam versi Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan bagaimana pengaruh usia, latar belakang pendidikan, serta frekuensi mengikuti

pelatihan atau kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi BMT terhadap pemahaman praktisi pada PSAK No. 59 tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, ditemukan beberapa persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman praktisi BMT-BMT di Yogyakarta terhadap PSAK No. 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding*?
2. Bagaimana hubungan usia, lama bekerja di BMT, latar belakang pendidikan dan frekuensi mengikuti pelatihan, seminar dan atau lainnya terhadap pemahaman praktisi BMT pada konsep PSAK No. 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman praktisi BMT-BMT di Yogyakarta terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding*.
2. Untuk mengetahui hubungan usia, lama bekerja di BMT, latar belakang pendidikan dan frekuensi mengikuti pelatihan, seminar dan atau lainnya terhadap pemahaman praktisi BMT pada konsep PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding*.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi kepentingan ilmiah, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan akuntansi dalam tinjauan Islam.
2. Bagi kepentingan BMT, diharapkan bisa memberikan pemahaman dan wacana terhadap praktisi BMT tentang perlunya standar akuntansi yang sesuai syariat Islam dalam menjalankan suatu usaha/bisnis.
3. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dan juga menjadi masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah dan mengkomparasikannya dengan yang ada di lapangan.



E. Definisi Operasional

Setiap muslim diatur oleh ketentuan syari'ah (hukum Islam) yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadis. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Al-Ghazali sebagaimana dikutip Triyuwono dan As'udi menyatakan bahwa tujuan syari'ah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kepercayaan, kehidupan, kecerdasan, keturunan dan kesejahteraan.¹⁶

Manusia telah diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Diantara anugerah itu adalah kemampuannya berfikir dan bersosialisasi. Kemauannya berfikir akan memberikan pemahaman terhadap apa yang difikirkannya.

¹⁶ Iwan Triyuwono dan Moh. As'udi, *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 25.

Pemahaman berasal dari akar kata paham. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁷, “*paham*” berarti pengertian; pendapat/pikiran; aliran, haluan, pandangan; mengerti benar (akan); tahu benar (akan); pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). “*Memahami*” berarti mengerti benar (akan); mengetahui benar; memaklumi/mengetahui. Sedangkan “*pemahaman*” berarti: proses perbuatan; cara memahami atau memahamkan.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka yang dimaksud pemahaman terhadap PSAK 59 adalah proses perbuatan atau cara untuk mengetahui/mengerti benar akan PSAK 59 tersebut. Dalam hal ini, proses untuk mengetahui PSAK 59 meliputi: pengetahuannya terhadap maksud dan tujuan pencatatan, pengetahuannya terhadap standar akuntansi, serta pengetahuannya terhadap standar akuntansi yang sesuai syariah Islam dan PSAK 59. Adapun pengetahuan terhadap PSAK 59 ini melingkupi pengertiannya, maksud dan tujuan, serta kandungan materi PSAK 59 tersebut.

Pemahaman seseorang terhadap PSAK 59 tersebut meliputi dua aspek, yaitu teori dan praktek. Praktisi dianggap paham secara teoritis terhadap PSAK 59 bila, baik lisan maupun tulisan mampu menjawab persoalan yang berkaitan. Sedangkan praktisi dianggap paham secara praktek terhadap PSAK 59, bila diberikan contoh-contoh kasus maka para praktisi BMT tersebut sudah mampu menyelesaikan dengan tepat.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 2 Cet. 9, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

Menurut Halim, setidaknya ada lima prosedur yang dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman, yaitu:¹⁸

1. Menelaah pengalaman sebelumnya.
2. Mengajukan pertanyaan kepada praktisi.
3. Menginspeksi dokumen dan catatan.
4. Mengamati kegiatan dan operasi entitas.
5. Mempelajari buku manual prosedur dan kebijakan akuntansinya.

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pemahaman seperti usia, lama bekerja di BMT, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan atau kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi BMT akan diuji apakah mempunyai pengaruh terhadap pemahaman praktisi BMT pada PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *financing*. Dalam hal ini yang dimaksud dengan praktisi adalah petugas pencatatan (praktisi akuntansi) dan manajer di masing-masing BMT.

F. Telaah Pustaka

Apa yang dicermati dalam tesis ini bukan merupakan persoalan lapangan semata, melainkan juga persoalan kepatuhan terhadap syari'ah pada lembaga keuangan syariah terutama pada BMT di Yogyakarta.

¹⁸ Abdul Halim, *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan) Ed. 3*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003) hal 215. dengan modifikasi.

Dalam dunia usaha diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.¹⁹ PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syari'ah yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002 merupakan salah satu bentuk wacana tentang akuntansi syari'ah praktis di Indonesia. Akuntansi syari'ah bukan hanya untuk menyediakan informasi untuk *decision making* tapi juga menjamin bahwa organisasi mematuhi prinsip dan aturan syariah serta tujuan *socio economic*.²⁰

Dalam penyusunan PSAK 59, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merujuk metode yang digunakan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yang bermarkas di Bahrain, yaitu AASIFI (*Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution*). Hal ini dilakukan mengingat semakin mendesaknya kebutuhan akan standar akuntansi untuk perbankan syari'ah di Indonesia. PSAK 59 tidak hanya menyediakan informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ekonomi tetapi juga informasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah. Hal ini merupakan cerminan karakteristik lembaga keuangan syari'ah. Laporan keuangan akuntansi syari'ah praktis juga ditujukan untuk pemakai yang sama dengan pemakai laporan keuangan akuntansi konvensional dengan tambahan untuk investor dana terikat, pembayar zakat, infaq, dan shadaqah serta Dewan Pengawas Syari'ah.

¹⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003) hal. 14.

²⁰ Dwi Ratmono, *Pengungkapan Islamic Values Dalam Pelaporan Keuangan Bank Syari'ah Paradigma Akuntansi Syari'ah Filosofis-Teoritis dan PSAK 59*, Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam II, Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 28-29 Mei 2004, hal. 395.

Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Karya ilmiah yang cukup relevan dengan penelitian ini adalah skripsi Nur Fitri Utami.²¹ Dalam penelitiannya di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, dia menyoroti masalah implementasi akuntansi syariah (dalam hal ini PSAK No. 59) dalam produk jual beli *Murabahah*. Dia mencoba membandingkan apakah proses pencatatan tentang produk *Murabahah* sudah sesuai dengan PSAK No. 59, dan apakah penyajian dalam laporan keuangannya sudah memenuhi komponen-komponen dan yang diatur dalam PSAK No. 59. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti bagaimana pemahaman praktisi BMT di Yogyakarta terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding* dan bagaimana hubungan usia, lama bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan terhadap pemahaman tersebut. Oleh karenanya penelitian ini menjadi awal untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman praktisi BMT di Yogyakarta terhadap PSAK 59 dan kemungkinan penerapannya.

Dalam dunia akuntansi syari'ah di Indonesia, masih jarang pakar-pakar yang berkecimpung dalam bidang ini. Hanya ada beberapa pakar yang cukup eksis, kritis dan mempunyai kesungguhan yang sangat dalam mengembangkan wacana akuntansi syariah. Salah satu tokoh yang dianggap sebagai pencetus wacana akuntansi syari'ah di Indonesia yaitu Iwan Triuwono ketika ia menulis sebuah artikel di harian *Republika* pada sekitar tahun 1997.

²¹ Nur Fitri Utami, *Penerapan Akuntansi Syari'ah Produk Jual Beli Murabahah di BPRS Margirizki Bahagia*, Skripsi (Yogyakarta: STIS, 2003).

Dalam salah satu makalahnya, Triyuwono mengatakan bahwa PSAK 59 banyak merujuk pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Selain itu PSAK 59 sendiri masih banyak mengundang kritikan mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ia berargumentasi bahwa PSAK 59 masih sarat dengan nilai-nilai kepemilikan kapitalisme.²²

Pada karyanya yang lain Triyuwono mengungkapkan bahwa akuntansi syari'ah yang dipraktekkan sampai sekarang ini sedang mencari bentuk,²³ sehingga apa yang dipraktekkan di lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syari'ah atau di *baitul māl wa tamwīl* masih mengadopsi teori lama. Namun demikian Sofyan Syafri Harahap, salah seorang pakar lain menyatakan bahwa keberadaan PSAK No. 59 bisa dijadikan sebagai awal yang baik menuju suatu standar akuntansi Islam yang hakiki.²⁴

Ia juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nilai Islam dalam akuntansi adalah *Comprehensive Accounting* yang hakikatnya adalah sistem informasi, penentuan laba, pencatatan transaksi yang sekaligus pertanggungjawaban (*accountability*).²⁵

²² Iwan Triyuwono, *Kritik atas Konsep Teori yang Digunakan dalam Standar Akuntansi Perbankan Syariah*. Makalah. Seminar dan Musyawarah FOSSEI yang diselenggarakan oleh Forum Studi Islam dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 23 Juli 2002.

²³ Iwan Triyuwono, *Metafora Zakat dan Sharia'ah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syariah*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Volume 5 NO.2 Desember 2001, hal. 131-132.

²⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Kritik Terhadap PSAK Perbankan Syariah LAI dan AAOIFI*, Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Volume 1 No. 3, Desember 2001, hal. 88.

²⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hal. 124.

Selanjutnya yaitu Dwi Ratmono yang menyatakan bahwa pengungkapan *Islamic Values* menurut PSAK 59 didasarkan pada tujuan pelaporan keuangannya yaitu sebatas penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan dan mengenai transaksi bisnis yang halal.²⁶ Sedangkan untuk pengungkapan *Islamic Values* dalam paradigma akuntansi syari'ah yang ditekankan untuk tujuan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholders* belum terpenuhi.

Namun demikian, terlepas dari keterbatasannya, sebagaimana yang dikatakan diatas dapat diketahui bahwa keberadaan PSAK 59 merupakan suatu awal yang baik dan suatu langkah maju untuk mewujudkan akuntansi syari'ah yang ideal yang menjadi dambaan setiap muslim. Selanjutnya dari apa yang telah diuraikan diatas, penulis simpulkan bahwa tidak ada persamaan yang ditemukan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Karena penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, maka sekiranya penelitian ini layak diteruskan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah melakukan pembahasan, maka dalam penelitian ini akan digunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, telaah pustaka, serta sistematika pembahasannya.

²⁶ Dwi Ratmono, *Pengungkapan*., hal. 395.

Bab II. Tinjauan Pustaka, Kerangka Berpikir dan Hipotesis. Pada subbab tinjauan pustaka akan dijelaskan tentang pengertian umum akuntansi; prinsip akuntansi dalam Islam (akuntansi syari'ah); karakteristik usaha dan produk-produk BMT; perlunya akuntansi yang sesuai syariat Islam di BMT; pengertian dan fungsi serta pengakuan dan pengukuran produk *funding* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59. Bab ini juga menjelaskan mengenai teori-teori tentang pemahaman dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab III. Metodologi Penelitian. Pada Bab ini akan diuraikan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah, kemudian akan dilakukan pembahasan (analisa data). Selain itu berbekal pada kerangka teori seputar akuntansi bagi lembaga keuangan Islam, akan dilakukan pencermatan dan pengolahan antar data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif.

Bab V. Penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Umum Akuntansi

Akuntansi memiliki arti penting dalam aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga, baik aktifitas ekonomi maupun non ekonomi. Lembaga memerlukan pencatatan guna mendokumentasikan dan mempertanggungjawabkan aktivitas-aktivitas tersebut serta sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, sudah merupakan hal yang wajar bahwa akuntansi dibutuhkan agar setiap transaksi ekonomis yang dilakukan dalam lembaga itu dapat tercatat dan terkontrol dengan baik. Dengan akuntansi, hak berbagai pihak yang terlibat dapat terlindungi secara adil.¹

Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas

¹ Hertanto Widodo dkk, *Pedoman Akuntansi Syariah Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, (Bandung: Mizan, 2000), hal 58.

ekonomi dan kondisi suatu usaha.² Sedangkan menurut literatur-literatur yang ada, terdapat beberapa pengertian akuntansi, antara lain sebagai berikut:³

- 1). Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. (*American Institute of Certified Public Accountant - AICPA*)
- 2). Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan dalam mempertimbangkan berbagai alternatif untuk pengambilan kesimpulan oleh para pemakainya. (*American Accounting Association - AAA*).
- 3). Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sebagai dasar dalam memilih diantara beberapa alternatif. (*Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4*)
- 4). Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. (*A Statement of Basic Accounting Theory*)

² Carl S. Warren, et. al, *Accounting 21th Edition*, alih bahasa Aria Farahmita, dkk. *Pengantar Akuntansi Edisi 21 (Buku 1)*, Jakarta (Salemba Empat, 2005), hal.24-27.

³ Lihat dalam Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 27-28.

Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to account*, yang salah satu artinya adalah “menghitung”.⁴ Secara teknis akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya proses perhitungan.

Tujuan dari akuntansi adalah memberi informasi kepada para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Tujuan umum dari akuntansi adalah memberikan gambaran kepada para pemakai tentang kinerja usaha, posisi keuangan, dan arus kas sebuah organisasi dalam periode tertentu. Dari tujuan umum ini, informasi akuntansi dapat dipergunakan untuk tujuan khusus, misalnya untuk menghitung kewajiban pajak dan kemungkinan dapat dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban zakat.

Dalam proses akuntansi (pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan) terkandung suatu proses yang otomatis akan dilakukan, yaitu pengakuan, perlakuan, dan penentuan.⁵ Proses pengakuan merupakan pekerjaan menentukan kapan suatu transaksi keuangan dapat diakui dalam akuntansi. Hal ini akan berdampak pada besarnya harta (*assets*), utang (*liabilities*), penyertaan (*equity*), pendapatan (*revenue*), dan beban (*expenses*).

Proses perlakuan merupakan kegiatan menetapkan suatu transaksi dapat diperlakukan ke dalam pos yang mana, misal suatu pengeluaran apakah diperlakukan sebagai *revenue expenditure* atau *capital expenditure*. Apakah suatu transaksi

⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 11.

⁵ *Ibid*, hal. 14-15.

diperlakukan sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expenses*). Sedangkan proses penentuan merupakan suatu kegiatan menghitung beberapa nilai uang yang dapat melekat, dicatat, dan dilaporkan dalam akun yang terkait.

Proses pekerjaan akuntansi merupakan sebuah siklus, yang dimulai dari pembuatan bukti sampai penyusunan laporan keuangan.⁶ Berikut ini uraian singkat mengenai siklus akuntansi tersebut.

1. Bukti Transaksi

Dalam akuntansi, bukti transaksi merupakan dokumen sumber dan merupakan syarat mutlak dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal.⁷ Fungsi utama bukti ini adalah sebagai bukti tertulis dan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi.⁸ Jika suatu pencatatan tidak didukung dengan bukti tertulis, maka kebenaran transaksi tersebut diragukan. Salah satu parameter bahwa akuntansi suatu perusahaan dikatakan baik adalah jika semua bukti pendukung pencatatannya memadai dan disimpan dengan baik. Dari segi pembuatnya, bukti transaksi dapat dibedakan menjadi dua:

- a). Bukti intern, yaitu bukti/dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Misalnya: memo (jurnal memorial), bukti penerimaan

⁶ Hertanto Widodo dkk, *Panduan*, hal. 61.

⁷ *Ibid*.

⁸ Dalam istilah akuntansi, suatu transaksi adalah setiap kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha/entitas usaha yang dampaknya dapat diukur secara wajar/andal dicatat sebagai transaksi. Lihat dalam Charles T. Horngren, et. al., *Accounting 3rd Edition*, alih bahasa Thomas H. Secokusumo, *Akuntansi Di Indonesia, Buku Satu*, (Jakarta: Salemba Empat, 1997) hal. 63.

kas, bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan barang, bukti pengeluaran barang dan nota debit.

- b) Bukti ekstern, yaitu bukti/dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh pihak diluar perusahaan. Misalnya: Faktur, Kwitansi, Nota Kredit dan Nota Kontan.

2. Jurnal

Jurnal merupakan buku harian untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis (menurut urutan tanggal) ke dalam kelompok akun debit dan kredit. Jurnal digunakan untuk menganalisis dan menentukan akun (*account*) yang terlibat dan jumlah setiap akun tersebut pada setiap transaksi yang terjadi. Jurnal merupakan catatan akuntansi yang pertama kali diselenggarakan dalam proses akuntansi. Jurnal berguna untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke buku besar dan mengontrol keseimbangan jumlah debit dan kredit.

Jurnal mempunyai dua jenis, yaitu pertama, jurnal umum, merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh jenis transaksi dalam suatu organisasi. Kedua jurnal khusus, merupakan jurnal yang dirancang dengan bentuk tertentu untuk mencatat transaksi-transaksi sejenis yang sering terjadi dalam suatu organisasi, misalnya jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas dan lainnya.

Adapun fungsi Jurnal adalah:

- a. Fungsi historis, karena jurnal merupakan tempat mencatat menurut urutan tanggal terjadi transaksi dan kejadian.

- b. Fungsi mencatat, karena jurnal akan mencatat semua transaksi dan kejadian di dalam perusahaan.
 - c. Fungsi analisis, karena jurnal akan menghasilkan jumlah debet dan jumlah kredit.
 - d. Fungsi instruksi, karena jurnal memerintahkan pencatatan debet dan kredit dalam buku besar sesuai dengan jumlahnya.
 - e. Fungsi informatif, karena jurnal memberi keterangan tentang kegiatan perusahaan sehari-hari.
3. Buku Besar dan Buku Pembantu⁹

Setelah dilakukan pencatatan dalam jurnal, tahap berikutnya adalah melakukan *posting* ke buku besar dan buku pembantu, yaitu memindahkan jurnal-jurnal ke akun/rekening yang sesuai.

4. Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan suatu daftar yang berisi saldo akun buku besar yang dicatat secara sistematis menurut nomor kode akun buku besarnya, disertai jumlah debet atau kredit akun yang bersangkutan.

5. Neraca Lajur

Neraca lajur yaitu suatu kertas kerja yang terdiri atas berbagai kolom. Kolom-kolom tersebut biasanya terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca. Pada tahap ini dilakukan

⁹ Buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk menyortir dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku pembantu adalah suatu cabang dari buku besar yang berisi perincian akun tertentu yang ada dalam buku besar. Lihat dalam Hertanto Widodo, Ibid, hal 63.

penyesuaian-penyesuaian terhadap akun-akun yang ada agar mencerminkan kondisi yang sesungguhnya pada tanggal itu.

6. Laporan Keuangan

Tahap akhir siklus akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu, untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi, dan sebagai pertanggungjawaban dari pihak manajemen.

Laporan keuangan yang utama terdiri atas empat jenis, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas.¹⁰ Laporan laba rugi merupakan gambaran tentang operasi perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi adalah suatu ikhtisar pendapatan dan pengeluaran/beban dari suatu entitas pada suatu jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun. Laporan laba rugi mengandung informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba bersih yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban, namun jika beban melebihi pendapatan, maka hasilnya adalah kerugian bersih untuk periode tersebut.

Laporan ekuitas pemilik menyajikan ikhtisar perubahan yang terjadi dalam ekuitas pemilik pada suatu entitas pada jangka waktu tertentu. Tiga jenis transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik adalah: investasi awal, pendapatan dan beban yang menghasilkan laba/rugi bersih, dan penarikan oleh pemilik.

¹⁰ Charles T. Horngren, et. al., *Accounting*, hal. 22-23. Lihat juga Carl S. Warren, et. al., *Accounting*, hal.24-27.

Neraca adalah daftar dari seluruh aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari suatu entitas pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada akhir bulan atau akhir tahun. Neraca merupakan gambaran dari suatu entitas, sebab itu neraca sering disebut sebagai laporan posisi keuangan. Sedangkan laporan arus kas menggambarkan jumlah kas masuk (penerimaan kas) dan jumlah kas keluar (pembayaran atau pengeluaran kas) dalam suatu periode tertentu.

Sistem akuntansi bisa dilaksanakan secara manual atau mekanis (komputerisasi). Pencatatan secara manual dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dengan cukup baik bila jumlah data yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan relatif kecil. Namun, untuk perusahaan yang besar dengan *database* yang besar, pemrosesan secara manual tersebut terlalu mahal dan memakan banyak waktu.¹¹ Dengan komputerisasi, perusahaan yang mempunyai banyak transaksi dapat melakukan penjurnalan, pemindahbukuan dan penyusunan laporan keuangan dengan lebih cepat dan tepat.

Kegiatan akuntansi akan selalu ada dan dapat dilaksanakan selama manusia masih berhubungan dengan kegiatan keuangan (transaksi keuangan) baik dalam perusahaan berbentuk badan maupun perseorangan, baik berorientasi laba maupun nirlaba, dalam pemerintahan maupun keluarga. Perbedaan yang ada hanyalah apakah perlu digunakan standar akuntansi atau tidak memerlukannya.

¹¹ Carl S. Warren, et. al, *Accounting*., hal. 235-236. Lihat juga Charles T. Horngren, et. al., *Accounting*, hal. 297-303.

2. Prinsip Akuntansi Dalam Islam (Akuntansi Syari'ah)

Akuntansi merupakan domain “muamalah” dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah swt bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al Quran yang digunakan sebagai dasar munculnya akuntansi yang sesuai syariat Islam yaitu Surat Al Baqarah (2): 282¹²,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
.....(البقره: ٢٨٢)

yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”

Selanjutnya dalam catatan kaki dari ayat tersebut Muamalah diartikan seperti kegiatan berjual-beli, berutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya. Maka setiap lembaga usaha sarat dengan kegiatan muamalah sebagaimana dimaksudkan ayat diatas. Jadi dapat dipastikan bahwa pemeliharaan akuntansi wajib hukumnya dalam suatu perusahaan.

Dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 282 itu dapat dilihat bahwa tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah:¹³

¹² Al Quran dan Terjemahnya, Depag RI

¹³ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997). Hal. 142.

1. Menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.
2. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi, atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba).

Dari ayat ini (QS Al- Baqarah: 282), Muhammad melansir ada tiga kandungan prinsip umum akuntansi syari'ah yaitu; prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.¹⁴ Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas (*accountability*) selalu berkaitan dengan konsep amanah. Manusia dalam menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya di muka bumi akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang diperbuatnya. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terikat. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

Prinsip Keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis. Dalam konteks akuntansi, secara sederhana dapat diartikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Dengan kata lain, tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan.¹⁵ Prinsip keadilan ini juga bisa diterapkan dalam hal bagi hasil.

¹⁴ Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal. 42.

¹⁵ Iwan Triyuwono dalam Muhammad, *Pengantar*., hal. 12.

Prinsip kebenaran tidak bisa dilepaskan dari prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan berjalan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Jadi dapat diketahui bahwa sejak munculnya peradaban Islam, telah ada perintah untuk melakukan pencatatan yang penekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah. Konsep Islam dan hakikat akuntansi mempunyai persamaan yang searah dan telah terbukti bahwa akuntansi ada dalam Islam dan bahkan memberikan andil dalam perkembangannya.¹⁶

Dalam *Accounting Issues in Islamic Banking*,¹⁷ seperti yang dikutip Muhammad, menyebutkan bahwa tujuan informasi akuntansi dalam lembaga keuangan syari'ah muncul karena dua alasan, yaitu:

- 1) Lembaga Keuangan syari'ah dijalankan dengan kerangka syari'ah sebagai akibat dari hakikat transaksi yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.
- 2) Pengguna informasi akuntansi pada lembaga keuangan syari'ah adalah berbeda dengan pengguna informasi akuntansi di lembaga keuangan konvensional.

¹⁶ Muhammad, *Prinsip*., hal. 42.

¹⁷ *Institute of Islamic Banking and Insurance, Accounting Issues in Islamic Banking*, London, 1994 hal. 4-6) dalam Muhamad, *Pengantar*., hal. 103.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah IAI,¹⁸ tujuan laporan keuangan bank syari'ah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum dengan tambahan, antara lain menyediakan:

- a) Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syari'ah,
- b) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana,
- c) Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Sedangkan komponen laporan keuangan bank/lembaga keuangan syariah yang lengkap terdiri atas: neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah; laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan; dan catatan atas laporan keuangan.¹⁹

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan cara tambal sulam terhadap akuntansi konvensional. Akan tetapi, akuntansi syariah merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai Al-Qur'an yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi.

¹⁸ Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, paragraf 13.

¹⁹ Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (IAI), *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003*, Cet. 1, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2003), hal. II.6.

3. *Baitul Māl wat-Tamwīl*

a. Karakteristik Usaha *Baitul Māl wat-Tamwīl*

Baitul Māl wat-Tamwīl (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan²⁰ Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul mal dan baitut tamwil. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak dan seādekah atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Adapun baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.

Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya (laba dan nirlaba) dalam satu lembaga. Namun secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. Dalam perkembangannya, selain bergerak di bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan sektor riil. Sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT, yaitu jasa keuangan; sosial atau pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS); serta sektor riil. Mengingat masing-masing memiliki kekhasannya sendiri, setiap aktivitas merupakan suatu entitas (badan) yang terpisah, artinya pengelolaan dana ZIS, jasa keuangan, dan sektor riil tidak bercampur satu sama lain.

²⁰ Hertanto Widodo, *Panduan Praktis*, hal. 81

b. Produk-produk Jasa Keuangan BMT

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT adalah berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan. Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberi ruang yang cukup untuk itu. Namun dalam praktek, sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk saja yang dianggap aman dan 'profitable'.²¹

Secara umum produk-produk yang dikembangkan oleh BMT terbagi menjadi dua jenis, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana/pembiayaan (*financing*). Berikut ini akan diuraikan produk-produk BMT tersebut.

1). Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

a) Simpanan *Mudārabah*

Prinsip *mudārabah* dalam Islam di dasarkan pada firman Allah SWT dalam alqur'an sebagai berikut:²²

“ Dan sebahagian dari mereka (terdapat orang-orang yang) berjalan di muka bumi, mencari sebahagian dari karunia Allah swt...” (QS Al-Muzammil ayat 20)

“ Tidaklah dosa bagi kamu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu berangkat dari Arafah (selesai wukuf), maka berzikirlah kamu kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan ingatlah Allah sebagaimana Dia telah

²¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek*, hal.29.

²² *Ibid*, hal 31.

menunjuki kamu meskipun kamu sebelum itu sungguh termasuk orang yang sesat” (QS Al-Baqarah ayat 198)

Dalam suatu kesempatan Rasulullah saw. juga bersabda: “Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan pembayaran secara kredit, *muqorodhah* (nama lain dari *mudārabah*), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual”²³

Mudārabah merupakan wahana utama bagi perbankan syariah (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.

Mudārabah adalah salah satu aqad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *sāhib al-māl* atau *rabb al-māl*, sedang yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (proyek) halal tertentu, disebut *mudārib*. Secara teknis, *mudārabah* terjadi apabila pihak pertama mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sebagai bekal mengelola suatu jenis usaha yang dihalalkan agama. Jika kemudian dari usaha yang dijalankan pihak kedua diperoleh keuntungan (*profit*), masing-masing berhak atas bagian keuntungan tersebut yang porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian, misal 30/70, 35/65, atau 40/60.

²³ Hadis riwayat Ibnu Majah dalam *Ibid*.

Sebaliknya, jika usaha yang dijalankan pihak kedua merugi, beban kerugian dipikul bersama, di mana pihak pertama selaku *shahib al-mal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya dan pihak kedua selaku *mudārib* kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah dan cucuran keringat yang dikeluarkannya selama mengelola usaha. Inilah yang menjadi dasar sehingga para ahli berkesimpulan bahwa *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang memutlakkan adanya perimbangan pembagian keuntungan dan (risiko) kerugian.²⁴

Dasar perjanjian *mudārabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudārib*, *sāhib al-māl* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan (*controlling*) untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan dan kecurangan yang dapat dilakukan *mudārib*. Apabila dilapangan ditemukan bukti valid telah terjadi penyimpangan dan atau kecurangan oleh salah satu pihak, maka prinsip pembagian untung dan rugi secara hukum dinyatakan gugur, misalnya *mudārib* ‘sengaja’ melakukan tindakan-tindakan yang menurut perhitungan akal sehat diyakini dapat mendatangkan kerugian, memanfaatkan dana untuk kepentingan di luar usaha yang disepakati, dan lain sebagainya. Dalam keadaan demikian, bila terjadi kerugian *sāhib al-māl* tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian itu, dan sebaliknya, secara hukum kerugian itu menjadi beban hutang *mudārib*. Bahkan *sāhib al-māl* dapat melakukan upaya hukum

²⁴ *Ibid*, hal 32.

bilamana *mudārib* menolak menanggung sendiri kerugian yang timbul akibat kecerobohan perbuatannya.

Dalam kerangka penghimpunan dana *mudārabah*, nasabah bertindak sebagai *sāhib al-māl* dan BMT sebagai *mudārib*. BMT dapat menawarkan produk penghimpunan dana *mudārib* ini kepada masyarakat dengan menunjukkan cara-cara penentuan dan penghitungan porsi bagi hasilnya, dan perlu dicatat, ia tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan sistem persentase sebagaimana lazim berlaku dalam tatanan perbankan konvensional, atau dalam jumlah tertentu atas dasar kalkulasi angka-angka rupiah.

Hal demikian tidak lain karena alquran menjadi sumber rujukan pertama dalam penetapan hukum-hukum syariah menjelaskan dengan tegas bahwa tidak ada seorangpun manusia dimuka bumi yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok hari. Bahkan ia tidak akan pernah tahu apakah dirinya masih berkesempatan menikmati kehidupan selanjutnya atau tidak. Manusia hanya mampu berusaha, namun Tuhan jugalah yang menentukan hasilnya. Atas dasar itu, penentuan di muka ‘keuntungan pasti’ dalam bentuk dan cara-cara seperti apapun, sebelum usaha nasabah dijalankan, merupakan bagian dari perbuatan mendahului kehendak Tuhan, dan ini bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini sesungguhnya yang ingin dijaui lembaga keuangan Islam termasuk BMT.

b) Simpanan *Wadiah*

Dalam memobilisasi dana dari masyarakat, BMT biasanya menawarkan produk jasa *wadiah*, yang dari segi kebahasaan berarti ‘titipan’.²⁵ Akad *wadiah* termasuk kategori akad “*tabarru*”, yakni akad yang bersifat kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antara sesama manusia dalam lingkungan sosialnya.²⁶ Landasan dari akad *wadiah* ini adalah QS. An-Nisa : 58 serta QS. Al. Baqarah : 283.

Prinsip dasar *wadiah* menyebutkan bahwa seorang penitip barang wajib membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dititipi, secara otomatis untuk keperluan pemeliharaan barang titipan tersebut, disamping imbalan jasa dalam jumlah yang pantas sesuai kadar kepatutan. Demikian juga dalam hal pengerahan dana *wadiah*, pada prinsipnya BMT boleh memungut biaya administrasi kepada nasabah, karena ini menjadi haknya, dan nasabah wajib memenuhinya sebagai imbalan jasa yang diberikan BMT dalam memelihara keamanan harta (dana) yang dititipkan nasabah kepadanya. Adapun mengenai besaran biaya administrasi, kadarnya ditentukan berdasarkan parameter yang wajar dalam dunia perbankan.²⁷

Dalam kerangka pengerahan dana *wadiah* ini, atas seizin penitip (nasabah). BMT dapat mengelolanya untuk tujuan komersial, sehingga bila kemudian diperoleh keuntungan BMT dapat memberikan hibah (bonus) yang besarnya tidak boleh ditetapkan secara pasti di muka dengan kalkulasi angka-angka rupiah atau persentase

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hal. 30.

²⁷ *Ibid.*

atas nilai pokok dana *wadiah*, misalnya sekian atau sekian. Sebaliknya bila kerugian didapat, BMT menanggung risiko kerugian tersebut, sehingga *wadiah* seperti ini lazim dikenal dalam istilah fikih dengan sebutan '*wadiah yad ad-damanah*' (titipan dengan risiko ganti rugi).

Dalam praktiknya, sebagian pengelola BMT menyebut bonus *wadiah* dengan istilah 'bagi hasil' yang besarnya ditentukan dimuka atas dasar persentase angka-angka rupiah serta dengan membandingkan besaran bunga tabungan yang diberikan bank konvensional dalam menarik minat calon nasabah. Hal ini dilakukan karena pengelola merasa kesulitan ketika harus menjelaskan dengan semestinya prinsip-prinsip *wadiah* menurut ajaran syariah, sementara pada saat yang sama pengetahuan kesyariah-an nasabah sendiri masih sangat rendah. Di samping itu ditemukan pula bukti bahwa sebagian pengelola BMT melakukan hal yang sama karena kurang percaya diri dan menganggap pola yang ditawarkan BMT tidak lebih efektif daripada yang dilakukan bank konvensional.

2). Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan (*Financing*)

Pembiayaan merupakan aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktifitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.²⁸

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen.*, hal. 163.

Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga.²⁹ Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik, sehingga tidak terjadi dua kondisi yang berlawanan yakni *idle money* atau *illiquid*.³⁰

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.³¹ Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.³²

Berbagai bentuk pembiayaan tersebut harus selalu berlandaskan pada aturan syari'ah. Penyimpangan dari prinsip-prinsip syari'ah dapat berakibat pada batal/rusaknya akad sehingga dikhawatirkan dapat terjerumus pada riba yang diharamkan.

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pembiayaan/penyaluran dana yang berdasarkan pada aturan syari'ah tersebut, yaitu:³³

- a. Prinsip *musyarakah* atau *mudārabah* untuk investasi atau pembiayaan;
- b. Prinsip *murabahah*, salam, dan atau *istishna* untuk jual beli;

²⁹ *Ibid*, hal. 16.

³⁰ *Idle money*, merupakan suatu kondisi dimana dana di BMT terlalu banyak yang menganggur. *Illiquid* merupakan kebalikan dari *liquid*. *Liquid* artinya kemampuan BMT dalam mengendalikan dana dalam jangka pendek, yakni kemampuan BMT untuk menyediakan dana yang cukup dalam memenuhi kebutuhan anggotanya yang akan mengambil simpanan atau deposito yang sudah jatuh tempo. *Ibid*, hal. 16.

³¹ *Ibid*, hal 166.

³² *Ibid*, hal 166.

³³ Lihat dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, IAI 2002 p. 9.

- c. Prinsip *ijarah* dan atau *ijarah muntahiyah bittamlak* untuk sewa menyewa; atau
- d. Prinsip lain yang sesuai dengan syari'ah.

c. Perlunya Akuntansi Yang Sesuai Syariat Islam di BMT

Lembaga bisnis Islami (syari'ah) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islami. Oleh karena itu, hadirnya lembaga keuangan syariah pada khususnya dan sistem bisnis Islami (berdasarkan syari'ah) pada umumnya tentunya akan mempengaruhi dan menentukan organisasi akuntansi yang akan digunakan.³⁴ Hal ini muncul karena karakteristik masyarakat Islam menuntut aspek-aspek yang berbeda dengan apa yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat kapitalis. Hal ini berarti pula bahwa akuntansi yang berlaku dalam sistem lembaga keuangan syariah jelas berbeda dengan sistem akuntansi yang berlaku dalam sistem lembaga keuangan konvensional.

Sebagaimana dikemukakan diatas, tujuan informasi akuntansi dalam lembaga keuangan syari'ah muncul karena pada hakekatnya transaksi-transaksinya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Sehingga pengguna informasi akuntansi pada LKS adalah berbeda dengan pengguna informasi akuntansi di lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu LKS perlu atau butuh sistem akuntansi yang berbeda dari akuntansi konvensional, yaitu sistem akuntansi yang mengacu pada nilai-nilai Islam.

³⁴ Muhamad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005) hal. 190-192.

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59

a. Tinjauan Umum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59

Laporan keuangan dikatakan memiliki kualitas tinggi apabila memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan yaitu mudah dipahami, andal, relevan, dan dapat diperbandingkan. Apabila suatu usaha yang berkepentingan dengan orang banyak mencatat dan melaporkan data keuangan seperti keinginannya sendiri, maka perbandingan diantara usaha yang sejenis akan sulit, bahkan tidak mungkin. Oleh karena itu, akuntan keuangan seharusnya mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku umum (*generally accepted accounting principles* – GAAP) dalam membuat laporan. Laporan-laporan tersebut memungkinkan investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk membandingkan usaha yang satu dengan yang lainnya.³⁵

Oleh karena itu, dalam dunia usaha diperlukan praktik akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum,³⁶ sementara diluar itu bisa saja tanpa standar. Di Indonesia, hukum yang mengatur bagaimana mengukur/menilai mengolah dan mengkomunikasikan informasi akuntansi terdapat di dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan), yang berisi tentang prinsip akuntansi yang berlaku umum.³⁷ Prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak hanya berisi tentang prinsip tetapi juga tentang konsep dan metode yang menunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk

³⁵ Carl S. Warren, *Accounting*, hal. 16.

³⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 14.

³⁷ Charles T. Homgren, *Accounting*, hal. 7

menghasilkan informasi akuntansi. SAK dibuat berdasarkan kerangka pemikiran konseptual oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia dari IAI, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat khusus digunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Kinerja suatu perusahaan dan lembaga keuangan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya, dan laporan keuangan (*Financial Statement*) merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajemen atas sumber daya pemilik. Untuk bisa mencapai kepada laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan harus melewati proses yang bertanggungjawab pula. Proses itu harus mengacu pada standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan jenis operasinya masing-masing.

Berkaitan dengan standar, Edey seperti yang dikutip Muhammad menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam standar bertujuan untuk:³⁸

1. Mengharuskan akuntan untuk menginformasikan apa yang dilakukan dengan mengungkapkan metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan.
2. Mendorong tercapainya keseragaman (*uniformity*) penyajian laporan keuangan.
3. Mendorong diungkapkannya hal-hal spesifik yang pengguna informasi mungkin memerlukannya untuk pengambilan keputusan.
4. Mensyaratkan diungkapkannya keputusan eksplisit dan implisit tentang penilaian asset yang disetujui dan tentang penentuan pendapatan.

³⁸ Edey dalam Muhamad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah* Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal.201.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan hasil garapan Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia, yang mana PSAK No. 59 adalah pernyataan yang telah berhasil disusun pada urutan ke 59 yaitu tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

PSAK No. 59 telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 1 Mei 2002³⁹ berdasarkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia,⁴⁰ dan berlaku efektif mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003.⁴¹

Dari sudut pandang perkembangan perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah, dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah tersebut, dapat diharapkan sebagai instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam menabung dan berbisnis dengan bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah. Sementara itu jika dilihat dari iklim bisnis masyarakat Indonesia yang masih rendah tingkat integrasinya dengan nilai-nilai Islam, PSAK No. 59 dapat diharapkan sebagai ujung tombak baik dalam proses pengembangan bisnis yang islami maupun dalam pengembangan ilmu bisnis yang peduli pada moralitas, spirit agama, dan kepedulian sosial.

³⁹ Lihat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 59 Ikatan Akuntan Indonesia, Cet. I, Mei 2002., paragraf 201.

⁴⁰ *Ibid*, hal. iv.

⁴¹ *Ibid*, hal. ii.

Dalam penyusunan PSAK 59, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merujuk metode yang digunakan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yang bermarkas di Bahrain, yaitu AASIFI (*Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution*). Hal ini dilakukan mengingat semakin mendesaknya kebutuhan akan standar akuntansi untuk perbankan syari'ah di Indonesia.

PSAK 59 tidak hanya menyediakan informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ekonomi tetapi juga informasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah. Hal ini merupakan cerminan karakteristik lembaga keuangan syari'ah. Laporan keuangan akuntansi syari'ah praksis juga ditujukan untuk pemakai yang sama dengan pemakai laporan keuangan akuntansi konvensional dengan tambahan untuk investor dana terikat, pembayar zakat, infaq, dan shadaqah serta Dewan Pengawas Syari'ah.

PSAK 59 berisi tentang pengakuan, pengukuran dan karakteristik produk-produk bank syari'ah seperti *mudārabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Wadiah*, *Qardh*, *Sharf*, serta pengakuan dan pengukuran zakat. Selain itu PSAK 59 juga berisi tentang penyajian komponen-komponen Laporan Keuangan Bank Syari'ah dan juga pengungkapan umum Laporan Keuangan.

PSAK No. 59 terdiri atas 201 paragraf yang terdiri dari: Pendahuluan (paragraf 001 sampai 005), Pengakuan dan Pengukuran (paragraf 006 sampai 151), Penyajian (paragraf 152 sampai 182), Pengungkapan (Paragraf 183-200), serta paragraf 201 mengungkapkan tentang tanggal efektif pemberlakuan PSAK No. 59.

Selain itu di bagian akhir PSAK No. 59 memuat lampiran yaitu, lampiran ke-1 mengenai daftar fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang dijadikan pedoman dalam penyusunan PSAK No. 59. Sedangkan lampiran ke-2 berisi tentang Daftar Istilah yang dipakai pada PSAK No. 59.

Namun demikian, selain apa yang telah diuraikan diatas perlu diketahui pula bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, tidak hanya cukup hanya dengan mendasarkan pada satu PSAK No. 59 saja. Tetapi pelaporan keuangan tersebut harus pula mengikuti berbagai ketentuan yang ada dalam PSAK terkait lainnya dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam rangka mempermudah penerapan berbagai ketentuan akuntansi tersebut di atas ke dalam praktik, diperlukan adanya suatu pedoman akuntansi yang lebih rinci dan telah mengkodifikasikan berbagai ketentuan akuntansi tersebut.⁴²

Untuk perbankan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, pada Juli 2003 telah diterbitkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI). Ada tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk menyusun PAPSI yang khusus diperuntukkan bagi perbankan syari'ah. Pertama, perbankan syari'ah telah berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah industri yang memiliki prospek masa depan yang cerah. Kedua, perbankan syari'ah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, baik dari tinjauan aspek operasional maupun produk. Ketiga, ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tidak seluruhnya sejalan dengan prinsip-

⁴² Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (IAI), *Pedoman*, hal. v.

prinsip syari'ah dan mengakomodasi kebutuhan operasional bank syari'ah, meskipun untuk transaksi-transaksi yang bersifat umum masih dapat diberlakukan.⁴³

Dengan adanya pedoman ini menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding antara laporan keuangan perbankan syari'ah. Pedoman ini merupakan acuan minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan syari'ah dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam pedoman ini tidak menghalangi masing-masing bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai dengan kondisi masing-masing bank.⁴⁴

b. Tujuan dan Ruang Lingkup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59

Seperti yang tertuang dalam paragraf pertama, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syari'ah.⁴⁵

Sedangkan ruang lingkupnya (paragraf 2 sampai 5) adalah, pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syari'ah, bank perkreditan rakyat syari'ah, dan kantor cabang syari'ah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. ⁴⁶ Hal-hal umum

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* hal. 1.3

⁴⁵ *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*, paragraf 1.

⁴⁶ *Ibid.*, paragraf 2.

yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁴⁷

Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (*statutory*) pemerintah, lembaga pengawas independen, dan bank sentral (Bank Indonesia).⁴⁸ Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut.⁴⁹

c. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Penghimpunan Dana Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Akuntansi Perbankan Syari'ah

Sebagaimana dijelaskan diatas, produk *funding* (penghimpunan dana) pada BMT terdiri atas tabungan mudārabah dan titipan *wadi'ah*. Berikut ini akan diuraikan pengakuan dan pengukuran produk *mudārabah* dan *wadi'ah* tersebut.

1). Pengakuan dan Pengukuran *Mudārabah*

a). Karakteristik

Mudārabah adalah akad kerjasama usaha antara *sāhibul al-māl* (pemilik dana) dan *mudārib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka.

⁴⁷ *Ibid*, paragraf 3.

⁴⁸ *Ibid*, paragraf 4.

⁴⁹ *Ibid*, paragraf 5. Paragraf ini merupakan paragraf penjelasan yang memiliki kaitan dengan paragraf standar.

⁵⁰ Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.⁵¹ *Mudārabah* terdiri atas dua jenis, yaitu *mudārabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudārabah muqayyadah* (investasi terikat).⁵² *Mudārabah muthlaqah* adalah *mudārabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.⁵³ *Mudārabah muqayyadah* adalah *mudārabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.⁵⁴ Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:

- (1) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
- (2) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
- (3) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana.⁵⁵ Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudārabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:

⁵⁰ *Ibid*, paragraf 6.

⁵¹ *Ibid*, paragraf 7.

⁵² *Ibid*, paragraf 8.

⁵³ *Ibid*, paragraf 9.

⁵⁴ *Ibid*, paragraf 10.

⁵⁵ *Ibid*, paragraf 11.

- (1) dalam *mudārabah* muqayyadah disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau
- (2) dalam *mudārabah* mutlaqah disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

Pengembalian pembiayaan *mudārabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya *mudārabah*.⁵⁶ Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudārabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.⁵⁷

b) Bank (BMT) sebagai Mudārib

Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek yang diteliti adalah produk *funding*, maka kedudukan BMT adalah sebagai pihak yang mengelola dana (*mudārib*). Pengakuan dan pengukuran transaksi apabila BMT sebagai *mudārib* adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima.⁵⁸ Pada akhir periode akuntansi, investasi

⁵⁶ *Ibid*, paragraf 12.

⁵⁷ *Ibid*, paragraf 13.

⁵⁸ *Ibid*, paragraf 29.

tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat. Sedangkan bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.⁵⁹

Bagi hasil *mudārabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*).⁶⁰ Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudārabah*. Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudārabah*. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana).⁶¹

Contoh:

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	<i>Revenue Sharing</i>
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Profit Sharing</i>
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	

2) Pengakuan dan Pengukuran *Wadiah*

a) Karakteristik

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki, dan bank bertanggung jawab atas

⁵⁹ *Ibid*, paragraf 30.

⁶⁰ *Ibid*, paragraf 31 dan 25.

⁶¹ *Ibid*, paragraf 32.

pengembalian titipan.⁶² *Wadiah* dibagi atas *wadiah yad-damanah* dan *wadiah yad-amanah*.⁶³

Wadiah yad-damanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip *wadiah yad-amanah*, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

Penerima titipan dalam transaksi *wadiah* dapat:⁶⁴

- (1) meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut; dan
- (2) memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad-damanah*) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

b) Pengakuan dan Pengukuran Dana *Wadiah*

Dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.⁶⁵

Pengakuan bonus dalam transaksi *wadiah* adalah sebagai berikut:⁶⁶

- (1) pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya;

⁶² *Ibid*, paragraf 134.

⁶³ *Ibid*, paragraf 135.

⁶⁴ *Ibid*, paragraf 136.

⁶⁵ *Ibid*, paragraf 137.

⁶⁶ *Ibid*, paragraf 138.

- (2) penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima.
- (3) penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; dan
- (4) penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-syariah diakui sebagai pendapatan dana qardhul hasan pada saat kas diterima.

5. Pemahaman

a. Proses Menuju Pemahaman

Aspek psikologis siswa yang terpenting adalah aspek kognitif (kejiwaan). Istilah "*cognitive*" berasal dari kata *cognition* yang padanannya *knowing* berarti mengetahui. Menurut Neisser (1976) seperti dikutip Syah, dalam arti yang luas, kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai satu domain atau wilayah/ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan.⁶⁷

Aspek kognitif yang berkedudukan di otak ini adalah sumber sekaligus pengendali aspek-aspek kejiwaan lainnya, yakni aspek afektif (rasa) dan aspek psikomotor (karsa). Tanpa aspek kognitif yang memadai, maka seorang siswa akan

⁶⁷ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Ed. Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 66.

kesulitan untuk berpikir yang mendalam. Selanjutnya, tanpa kemampuan berpikir mustahil ia dapat memahami dan meyakini faidah materi-materi pelajaran yang disajikan kepadanya.⁶⁸

Menurut Jarolimek dan Foster (1981,148) yang dikutip Dimiyati dan Mudjiono, menyatakan bahwa tujuan ranah kognitif berhubungan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi, serta pengembangan keterampilan intelektual.⁶⁹ Sedangkan taksonomi atau penggolongan tujuan ranah kognitif oleh Bloom, mengemukakan adanya 6 (enam) kelas/tingkat yaitu:

1. Pengetahuan, merupakan tingkat terendah ranah kognitif berupa pengenalan dan pengingatan kembali terhadap pengetahuan tentang fakta, istilah dan prinsip-prinsip.⁷⁰ Dalam pengenalan, siswa diminta untuk memilih salah satu dari dua atau lebih pilihan jawaban. Sedangkan untuk pengingatan kembali siswa diminta untuk mengingat kembali satu atau lebih fakta yang sederhana.⁷¹
2. Pemahaman, merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif berupa kemampuan memahami/mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu menghubungkannya dengan isi pelajaran lainnya.⁷² Dalam pemahaman, siswa

⁶⁸ *Ibid*, hal. 83-84.

⁶⁹ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 202.

⁷⁰ Ivor K. Davies *Pengelolaan Belajar*, dalam Dimiyati dan Mudjiono. Hal. 202.

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 113.

⁷² Ivor K. Davies *Pengelolaan*, hal 202

diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep.⁷³

3. Penggunaan/Penerapan, merupakan kemampuan menggunakan generalisasi atau abstraksi lainnya yang sesuai dalam situasi konkret dan/atau situasi baru.⁷⁴ Untuk penggunaan/penerapan, siswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih generalisasi/abstraksi tertentu (konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, cara) secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan menerapkannya secara benar.⁷⁵
4. Analisis, merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran ke bagian-bagian yang menjadi unsur pokok. Untuk analisis ini, siswa diminta untuk menganalisis hubungan atau situasi yang kompleks atau konsep-konsep dasar.⁷⁶
5. Sintesis, merupakan kemampuan menggabungkan unsur-unsur pokok ke dalam struktur yang baru.⁷⁷ Dalam sintesis ini siswa diminta untuk melakukan generalisasi.⁷⁸

⁷³ Suharsimi. *Dasar-dasar.*, hal. 113.

⁷⁴ Ivor K. Davies *Pengelolaan.*, hal 202.

⁷⁵ Suharsimi. *Dasar-dasar.*, hal 114.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Ivor K. Davies *Pengelolaan.*, hal. 202.

⁷⁸ Suharsimi. *Dasar-dasar.*, hal 115.

6. Evaluasi, merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk suatu maksud atau tujuan tertentu.⁷⁹ Dalam evaluasi, siswa diminta untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai suatu kasus.⁸⁰

Menurut Makmun, sesuai dengan penggolongan perilaku menurut Bloom, pemahaman merupakan salah satu jenis hasil belajar dalam *term* kawasan kognitif.⁸¹ Indikator dari pemahaman ini adalah dapat menjelaskan atau mendefinisikan dengan kata-kata sendiri, dan kemungkinan alat/instrumen pengukurannya adalah dengan menggunakan pertanyaan/soalan/tes/tugas. Untuk mengungkapkan aspek kognitif untuk tingkat pemahaman sampai aplikasinya, tes objektif akan lebih ampuh.⁸²

Mengulang apa yang sudah disebutkan pada Bab I, pemahaman berasal dari akar kata paham. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁸³, “*paham*” berarti pengertian; pendapat/pikiran; aliran, haluan, pandangan; mengerti benar (akan); tahu benar (akan); pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). “*Memahami*” berarti mengerti benar (akan); mengetahui benar; memaklumi/mengetahui. Sedangkan “*pemahaman*” berarti: proses perbuatan; cara memahami atau memahamkan.

⁷⁹ Ivor K. Davies *Pengelolaan*. hal. 202..

⁸⁰ Suharsimi. *Dasar-dasar*., hal 115.

⁸¹ Abin Syamsuddin Makmun, *Psikologi Pendidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 167.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 2 Cet. 9, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

Dari definisi diatas dapat dimaklumi bahwa untuk menuju kepada suatu pemahaman, seseorang membutuhkan adanya proses yang berawal dari informasi-informasi yang diterima dan kemudian diolah sehingga diperoleh hasil. Proses tersebut adalah proses belajar, dan pemahaman merupakan hasil belajar.

Proses adalah kata yang berasal dari bahasa Latin "*processus*" yang berarti "*berjalan ke depan*". Kata ini mempunyai konotasi urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan. Menurut Chaplin (1972) seperti dikutip oleh Syah, proses adalah *Any change in any object or organism, particularly a behavioral or psychological change*. (Proses adalah suatu perubahan yang menyangkut tingkah laku atau kejiwaan).⁸⁴

Dalam psikologi belajar, proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu (Reber, 1988). Jadi, proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya.

Pemahaman merupakan hasil dari aktifitas yang berproses, jadi di dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Perubahan-perubahan tersebut timbul melalui fase-fase yang antara satu dengan lainnya bertalian secara berurutan dan fungsional.

⁸⁴ *Ibid.* hal. 113.

Menurut Jerome S. Bruner seperti yang dikutip Nasution menyatakan bahwa dalam proses untuk memperoleh pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga fase atau episode, yakni:⁸⁵

1. Informasi. Setiap informasi yang diperoleh seseorang, ada yang menambah pengetahuan yang telah dimiliki, ada yang memperhalus dan memperdalamnya, adapula informasi yang bertentangan dengan apa yang telah diketahui.
2. Transformasi. Informasi-informasi yang sampai kepada seseorang tersebut harus dianalisis, diubah atau di transformasi ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas.
3. Evaluasi. Kemudian dinilai sampai manakah pengetahuan yang diperoleh dan transformasi itu dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala lain atau memecahkan masalah yang dihadapi.

Sedangkan menurut Wittig (1981) dalam bukunya *Psychology of Learning* seperti dikutip Syah, mengatakan bahwa setiap proses untuk memperoleh pemahaman selalu berlangsung dalam tiga tahapan, yaitu:

1. *Acquisition* (Tahap perolehan/penerimaan informasi)

Pada tahap ini seorang siswa mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respons terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru. Pada tahap ini terjadi pula asimilasi antara pemahaman dengan perilaku

⁸⁵ S. Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal 9. Lihat juga Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Ed. Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 113-114.

baru dalam keseluruhan perilakunya. Proses *acquisition* merupakan tahapan yang paling mendasar. Kegagalan pada tahap ini akan mengakibatkan kegagalan pada tahap-tahap berikutnya.

2. *Storage* (Tahap penyimpanan informasi)

Pada tahap ini seseorang secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan pemahaman dan perilaku baru yang diperoleh ketika menjalani proses *acquisition*.

Peristiwa ini udah tentu melibatkan fungsi *short-term* dan *long term* memori.

3. *Retrieval* (Tahap mendapatkan kembali informasi)

Pada tahap ini seseorang akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memorinya, misalnya ketika menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah.

Proses *retrieval* pada dasarnya adalah upaya atau peristiwa mental dalam mengungkapkan dan memproduksi kembali apa-apa yang tersimpan dalam memori berupa informasi, simbol, pemahaman, dan perilaku tertentu sebagai respons atas stimulus yang sedang dihadapi.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Karena pemahaman merupakan hasil dari aktifitas belajar, maka faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut tidaklah jauh berbeda dengan faktor-faktor yang mempengaruhi aktifitas belajar seseorang tersebut. Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang dapat dibedakan menjadi tiga macam.⁸⁶

1. **Faktor internal** (faktor dari dalam), yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani.

⁸⁶ Muhibbin Syah, *Psikologi*, hal. 132-139.

a). Aspek Fisiologis

Aspek fisiologis meliputi kondisi umum jasmani dan *tonus* (tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, sehingga dapat mempengaruhi semangat dan intensitas seseorang dalam menangkap materi pelajaran.

Usia seseorang yang tergolong lanjut ataupun yang terlalu dini untuk mengikuti suatu materi pembelajaran dapat mengurangi kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak berbekas.

Selain itu semakin meningkatnya usia seseorang, kemampuan mendengarkannya semakin berkurang. Pada usia sekitar 20-an tahun seseorang dapat mendengarkan dari sumber suara antara 8 sampai 10 meter. Setelah menginjak usia 40 –an tahun ia hanya dapat mendengarkan dari jarak sekitar 5 meter.⁸⁷

Sebagaimana kemampuan mendengarkan, semakin meningkat usia seseorang kemampuan melihatnya semakin berkurang. Bila diukur dengan kekuatan cahaya, maka untuk usia sekitar 20 tahun ruangan memerlukan cahaya hanya sekitar 40 watt, dan untuk usia 40 tahun sekitar 60 sampai 100 watt. Apabila kurang dari kapasitas tersebut, maka penglihatannya akan terganggu.⁸⁸

Hal ini juga berlaku pada kondisi fisik seseorang, dimana semakin lanjut usianya maka kondisi fisiknya akan mengalami penurunan sehingga kemampuan kognitifnya juga akan mengalami penurunan.

⁸⁷ Rosjidan, dkk, *Belajar dan Pembelajaran*, (Malang: FIP Universitas Negeri Malang, 2001), hal. 10.

⁸⁸ *Ibid.*

b). Aspek Psikologis

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi dan kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran seseorang. Namun diantara faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial adalah: tingkat kecerdasan/intelegensi; sikap; bakat; minat; dan motivasi.

Atas landas usia, daya kecerdasan seseorang akan meningkat terus sampai usia 20 tahun dan mencapai titik optimal antara 20 sampai 30 tahun. Usia 30 sampai 60 tahun akan mengalami penurunan dan akan menurun tajam setelah usia 60 tahun.⁸⁹ Sejalan dengan ini, perbedaan akan ditemukan semakin tinggi antara siswa yang ber-IQ tinggi dan siswa yang ber-IQ rendah. Perbedaan yang sedikit pada usia muda akan menjadi tajam pada usia-usia selanjutnya.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang tergolong aspek psikologis adalah pendidikan dan minat (frekuensi) mengikuti pelatihan, seminar dan kegiatan-kegiatan semacamnya. Seseorang yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperlukan (latarbelakang pendidikannya tidak sesuai dengan materi pembelajaran), maka akan menimbulkan kesulitan dalam menangkap materi. Hal ini menyebabkan kualitas dan kuantitas penyerapan materi tidak seperti yang diharapkan. Hal ini juga akan terjadi bila ia tidak memiliki minat untuk mengembangkan penguasaan materinya.

2. Faktor Eksternal (faktor dari luar), yaitu kondisi lingkungan di sekitar siswa.

⁸⁹ *Ibid*, hal 12.

Faktor eksternal ini terdiri atas dua macam, yaitu:

a). Faktor Lingkungan Sosial

Bagi orang yang sudah bekerja, misalnya seorang karyawan BMT, lingkungan sosial kerja adalah orang-orang di tempat kerjanya tersebut seperti manajer, rekan-rekan kerja serta rekan-rekan seprofesi lainnya yang dapat mempengaruhi semangat kerjanya. Selanjutnya yang termasuk lingkungan sosial karyawan tersebut adalah masyarakat dan teman-teman bergaul diluar tempat kerjanya.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang tergolong faktor eksternal yang mempengaruhi pemahamannya adalah lamanya seorang praktisi bekerja di suatu BMT.

b). Faktor Lingkungan Non-sosial

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah gedung dan letaknya, rumah tempat tinggal dan letaknya, alat-alat belajar, waktu belajar.

3. Faktor Pendekatan Belajar (*approach to learning*)

Seperti disebutkan dalam definisi mengenai pemahaman diatas, selain menyebutkan bahwa pemahaman adalah hasil sebuah proses juga disebutkan bahwa pemahaman merupakan cara untuk memahami atau memahamkan.

Oleh karenanya faktor pendekatan belajar dan strategi atau kiat melaksanakan pendekatan serta metode belajar termasuk faktor-faktor yang turut menentukan tingkat pemahaman. Faktor pendekatan belajar merupakan jenis upaya belajar siswa

yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.

Menurut hasil penelitian Biggs (1991) seperti yang dikutip Syah, apabila hasil yang diinginkan adalah pemahaman materi, maka pendekatan *deep* (mendalam) biasa digunakan. Seseorang yang menggunakan pendekatan *deep*, biasanya mempelajari materi karena memang dia tertarik dan merasa membutuhkannya (intrinsik). Oleh karena itu gaya belajarnya serius dan berusaha memahami materi secara mendalam serta memikirkan cara mengaplikasikannya.

Dari apa yang disajikan diatas dapat digambarkan, bahwa proses terbentuknya struktur kognitif manusia dapat dipadankan dengan komputer memproses informasi. Bagaimana seseorang memasukkan informasi dan menggunakan bermacam informasi. Proses pikiran manusia begitu kompleks, untuk dipahami secara baik, psikologi kognitif memahaminya berdasar fungsi-fungsi komputer. Berdasar fungsi komputer, informasi yang berupa data, stimuli masalah serta perintah merupakan masukan (*input*) yang dimasukkan ke dalam pikiran. Setelah diproses (transformasi data menjadi bentuk baru, pemecahan masalah, perintah) diperoleh hasil yang merupakan keluaran (*output*). Hasil akhirnya adalah berupa hasil tercetak (*print out*) pada komputer atau pemahaman dan penerapannya oleh manusia.⁹⁰

⁹⁰ Rojidan, dkk. *Belajar*, hal. 90.

B. Kerangka Berpikir

Setiap muslim diatur oleh ketentuan syari'ah (hukum Islam) yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadis. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Al-Ghazali sebagaimana dikutip Triyuwono dan As'udi menyatakan bahwa tujuan syari'ah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kepercayaan, kehidupan, kecerdasan, keturunan dan kesejahteraan.⁹¹

Dalam penelitian ini kerangka berpikirnya beranjak dari fenomena menjamurnya lembaga keuangan syariah semacam BMT. Selanjutnya, dalam kasus ini BMT diasumsikan sebagai sebuah lembaga keuangan seperti halnya dengan bank, karena kegiatan jasa keuangan yang dilakukan BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya pada syariat Islam. Pada aspek ini, pemahaman praktisi BMT terhadap akuntansi yang sesuai syariat Islam sangat diperlukan. Karena hal itu akan berimbas dalam kebijakan dan juga teknik akuntansinya⁹².

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini belum ada aturan yang spesifik yang mengatur pemberlakuan PSAK 59 pada BMT. Oleh karenanya faktor pemahaman

⁹¹ Iwan Triyuwono dan Moh. As'udi, *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 25.

⁹² Kebijakan akuntansi berkaitan dengan dasar yang dipakai oleh BMT dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Didalamnya meliputi bagaimana suatu transaksi dicatat, dinilai jumlahnya, dan diakui oleh BMT.

praktisi BMT terhadap PSAK 59 sangat penting artinya menuju ke sistem akuntansi yang bertanggungjawab dan berkeadilan.

Pemahaman para praktisi BMT ini bisa jadi dipengaruhi oleh usia, lamanya bekerja di institusi BMT, latar belakang pendidikan, dan atau frekuensi mengikuti pelatihan-pelatihan. Usia seseorang akan mempengaruhi kemampuannya memahami sesuatu. Sebagai contoh, orang yang masih berumur 20 tahun dengan orang yang sudah berumur 40 tahun kemungkinan besar berbeda dalam memahami sesuatu.

Selain usia, lama seseorang bekerja juga mempengaruhi pemahaman suatu masalah. Orang yang sudah lama bekerja dalam bidang tertentu, tentunya akan mempunyai pemikiran dan pemahaman yang lebih baik.

Latar belakang pendidikan seseorang juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman. Seseorang yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syari'ah misalnya, tentunya mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang muamalah daripada yang berlatar belakang teknik. Namun, mengenai hal ini, penelitian dari Nofriza Yeni tentang pengaruh latar belakang pendidikan karyawan dengan perkembangan BMT menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan perkembangan BMT antara karyawan yang berlatar belakang pendidikan non ekonomi atau ekonomi konvensional dengan karyawan yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syari'ah.⁹³ Meski demikian, untuk mengetahui apakah latar

⁹³ Nofriza Yeni, *Pengaruh Perbedaan Latar Belakang Pendidikan Karyawan Terhadap Perkembangan BMT Jaringan Muamalat Center Indonesia Wilayah Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Agama Islam Jurusan Muamalat Konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004.

belakang pendidikan praktisi BMT berpengaruh terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK 59 perlu dilakukan suatu penelitian.

Selain apa yang telah dikemukakan diatas, faktor yang diduga ikut mempengaruhi pemahaman praktisi BMT terhadap pemahaman PSAK 59 adalah frekuensinya mengikuti pelatihan, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenisnya.

C. Hipotesis

Seperti yang dikemukakan dalam permasalahan kedua, penelitian ini dengan sengaja mengusahakan timbulnya variabel-variabel dan selanjutnya dicari hubungannya antara variabel itu. Hubungan yang paling dasar adalah hubungan antara dua variabel: variabel pengaruh (*independent variable*) dan variabel terpengaruh (*dependent variable*).⁹⁴ Usaha untuk mencari hubungan antara variabel sesungguhnya mempunyai tujuan akhir untuk melihat kaitan pengaruh antara variabel-variabel tersebut.

Dalam mengimplementasikan dan mempraktekkan PSAK No. 59 pada BMT sudah tentu tidak lepas dari pemahaman praktisi terhadap PSAK 59 itu sendiri. Ditambah lagi tidak adanya aturan yang spesifik mengatur pemberlakuan PSAK 59 pada BMT, tentunya hal ini memerlukan suatu pengetahuan, pemahaman dan kesadaran diri untuk menggunakannya dalam operasional BMT.

⁹⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (Ed). *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1989) Edisi Revisi, hal. 51.

Jadi sesuai dengan permasalahan yang ada dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: *“Ada hubungan antara usia, lama bekerja di BMT, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan terhadap pemahaman praktisi BMT pada PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah Pengakuan dan Pengukuran Produk Funding.”*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menemukan kebenaran ilmiah selayaknya dilakukan dengan menggunakan metode yang ilmiah. Oleh karenanya, pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang terkait dengan metode yang digunakan untuk menjalankan aktifitas penelitian yang meliputi: pendekatan penelitian; jenis penelitian; tahapan penelitian; lokasi; subyek penelitian; populasi; teknik pengambilan sampel (*sampling*); identifikasi variabel penelitian; teknik pengumpulan data; serta teknik analisa data.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Namun demikian, untuk mengungkapkan dan memperjelas antara konsep dan realita pendekatan kualitatif juga akan digunakan. Pendekatan ini juga bisa menjelaskan pandangan mereka mengenai persoalan akuntansi syari'ah di lembaga keuangan mikro syari'ah.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap BMT yang dijadikan sampel penelitian, sehingga dapat merepresentasikan dan mendeskripsikan

seluruh BMT yang ada di Yogyakarta. Penelitian lapangan ini juga diarahkan pada upaya mencari kecenderungan-kecenderungan umum yang berkaitan dengan teknik operasional akuntansi syariah (PSAK 59) pada BMT di Yogyakarta.

Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif, karena tujuan penelitian ini adalah berusaha memberi gambaran mengenai pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding*. Selain itu penelitian ini juga berusaha menggambarkan atau menunjukkan adanya perhubungan (korelasi) antara variabel-variabel atau memberi gambaran sejauh mana dua atau lebih variabel kuantitatif berhubungan yang ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi.¹

C. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, setidaknya ada tiga tahapan yang dilalui, yaitu:²

1. Tahap Pra-lapangan

Pada tahap ini penulis melakukan penelaahan pustaka berbagai buku, jurnal, makalah, artikel-artikel di *web site* mengenai akuntansi syaria'h, khususnya mengenai BMT dan standar akuntansinya. Selain itu penulis juga menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan penelitian yang dilakukan penulis. Setelah itu, penulis mulai menyusun rancangan dan prosedur penelitian termasuk menentukan lokasi penelitian.

¹ Soehardi Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999), hal. 99.

² Robert C. Bogdan dalam Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 11 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) hal. 85.

2. Tahap Kegiatan Lapangan

Tahap ini dimaksudkan untuk pencarian kasus (data empirik) yang dapat memberikan jawaban terhadap tahapan pertama (pra lapangan) yaitu dengan membagikan angket, melakukan observasi serta wawancara. Adapun data yang digali adalah data-data yang berkaitan pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 59.

3. Analisis Intensif

Pada tahap ini penulis melakukan kajian data empirik hasil penelitian lapangan untuk dideskripsikan dan dianalisis.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah penelitian berdasarkan pemikiran bahwa daerah Yogyakarta sebagai kota pelajar diharapkan mempunyai praktisi BMT yang mempunyai pemahaman dan wawasan luas serta mempunyai intelegensia yang cukup.

E. Subyek Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh.³ Karena dalam penelitian ini digunakan kuesioner serta wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. III, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 102.

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Selanjutnya, yang dimaksud responden dalam penelitian ini adalah praktisi BMT yang terdiri dari manajer BMT dan staf pelaksana akuntansinya. Jadi, untuk satu BMT yang terpilih menjadi sampel akan disebarkan dua kuesioner yang akan diisi oleh manajer dan staf pelaksana akuntansinya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi. Sehingga sumber datanya bisa berupa standar akuntansi, program akuntansi (*software*) atau proses akuntansinya

F. Populasi

Dalam penelitian ini populasinya adalah BMT yang menjadi anggota PUSKOPSYAH di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data PUSKOPSYAH, hingga 31 Agustus 2006 jumlah anggota Puskopsyah BMT Mitra Nugraha tercatat sebanyak 82 BMT yang tersebar di 5 subpopulasi kabupaten/kota, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Jumlah BMT Anggota Puskopsyah DIY Pada Tiap Subpopulasi

No	Subpopulasi	Jumlah BMT
1.	Kabupaten Sleman	34
2.	Kota Yogyakarta	19
3.	Kabupaten Bantul	13
4.	Kabupaten Kulon Progo	10
5.	Kabupaten Gunung Kidul	6
	Jumlah	82

Sumber: Puskopsyah BMT Mitra Nugraha DIY per 31 Agustus 2006.

Dari 82 BMT tersebut, tercatat dua BMT sudah tidak aktif lagi yaitu 1 BMT di Kota Yogyakarta dan 1 BMT di Kabupaten Sleman. Sehingga BMT yang masih aktif adalah 80 BMT. Adapun daftar nama dan alamat BMT yang menjadi anggota PUSKOPSYAH untuk masing-masing daerah tersebut dapat dilihat pada lampiran.

G. Teknik Pengambilan Sampel (*Sampling*)

Penelitian ini bukan merupakan penelitian populasi. Dari 80 populasi BMT anggota Puskopsyah DIY akan diambil 30%-nya sebagai sampel. Untuk itu dibutuhkan teknik pengambilan sampel (*sampling*) yang dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel harus representatif.⁴

Menurut Gay seperti yang dikutip Husein Umar,⁵ menyatakan bahwa ukuran minimum sampel yang dapat diterima didasarkan pada desain/metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian yang menggunakan desain deskriptif, minimal 10% dari populasi. Untuk populasi yang relatif kecil minimal 20%. Jadi, karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka sampel yang akan diambil adalah 30% dari 80 populasi BMT yang menjadi anggota PUSKOPSYAH di DIY yang masih aktif, yaitu 24 BMT.

Karena jumlah elemen tiap subpopulasi tidak sama, maka untuk menghitung berapa jumlah sampel yang diambil untuk masing-masing subpopulasi harus sebanding dengan jumlah subpopulasinya.⁶ Jadi, teknik pengambilan sampel yang

⁴ *Ibid.* hal. 106.

⁵ Husein Umar, *Riset Akuntansi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998) hal. 70.

⁶ *Ibid.* hal. 78.

digunakan adalah *proportional sampling*. Dengan kata lain untuk memperoleh sampel yang representatif, pengambilan subyek dari setiap strata atau setiap wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subyek dalam masing-masing strata atau wilayah (harus proporsional).⁷ Sehingga perlu dicari faktor pembanding dari tiap sub populasinya yang disebut *sample fraction (f)*,⁸ yang dilakukan dengan cara membandingkan jumlah elemen tiap subpopulasi dengan jumlah seluruh elemen populasi sehingga didapat masing-masing *sample fraction*-nya.

Menurut data PUSKOPSYAH, jumlah BMT yang masih aktif yang ada di masing-masing subpopulasi adalah: Kabupaten Sleman 33 BMT, Kota Yogyakarta 18 BMT, Kabupaten Bantul 13 BMT, Kabupaten Kulon Progo 10 BMT, dan Kabupaten Gunung Kidul 6 BMT. Dari data tersebut, diperoleh *sample fraction* untuk masing-masing subpopulasi sebagai berikut:

Tabel 3.2 *Sample Fraction* dan Jumlah Sampel Pada Tiap Subpopulasi

No	Subpopulasi	Jumlah BMT	<i>Sample Fraction</i>	Jumlah BMT Yang Diambil Sebagai Sampel (30% $\times$ 80=24)
1.	Sleman	33	$33/80 \times 100\% = 41,25\%$	$41,25\% \times 24 \approx 10$
2.	Kota Yogyakarta	18	$18/80 \times 100\% = 22,50\%$	$22,50\% \times 24 \approx 5$
3.	Bantul	13	$13/80 \times 100\% = 16,25\%$	$16,25\% \times 24 \approx 4$
4.	Kulon Progo	10	$10/80 \times 100\% = 12,50\%$	$12,50\% \times 24 \approx 3$
5.	Gunung Kidul	6	$6/80 \times 100\% = 7,50\%$	$7,50\% \times 24 \approx 2$
	Jumlah	80	100%	24

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Edisi Revisi III, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 112.

⁸ Husein Umar, *Riset.*, hal. 78.

Dari tabel tersebut dapat diketahui, bahwa jumlah sampel yang diambil untuk masing-masing subpopulasi sebanding dengan jumlah BMT yang ada. Untuk daerah Sleman, dengan jumlah BMT 33, diperoleh *sample fraction* 41,25%. Sehingga dari 24 BMT di DIY yang akan dijadikan sampel penelitian, untuk daerah Sleman akan diambil 41,25% nya, yaitu sekitar 10 BMT. Hal tersebut juga berlaku untuk daerah-daerah lainnya.

Kemudian, untuk menentukan BMT mana saja yang akan digunakan sebagai sampel pada tiap-tiap subpopulasi digunakan *simple random sampling*. Dalam hal ini sampelnya adalah BMT yang dipilih secara acak sederhana dan dianggap cukup mewakili BMT-BMT yang ada di subpopulasi masing-masing. Sebagai contoh, untuk subpopulasi Sleman dengan 33 BMT, akan diambil 10 BMT sebagai sampel. Untuk menentukan ke-10 BMT yang akan dijadikan sampel tersebut digunakan teknik pengambilan sampel random. Jadi, peneliti memberi hak yang sama kepada setiap BMT untuk memperoleh kesempatan (*chance*) dipilih menjadi sampel, atau dengan kata lain semua subyek di dalam subpopulasi dianggap sama.⁹

Selanjutnya, untuk menentukan siapa saja responden yang dipilih untuk mengisi angket/kuesioner digunakan *purposive sampling*. Jadi, dalam penelitian ini responden ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.¹⁰ Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa tidak semua praktisi BMT mempunyai kaitan langsung dengan pemahamannya terhadap PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah. Oleh karena

⁹ Suharsimi, *Prosedur*. hal. 107.

¹⁰ Sanapiah Faisal, *Format-format*., hal. 67.

itu, praktisi BMT yang dipilih menjadi responden ditetapkan dengan sengaja yaitu manajer BMT dan staf pelaksana akuntansinya. Jadi, karena BMT yang diambil sebagai sampel adalah 24 BMT, maka respondennya menjadi berjumlah 48 responden.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jumlah BMT yang dijadikan sampel tiap subpopulasi dan jumlah respondennya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Jumlah Sampel BMT Dan Jumlah Responden Pada Tiap Subpopulasi

No	Subpopulasi	Jumlah BMT	Jumlah BMT Yang Diambil Sebagai Sampel	Jumlah Responden (Kuesioner)
1.	Sleman	33	10	20
2.	Kota Yogyakarta	18	5	10
3.	Bantul	13	4	8
4.	Kulon Progo	10	3	6
5.	Gunung Kidul	6	2	4
	Jumlah	80	24	48

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa, karena jumlah responden yang diambil dari masing-masing BMT adalah dua responden, maka jumlah kuesioner yang disebarkan adalah dua kali lipat dari jumlah BMT yang diambil sebagai sampel. Sehingga, dari 24 BMT dari seluruh subpopulasi yang diambil sebagai sampel, jumlah kuesinernya menjadi 48 buah.

H. Identifikasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel-variabel penelitian adalah:

1. Variabel Variabel Bebas (*Independent Variable*) yang diberi simbol X, terdiri dari:

- Usia, diberi simbol X_1
- Latar belakang pendidikan, diberi simbol X_2
- Lama bekerja di institusi BMT, diberi simbol X_3 , dan
- Frekuensi mengikuti pelatihan, seminar atau kegiatan yang semacamnya, diberi simbol X_4 .

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*) yang diberi simbol Y, yaitu pemahaman praktisi BMT pada PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding*.



I. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data primer maupun sekunder. Karena penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang mempunyai sifat deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket/kuesioner, observasi, dan wawancara.

Angket/kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.¹¹ Jadi alasan digunakannya angket dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik responden dan tingkat pemahaman responden. Karakteristik responden terdiri dari umur, lama bekerja di

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*. Edisi Revisi II, hal. 124.

BMT, latar belakang pendidikan dan frekuensinya mengikuti pelatihan. Sedangkan kemampuan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam angket akan memberikan informasi tentang tingkat pemahamannya. Kuesioner ini juga dimaksudkan guna mendapat gambaran mengenai kemungkinan penerapan PSAK 59 di BMT.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti. Alasan digunakannya teknik observasi, karena dalam penelitian ini penulis akan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu aktifitas akuntansi yang dilakukan oleh BMT di Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data yang juga akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*). Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan responden, yaitu untuk mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian. Penggunaan teknik ini dilakukan dengan cara tidak terstruktur, yaitu dengan menekankan pada dialog bebas tetapi tidak lari dari dari standar pertanyaan yang dibutuhkan.¹² Dialog diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi titik permasalahan juga terhadap informasi yang kurang jelas yang telah didapatkan. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, hal. 127.

yang terkait, seperti praktisi akuntansi BMT dan jajaran manajemennya untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

1. Pengembangan Instrumen Penelitian

Data yang dikumpulkan dengan kuesioner, dikembangkan atas landasan teoritik. Kuesioner disebarkan kepada responden pada masing-masing BMT yang terpilih sebagai sampel. Dalam hal ini responden adalah praktisi akuntansi dan manajer BMT.

Dalam kuesioner ini digunakan pertanyaan untuk variabel bebas (usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, frekuensi mengikuti pelatihan) dan variabel terikat (variabel pemahaman). Setiap jawaban akan diberi skor menurut skala interval. Pada kuesioner untuk skala usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan dan frekuensi mengikuti pelatihan, bagi responden yang menjawab/memilih jawaban A diberi skor satu, yang memilih jawaban B diberi skor dua, dan bagi yang memilih jawaban C akan diberi skor tiga, dan yang memilih jawaban D diberi skor dua empat. Sedangkan untuk variabel pemahaman, bagi responden yang menjawab/memilih jawaban A diberi skor tiga, yang memilih jawaban B diberi skor dua, dan bagi yang memilih jawaban C akan diberi skor satu. Karena angket ini bukan merupakan skala sikap, maka dari setiap butir pertanyaan yang diajukan pada skala pemahaman dapat diketahui jawaban-jawaban yang sesuai (benar) atau tidak benar.

Penyebaran butir pertanyaan dari angket pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding* ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Penyebaran Nomor Butir Angket Skala Pemahaman

No	Kisi-kisi	No. Pertanyaan	Jumlah Butir
1.	Tujuan Akuntansi	1	1
2.	Tujuan PSAK 59	2	1
3.	Sandar Akuntansi Yang Sesuai Untuk BMT	3	1
4.	Teori-teori <i>Wadiah</i>	4,5,6,7,8,9,10	7
5.	Kasus-kasus <i>Wadiah</i>	11,12,13,14	4
6.	Teori-teori <i>Mudārabah</i>	15,16,17,18,19,20,21	7
7.	Kasus-kasus <i>Mudārabah</i>	22,23,24,25,26	5
	Jumlah Butir		26

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Ketepatan pengujian suatu hipotesa tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam proses pengujian tersebut.¹³ Data penelitian yang di dalam proses pengumpulannya seringkali menuntut pembiayaan, waktu dan tenaga yang besar, tidak akan berguna bilamana alat pengukur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut tidak memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Pengujian hipotesa penelitian tidak akan mengenai sasarannya, bilamana data yang dipakai untuk menguji hipotesa adalah data yang tidak *reliable* dan tidak menggambarkan secara tepat konsep yang diukur.

¹³ *Ibid*, hal. 122.

Tanpa informasi mengenai alat pengumpul data yang dipakainya memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, maka pembaca laporan akan merasa kurang yakin apakah data yang dikumpulkan betul-betul menggambarkan fenomena yang ingin diukur. Karena itu agar supaya hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka informasi yang menyangkut validitas dan reliabilitas alat pengukur, haruslah disampaikan.¹⁴

Oleh karenanya, untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan dalam angket yang terkumpul dapat diolah lebih lanjut atau tidak, perlu dilakukan uji instrumen penelitian yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan dan kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya.¹⁵ Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Bila seseorang ingin mengukur berat sesuatu benda, maka dia harus menggunakan timbangan. Timbangan adalah alat pengukur yang valid bila dipakai untuk mengukur berat, karena timbangan memang mengukur berat.¹⁶ Sebagaimana juga dalam penelitian ini, karena yang akan diukur adalah tingkat pemahaman maka alat pengukur yang digunakan adalah angket yang berbentuk tes obyektif.

¹⁴ *Ibid*, hal. 123.

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (Ed), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal 124-140.

¹⁶ *Ibid*. hal. 122.

Karena data berbentuk interval maka untuk menguji hipotesa asosiatif/hubungan digunakan *Korelasi Product Moment*. Hasil teknik statistik tersebut dikenal sebagai koefisien korelasi (*correlation coefficients*) atau angka korelasi yang disimbolkan dengan *r*, yang menunjukkan suatu kesan umum tentang kedekatan hubungan-hubungan antar variabel.¹⁷ Rumus penghitungan *r product-moment* yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

dimana:

r_{xy} = Koefisien korelasi r

X = Skor dalam distribusi variabel X

Y = Skor dalam distribusi variabel Y

N = Banyaknya pasangan skor X dan skor Y (banyaknya subjek)

Dasar pengukuran valid tidaknya kuesioner adalah dengan melihat nilai dari *Corrected Butir-Total Correlation* (r_{hitung}) dan nilai dari *Correlation r Product Moment* (r_{tabel}). Jika nilai dari $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Sedangkan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir tersebut tidak valid dan tidak bisa digunakan lagi untuk analisa data selanjutnya.

¹⁷ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 224

Bila data diuji dengan menggunakan komputer program SPSS versi 13 (lihat lampiran), maka r_{hitung} dapat dilihat pada kolom *corrected item-total correlation*. Sedangkan untuk menentukan r_{tabel} , dengan signifikansi 5% dan tingkat kebebasan (df) untuk r pearson adalah $N-2 = 46$, maka diperoleh $r_{tabel} = 0,190$. (N = jumlah responden).

Jadi, berdasarkan hasil dari uji validitas tersebut (lihat lampiran) menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dapat diketahui bahwa semua butir angket tersebut valid dan dapat digunakan untuk proses selanjutnya.



b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran itu memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan pengukuran ulang pada subyek yang sama. Untuk pengujian ini digunakan dengan SPSS versi 13 atau rumus Alpha (α).

Rumus Alpha:

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum s_i^2}{s^2} \right)$$

dimana:

α = reliabilitas yang dicari

$\sum s_i^2$ = jumlah varians skor total

s_i^2 = varians responden untuk item ke- i ¹⁸

Untuk menentukan r_{tabel} , dengan taraf signifikansi 5% dan tingkat kebebasan (df) adalah $N-2=46$, maka diperoleh $r_{tabel} = 0.190$. Sedangkan r_{hitung} nya bila diolah dengan SPSS versi 13 diperoleh angka sebesar 0,9 (ditunjukkan dengan ALPHA, lihat lampiran). Jadi karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka semua butir reliabel.

J. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada dasarnya menunjuk pada bagaimana data yang akan dikumpulkan akan diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab masing-masing masalah dan hipotesis. Jadi setelah data terkumpul akan dilakukan analisa data yang meliputi beberapa tahap.

Tahap pertama, pengolahan data. Pengolahan data mencakup kegiatan mengedit (*editing*) data, dan mengkode (*coding*) data.¹⁹ Mengedit data yaitu kegiatan memeriksa data yang terkumpul yang meliputi kelengkapannya, kesempurnaan pengisiannya dan perlu tidaknya data dianalisis. Sedangkan mengkode data berarti memberikan kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari setiap

¹⁸ Husaini Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hal.291.

¹⁹ Sanapiyah Faisal, *Format-format*, hal.33.

variabel yang dikumpulkan datanya. Setelah semua data dikodekan, selanjutnya dipindahkan kedalam “*beberan*” rekapitulasi data.

Tahap kedua analisa data. Analisa data menunjuk pada mengorganisasikan data kedalam susunan-susunan tertentu dalam rangka menginterpretasikan data. Dalam penelitian ini analisa data meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial.²⁰ Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data dari angket yang telah terkumpul.dengan cara membuat tabel-tabel (tabulasi) serta perhitungan prosentase. Analisis ini digunakan untuk menjawab permasalahan pertama.

Sedangkan analisis statistik inferensial dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan dengan mengukur tingkat hubungan antara variabel-variabel. Studi korelasional dilakukan karena penelitian ini dengan sengaja mengusahakan timbulnya variabel-variabel dan selanjutnya dikontrol untuk dilihat pengaruhnya terhadap pemahamannya. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari jawaban responden kemudian dilakukan uji statistik. Uji statistik dalam analisis hubungan dimaksudkan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya hubungan antar variabel.²¹ Uji ini meliputi uji statistik koefisien korelasi yang disebut sebagai uji hubungan. Selain itu untuk mempermudah analisis, data akan diolah dan diperhitungkan dengan bantuan komputer dengan menggunakan program SPSS versi 13.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi 13 (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 169.

²¹ Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 79.

Dalam hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel, teknik statistik yang digunakan adalah koefisien korelasi berganda dan koefisien korelasi parsial.²² Sedangkan jenis uji statistik koefisien korelasi ganda adalah dengan menggunakan Uji F dan uji statistik koefisien korelasi parsial adalah dengan menggunakan Uji t.²³

Analisis Korelasi Ganda digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel bebas atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya (Y), sehingga akhirnya dapat diketahui besarnya sumbangan seluruh variabel bebas yang menjadi objek penelitian terhadap variabel terikatnya.²⁴ Hasil dari analisis ini adalah Koefisien Korelasi Ganda (R).

Uji statistik yang digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan adalah dengan menggunakan rumus F_o , yaitu:

$$F_o = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

dimana:

R = Koefisien korelasi berganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

Pada dasarnya uji F ini adalah pengujian terhadap R (r_{yy} , atau *coefficient of multiple correlation*).²⁵ Dengan kata lain uji F digunakan untuk pengujian signifikansi R. Kriteria untuk pengujian signifikansi F adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hasilnya

²² *Ibid*, hal. 66.

²³ *Ibid*, hal. 80.

²⁴ Husaini Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar*, hal.232-233.

²⁵ Sanapiah Faisal, *Format-format*, hal. 235-237.

signifikan. Untuk mendapatkan harga kritik F (dalam tabel) untuk tingkat kepercayaan (α) 5%, perlu dihitung derajat kebebasan (df) nya.²⁶ Dalam penelitian ini df nya adalah $(N-k-1) = 48-4-1=43$. Maka harga kritik F untuk df 43 dan tingkat kepercayaan 0.05 adalah 2.589. Dimana, N = jumlah responden, k = jumlah variabel bebas penelitian.

Analisa Korelasi Parsial digunakan untuk menemukan nilai korelasi murni yang terlepas dari pengaruh-pengaruh variabel lainnya.²⁷ Hasil dari analisis ini adalah koefisien korelasi parsial (r_p). Adapun interpretasi dari nilai r ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Interpretasi Dari Nilai r

r	Interpretasi
0	Tidak berkorelasi
0.01 – 0.20	Sangat rendah
0.21 – 0.40	Rendah
0.41 – 0.60	Agak rendah
0.61 – 0.80	Cukup
0.81 – 0.99	Tinggi
1	Sangat tinggi

Koefisien korelasi parsial adalah adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel jika variabel lainnya konstan pada hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel.²⁸ Kriteria pengujian

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Husaini Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar*, hal. 253.

²⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)* Edisi Kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 268.

signifikansi koefisien korelasi parsial adalah, jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka tidak signifikan.

Kemudian, untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan dua variabel antara variabel interval dengan variabel interval yang melibatkan hubungan lebih dari dua variabel dengan mengkonstantakan variabel yang tidak kita ukur, digunakan uji statistik koefisien korelasi parsial dengan menggunakan rumus t, yaitu:²⁹

$$t_0 = \frac{r_p \sqrt{n-m}}{\sqrt{1-r_p^2}}$$

dimana:

r_p = koefisien korelasi parsial

n = jumlah sampel

m = banyaknya variabel



Untuk mendapatkan harga kritik t (dalam tabel) untuk tingkat kepercayaan (α) 5%,) dan derajat kebebasan (df) $(n-m) = 48-5 = 43$ maka diperoleh harga kritik t_{tabel} sebesar 2.017.

Tahap Ketiga yaitu Interpretasi data, yang meliputi masing-masing masalah atau hipotesis penelitian maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti. Jadi hasil jawaban yang diperoleh dari responden tersebut di tambah dengan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan diinterpretasi dan dicermati dengan sudut pandang yang terkandung di dalamnya sendiri dan menghubungkannya dengan fokus penelitian untuk mendapatkan kesimpulan.

²⁹ Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian.*, hal. 100.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian¹

a. Sejarah Berdirinya PUSKOPSYAH BMT Mitra Nugraha

BMT Mitra Nugraha diinisiasi pendiriannya oleh BAZIS DIY bersama dengan Yayasan Amal Usaha Muslim Yogyakarta (YAUMY) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) DIY pada tanggal 1 April 1997. Kemudian pada tanggal 18 September 1998, sebanyak 17 BMT yang tergabung kedalam BMT Mitra Nugraha sepakat untuk membentuk lembaga sekunder yaitu Pusat Koperasi Syari'ah *Baitul Māl Wat Tanwīl* Mitra Nugraha yang selanjutnya disingkat menjadi PUSKOPSYAH BMT Mitra Nugraha. Pendirian BMT Mitra Nugraha ini dimaksudkan untuk mewadahi BMT-BMT di DIY dalam rangka menyatukan potensi perkembangan BMT di DIY, menyediakan kebutuhan likuiditas dengan melibatkan BMT lain yang lebih mapan, menyediakan dana untuk pembiayaan bagi BMT anggota melalui mekanisme kerjasama saling menguntungkan, serta memudahkan dalam pembinaan dan penyaluran dana ZIS dari BAZIS DIY.

¹ Sumber: PUSKOPSYAH BMT Mitra Nugraha Yogyakarta per 31 Agustus 2006.

Dalam perkembangannya, dimana pertumbuhan BMT di DIY merupakan potensi yang memang perlu segera dipadukan gerakannya, maka kepemilikan Badan Hukum bagi BMT Mitra Nugraha merupakan suatu keharusan. Maka pada tanggal 24 Mei 1999 PUSKOPSYAH BMT Mitra Nugraha resmi berbadan hukum dengan ketetapan Nomor 323 / BH / KWK-12 / V / 1999.

b. Lokasi

Pada tahap awal Kantor Puskopsyah BMT Mitra Nugraha bertempat di Gedung Mataram *Islamic Centre* Yogyakarta. Selanjutnya sejak tanggal 25 Juni 2003, Puskopsyah BMT Mitra Nugraha berkantor di Jl. Kebun Raya, Karangsari No. 286, Yogyakarta. Telp/fax (0274) 417122. (Sebelah timur Kebun Binatang Gembira Loka).

c. Visi, Misi dan Tujuan²

Visi PUSKOPSYAH BMT Mitra Nugraha adalah menjadi lembaga penyangga finansial bagi BMT dan memperkuat jaringan kerja antar BMT sekaligus pembinaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara amanah dan profesional.

Sedangkan misi PUSKOPSYAH BMT Mitra Nugraha adalah:

1. Menumbuhkan dan mengembangkan BMT beserta jaringan antar koperasi BMT anggota.
2. Bersama-sama dengan lembaga keuangan syari'ah lain dalam menerapkan konsep-konsep syari'ah dalam bidang ekonomi.

² *Ibid.*

2. Menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dengan pola pembentukan jaringan sebagai sistem pengembangan ekonomi yang berlandaskan Syariat Islam.

Kemudian yang menjadi tujuan dari PUSKOPSYAH BMT Mitra Nugraha adalah:

1. Meningkatkan kinerja BMT anggota, sehingga dapat berperan lebih luas dalam pemberdayaan umat.
2. Menghindarkan BMT dari terjadinya kekurangan likuiditas yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap BMT.
3. Memfasilitasi BMT anggota dalam kerjasama dengan lembaga lain.
4. Meningkatkan komunikasi dan silaturahmi antar anggota.

d. Wilayah Kerja dan Keanggotaan

Wilayah kerja Puskopsyah BMT Mitra Nugraha adalah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi 5 daerah tingkat II, yaitu: Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan untuk keanggotaan dari Puskopsyah BMT Mitra Nugraha dibagi dua jenis, yaitu:

1. Anggota Istimewa, yaitu lembaga yang telah menginisiasi pembentukan awal, yang terdiri dari BAZIS Propinsi DIY, PINBUK DIY, dan YAUMY.
2. Anggota Biasa. Anggota biasa terdiri dari BMT dan LKMS lain yang telah memenuhi syarat keanggotaan, yakni Simpanan Pokok Rp. 250.000, Simpanan

Wajib Rp. 15.000,- dan bersedia untuk menyetor Penyertaan Terbatas Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 10.000.000,- sesuai dengan kemampuan BMT.

Dalam bab sebelumnya sudah disebutkan bahwa, menurut data dari PUSKOPSYAH Mitra Nugraha Yogyakarta, per 31 Agustus 2006 jumlah anggota Puskopsyah BMT Mitra Nugraha tercatat sebanyak 82 BMT yang tersebar diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

- Kabupaten Sleman : 34 BMT
- Kota Yogyakarta : 19 BMT
- Kabupaten Bantul : 13 BMT
- Kabupaten Kulon Progo : 10 BMT
- Kabupaten Gunung Kidul : 6 BMT



Dari 82 BMT tersebut, tercatat dua BMT sudah tidak aktif lagi yaitu 1 BMT di Kota Yogyakarta dan 1 BMT di Kabupaten Sleman. Sehingga BMT yang masih aktif adalah 80 BMT.

e. Tingkat Pengembalian Kuesioner.

Dalam penelitian ini, dari 80 BMT anggota PUSKOPSYAH Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih aktif diambil sampel 30% nya, yaitu sebanyak 24 buah BMT. Jumlah kuesioner yang disebar yaitu sebanyak 48 bendel, yang dibagikan kepada manajer dan staf pembukuan BMT (jadi pada masing-masing BMT disebar dua bendel angket) yang keseluruhannya dapat diambil kembali.

Tabel dibawah ini menunjukkan secara ringkas mengenai jumlah BMT yang dijadikan sampel dan tingkat pengembalian kuesioner.

Tabel 4.1 Jumlah BMT Yang Dijadikan Sampel Dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Subpopulasi	Jumlah BMT Sampel	Jumlah Kuesioner	Tingkat Pengembalian Kuesioner	Prosentase
1.	Sleman	10	20	20	41,67%
2.	Kota Yogyakarta	5	10	10	20,83%
3.	Bantul	4	8	8	16,67%
4.	Kulon Progo	3	6	6	12,50%
5.	Gunung Kidul	2	4	4	8,33%
	Jumlah	24	48	48	100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 48 bendel angket yang disebar ke responden, jumlah angket yang dapat kembali juga 48 (seluruhnya dapat kembali). Sehingga tingkat pengembalian angket mencapai prosentase 100%.

Selanjutnya, berdasarkan data-data yang telah diperoleh melalui angket tersebut, ditambah dengan hasil observasi dan wawancara maka dapat dijabarkan lagi sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini.

2. Gambaran Praktek Akuntansi di BMT Anggota Puskopsyah dan Pandangan Praktisi BMT Terhadap PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara, secara umum para praktisi BMT sepakat akan perlunya standar akuntansi untuk BMT. Menurut mereka standar akuntansi sangat diperlukan bagi lembaga keuangan seperti BMT dengan berbagai alasan. Diantaranya, dengan standarisasi laporan keuangan akan mempermudah pelaporan keuangan dan seluruh kinerja BMT, mempermudah pengawasan, dan mempermudah analisis tingkat kesehatannya. Selain itu agar laporan keuangan yang dibuat BMT

lebih kredibel, maka dengan standarisasi laporan keuangan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan audit laporan keuangannya.

Selain itu, secara umum mereka juga menyadari bahwa produk-produk pada BMT pada dasarnya serupa dengan produk-produk bank syariah. Namun untuk pengimplementasian PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah pada BMT, kiranya masih diperlukan sosialisasi. Karena berdasarkan pada penelitian ini masih cukup banyak BMT yang belum menerapkannya. Berikut ini data hasil wawancara dengan wakil masing-masing BMT yang menjadi sampel penelitian mengenai tingkat penerapan PSAK No. 59 di BMT Anggota PUSKOPSYAH DIY.

Tabel 4.2 Tingkat Penerapan PSAK No. 59 di BMT Anggota PUSKOPSYAH DIY

Penerapan PSAK 59	Frekuensi	Prosentase
Sudah	12	25%
Belum	20	45%
Dalam Proses	16	30%
Jumlah	48	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel tersebut diketahui bahwa BMT yang belum menerapkan PSAK 59 mencapai 45%, sedangkan yang masih dalam proses mencapai 30%, dan yang sudah menerapkan PSAK 59 mencapai 25%.

Selanjutnya berdasar dari hasil wawancara yang lain yaitu mengenai pertanyaan sumber informasi dari mana mereka mengetahui PSAK 59, ternyata sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka mengetahui akan PSAK 59 dari berbagai pelatihan dan kegiatan-kegiatan semisalnya. Sedangkan lainnya

mengetahui akan PSAK 59 dari berbagai sumber, misalnya media masa, buku PAPSI, dosen, dan karena diberi tahu.

Tabel 4.3 Sumber Informasi Tentang PSAK No. 59 Menurut Responden

Penerapan PSAK 59	Frekuensi	Prosentase
Pelatihan/Seminar	36	75%
Lain-lain	12	25%
Jumlah	48	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 75% responden mengetahui akan PSAK 59 dari berbagai pelatihan dan kegiatan-kegiatan semacamnya. Sedangkan 25% mengetahui akan PSAK 59 dari berbagai sumber, misalnya media masa, buku PAPSI, dosen, dan karena diberi tahu. Melihat hasil tersebut, kiranya pelatihan/seminar/kegiatan lain yang serupa merupakan media yang efektif untuk mensosialisasikan PSAK 59 ke pengelola BMT.

Kemudian mengenai pertanyaan bagaimana pendapat mereka setelah tahu tentang PSAK 59. Pada dasarnya mereka menyambut baik hadirnya PSAK 59 untuk institusi mereka, karena hal ini akan mendukung ketertiban administrasi keuangan BMT yang sesuai syariah. Namun demikian mereka membutuhkan adanya lebih banyak sosialisasi untuk implementasi. Karena bagi mereka yang berlatar belakang non ekonomi butuh pemahaman lebih banyak mengenai istilah-istilah dalam PSAK No. 59 tersebut. Disamping itu, dari sekian banyak BMT yang belum mengimplementasikan PSAK No. 59, alasan mereka adalah karena adanya

keterbatasan SDM atau belum adanya SDM yang menguasai betul tentang PSAK 59 serta belum ada sosialisasi.

Selain itu mengenai pertanyaan apakah mereka merasa kesulitan terhadap implementasi/praktek PSAK 59 tersebut, yang menyatakan sulit hampir sepertiganya, dan dua pertiganya menyatakan tidak sulit mempraktekkan PSAK No. 59. Berikut ini data hasil wawancara dengan wakil masing-masing BMT yang menjadi sampel penelitian mengenai kesulitan mempraktekkan PSAK 59.

Tabel 4.4 Tingkat Kesulitan Dalam Mempraktekkan PSAK 59 Menurut Responden

Penerapan PSAK 59	Frekuensi	Prosentase
Sulit	18	37.5%
Tidak Sulit	30	62.5%
Jumlah	48	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel tersebut terlihat bahwa responden yang menyatakan sulit mempraktekkan PSAK 59 sebanyak 37.5%, dan responden yang menyatakan tidak sulit mempraktekkan PSAK 59 sebanyak 62.5%. Mereka yang menyatakan kesulitan mempraktekkan PSAK 59, secara garis besar disebabkan karena *background* pendidikannya non ekonomi sehingga mereka merasa kesulitan dalam mempelajari dan memahami istilah-istilah baru yang dipakai dalam PSAK 59. Sedangkan responden yang menyatakan tidak sulit, karena mereka sudah menggunakan *software* yang disesuaikan dengan PSAK 59 yang dirasakan lebih mudah dan lengkap.

Secara lebih terinci, berdasarkan angket yang disebar, distribusi frekuensi mengenai latar belakang pendidikan untuk masing-masing responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Latar Belakang Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jurusan	Jumlah	%
1	SMA/SMK	1. SMEA Akuntansi	2	4.2%
		2. SMA IPS	2	4.2%
		3. SMA IPA	1	2.1%
		4. SMK non ekonomi	4	8.3%
2	Diploma 3 (D3)	1. Akuntansi	3	6.2%
		2. Bina Wisata	1	2.1%
		3. Manajemen Perusahaan	2	4.2%
		4. Keuangan Syariah	1	2.1%
3	Sarjana (S1)	1. Akuntansi	1	2.1%
		2. Ekonomi Manajemen	9	18.7%
		3. Ekonomi Pembangunan	3	6.2%
		4. Manajemen Perusahaan	1	2.1%
		5. Syariah	1	2.1%
		6. Ekonomi Islam	2	4.2%
		7. Keuangan Islam	3	6.2%
		8. Dakwah	2	4.2%
		9. Teknik Sipil	1	2.1%
		10. Teknik Kimia	1	2.1%
		11. Pendidikan Agama Islam	1	2.1%
		12. Sosiologi	2	4.2%
		13. Bahasa dan Sastra Arab	1	2.1%
		14. Sosial	1	2.1%
		15. Agronomi Pertanian	1	2.1%
4	Pasca Sarjana (S2)	1. Manajemen	1	2.1%
	Jumlah		48	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden yang mempunyai latar belakang ekonomi (konvensional maupun syariah) dari seluruh kelompok jenjang pendidikan, mencapai 58.3%. Selebihnya berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu non-ekonomi. Sedangkan dari responden yang berlatar belakang ekonomi tersebut, khusus yang berlatar belakang akuntansi konvensional atau keuangan Islam hanya 20.8% dan 37.5% berasal dari ekonomi non akuntansi/keuangan Islam.

Kemudian, mengenai pertanyaan apakah kegiatan semacam seminar, pelatihan, atau kegiatan lain tentang akuntansi syariah memberikan pengaruh bagi implementasi PSAK 59 di BMT? Atas pertanyaan ini mayoritas pengelola BMT sangat menyetujuinya. Mereka mendukung adanya kegiatan semacam seminar, pelatihan, atau kegiatan lain tentang akuntansi syariah. Karena, minimnya pelatihan tentang akuntansi syariah akan sangat mempengaruhi sosialisasi PSAK 59 kepada pengelola BMT. Selain itu mereka berpandangan bahwa kalau hanya membaca dari buku panduan saja belum cukup menjelaskan, maka kegiatan semacam seminar, pelatihan, atau kegiatan lain tentang akuntansi syariah umumnya dan PSAK 59 khususnya terasa lebih efektif sebagai media untuk menambah ilmu/wawasan serta untuk lebih memahami dan memperdalamnya.

Namun demikian, ada beberapa pengelola yang kurang setuju kalau kegiatan semacam seminar, pelatihan, atau kegiatan lain tentang akuntansi syariah memberikan pengaruh bagi implementasi PSAK 59 di BMT. Karena, semua itu tergantung dari *political will* masing-masing lembaga. Hal ini dikarenakan banyak BMT yang bekerja sama dengan Departemen Koperasi yang mengharuskan tata cara

pelaporan sebagaimana koperasi, sehingga mereka dituntut untuk memenuhi ketentuan tersebut. Jadi yang dibutuhkan adalah kejelasan status serta standar akuntansi BMT melalui surat keputusan, sehingga arah dan tujuan BMT menjadi lebih jelas.

Selanjutnya mengenai pertanyaan standar akuntansi yang dipakai oleh BMT saat ini, pada BMT yang belum menerapkan PSAK 59, saat ini sistem akuntansi yang digunakan oleh BMT-BMT anggota-anggota PUSKOPSYAH ini cukup bervariasi, seperti Quattro Pro, USSI program, PSAK 27, Akuntansi umum yang mengarah ke pola syariah, Standar Akuntansi *Micro-Finance*, Standar PINBUK yang direkomendasikan untuk BMT, bahkan menggunakan akuntansi yang menggabungkan antara PSAK 27 dan PSAK 59. Jadi pada intinya mereka sudah menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi, hanya saja program (*software*) yang digunakan bermacam-macam.

Namun melihat kenyataan ini, meskipun para pengelola BMT menyadari akan perlunya standar akuntansi yang sesuai syariah Islam, namun dalam *action*-nya dibutuhkan kemauan (*political will*) dari para pengelola BMT tersebut dan terutama adanya aturan yang jelas.

3. Gambaran Mengenai Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil dari angket yang telah disebarkan kepada responden, maka dapat digambarkan karakteristik responden apabila dilihat dari umur, pendidikan,

lamanya bekerja di institusi BMT, dan frekuensi mengikuti pelatihan sebagaimana berikut:

a. Keadaan Umur Responden

Dalam penelitian ini, karakteristik umur responden dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kelompok umur yang berusia 20 sampai 30 tahun, kelompok umur yang berusia 31 sampai 40 tahun, kelompok umur yang berusia 41 sampai 50 tahun, dan kelompok umur yang berusia diatas 50 tahun.

Berdasarkan hasil angket yang disebar, dapat diketahui bahwa secara umum, frekuensi terbanyak didominasi oleh responden yang berumur antara 20 sampai 30 tahun, kemudian disusul umur 30 sampai 40 tahun. Selanjutnya responden yang berusia 40 sampai 50 tahun dan terakhir responden yang berusia diatas 50 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar praktisi BMT di Yogyakarta berada pada usia produktif.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai distribusi frekuensi responden menurut kelompok umur ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

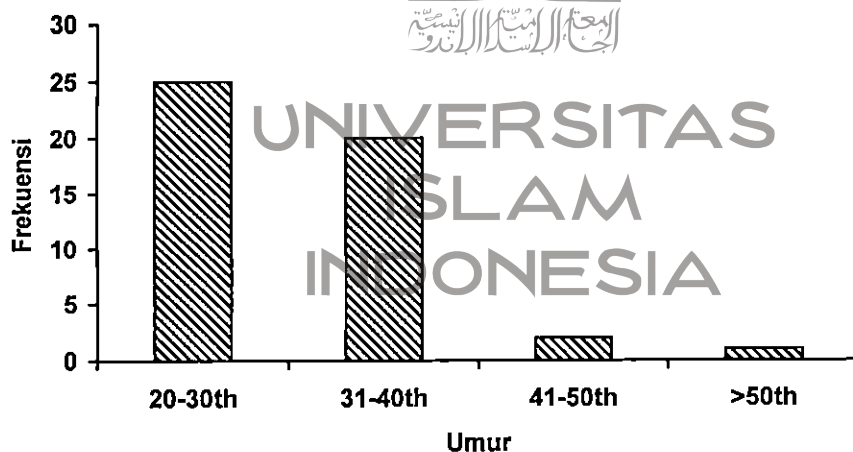
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Kelompok Umur Responden

Kelompok Umur	Frekuensi	Prosentase
20 s/d 30 tahun	25	52,1%
31 s/d 40 tahun	20	41,7%
41 s/d 50 tahun	2	4,2%
> 50 tahun	1	2,1%
Jumlah	48	100,0 %

Sumber: Data Primer

Dari tabel 4.6 tersebut dapat diketahui bahwa frekuensi terbanyak didominasi oleh responden yang berumur antara 20 sampai 30 tahun, yaitu 25 orang atau sebesar 52,1%. Kemudian disusul responden yang berumur 30 sampai 40 tahun sebanyak 20 orang atau sebesar 41,7%. Selanjutnya responden yang berusia 40 sampai 50 tahun sebanyak 2 orang atau 4,2% dan terakhir responden yang berusia diatas 50 tahun sebanyak 1 orang atau 2,1%.

Sedangkan untuk lebih mengetahui mengenai sebaran distribusi frekuensi karakteristik responden menurut kelompok umur ini, bisa dilihat dalam histogram pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.1 Histogram Kelompok Umur Responden

Dari histogram diatas jelas terlihat bahwa pada kelompok umur 20 sampai 30 tahun mempunyai frekuensi terbanyak.

b. Deskripsi Lama Responden Bekerja di BMT

Pengalaman bekerja seseorang bisa dijadikan ukuran seseorang praktisi dalam memahami pekerjaannya. Namun demikian keadaan ini belum tentu sama dengan relitasnya. Dalam penelitian ini lama responden bekerja di BMT dikelompokkan menjadi empat, yaitu kelompok responden yang bekerja kurang dari 3 tahun, kelompok responden yang bekerja antara 3 sampai 5 tahun, kelompok responden yang bekerja antara 5 sampai 7 tahun, dan kelompok responden yang bekerja lebih dari 7 tahun.

Berdasarkan hasil dari angket yang disebar, dapat diketahui bahwa karakteristik lamanya seorang praktisi bekerja di BMT, diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Lamanya Responden Bekerja di BMT

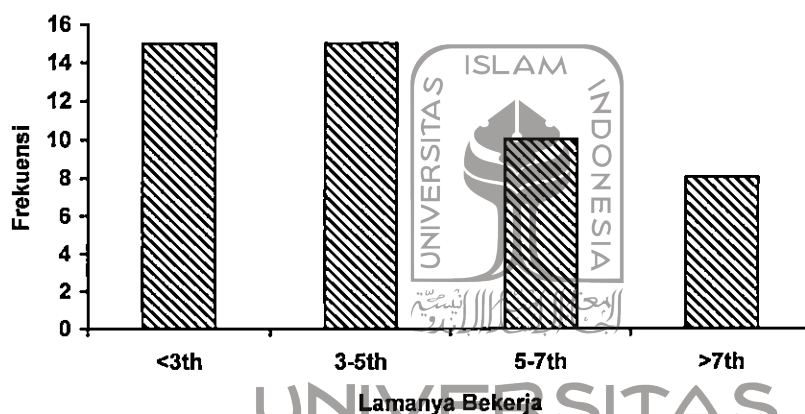
Lama Bekerja Di BMT	Jumlah	Prosentase
< 3 tahun	15	31,3%
3 - 5 tahun	15	31,3%
5 - 7 tahun	10	20,8%
> 7 tahun	8	16,7%
Jumlah	48	100,0 %

Sumber: Data Primer

Dari tabel 4.7. tersebut terlihat bahwa frekuensi dari responden yang bekerja kurang dari 3 tahun dan frekuensi dari responden yang bekerja antara 3 sampai 5 tahun mempunyai distribusi frekuensi yang sama, yaitu masing-masing 15 responden atau 31.3%. Kemudian frekuensi dari responden yang bekerja antara 5 sampai 7 tahun

sebanyak 10 responden atau 20.8% dan frekuensi dari responden yang bekerja lebih dari 7 tahun sebanyak 8 responden atau 16.7%.

Untuk mengetahui sebaran distribusi frekuensi lamanya praktisi BMT yang menjadi responden bekerja di institusi BMT ini, bisa dilihat dalam histogram pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.2 Histogram Lama Responden Bekerja di BMT

Dari histogram diatas jelas terlihat bahwa frekuensi responden menurut lamanya bekerja di institusi BMT cukup merata di tiap kelompok.

c. Latar Belakang Pendidikan Responden

Dalam penelitian ini, latar belakang pendidikan responden dikelompokkan menjadi empat, yaitu responden yang berpendidikan SMA, responden yang berlatar belakang pendidikan D3, responden yang berlatar belakang pendidikan Sarjana (S1) dan responden yang berlatar belakang pendidikan S2. Berdasarkan hasil angket yang disebar, dapat diketahui mengenai distribusi frekuensinya pada tabel dibawah ini:

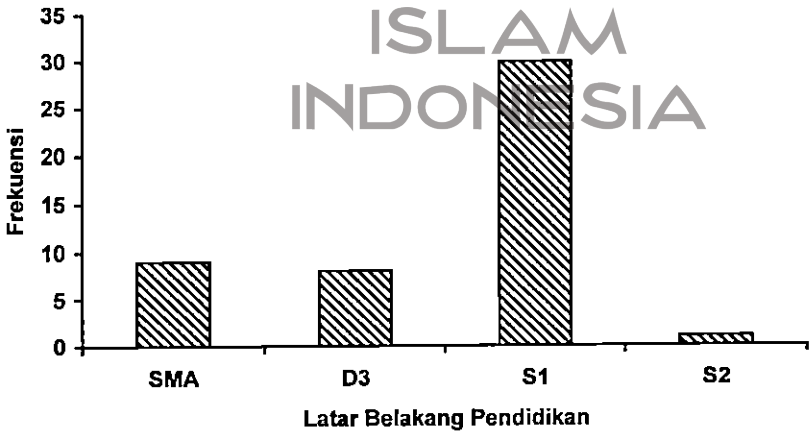
Tabel 4.8 Distribusi Freskuensi Latar Belakang Pendidikan Responden

Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
SMA/SMK/MAN	9	18,8%
D3	8	16,7%
Sarjana (S1)	30	62,5%
Pascasarjana (S2)	1	2,1%
Jumlah	48	100 %

Sumber: Data Primer

Pada tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar responden berlatar belakang sarjana (S1), yaitu 62.5%. Kemudian responden yang berlatar belakang SMA sebanyak 18.8%, responden yang berlatar belakang Diploma 3 sebanyak 16.7% dan responden yang berlatar belakang pascasarjana sebanyak 2.1%

Sedangkan untuk lebih mengetahui sebaran distribusi frekuensinya juga bisa dilihat dalam histogram di bawah ini:



Gambar 4.3 Histogram Latar Belakang Pendidikan Responden

Dari histogram diatas jelas terlihat bahwa pada kelompok responden yang berlatar belakang sarjana (S1) mempunyai frekuensi terbanyak.

d. Frekuensi Mengikuti Pelatihan

Dalam penelitian ini variabel frekuensi mengikuti pelatihan dikelompokkan menjadi empat, yaitu: frekuensi mengikuti pelatihan 1 sampai 3 kali, frekuensi mengikuti pelatihan 4 sampai 6 kali, frekuensi mengikuti pelatihan 7 sampai 9 kali, dan frekuensi mengikuti pelatihan lebih dari 9 kali. Berdasarkan pada hasil angket yang telah disebar, diperoleh informasi bahwa kebanyakan responden baru mengikuti pelatihan berkisar antara 1 sampai 3 kali, kemudian disusul responden yang mengikuti pelatihan 4 sampai 6 kali, responden yang mengikuti pelatihan 7 sampai 9 kali, dan terakhir responden yang mengikuti pelatihan lebih dari 9 kali. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

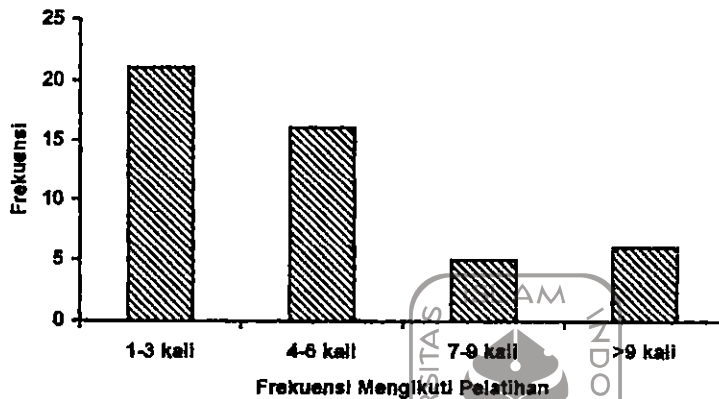
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Responden Dalam Mengikuti Pelatihan

Frekuensi Mengikuti Pelatihan	Jumlah	Prosentase
1 sampai 3 kali	21	43,8%
4 sampai 6 kali	16	33,3%
7 sampai 9 kali	5	10,4%
Lebih dari 9 kali	6	12,5%
Jumlah	48	100,0 %

Sumber: Data Primer

Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa frekuensi responden mengikuti pelatihan antara 1 sampai 3 kali menduduki porsi terbanyak, yaitu sebanyak 21 responden atau sekitar 43,8%. Selanjutnya responden yang sudah mengikuti pelatihan 4 sampai 6 kali sebanyak 16 responden atau 33,3%. Sedangkan responden yang sudah mengikuti pelatihan 7 sampai 9 kali sebanyak 5 responden atau 10,4% dan praktisi yang sudah mengikuti pelatihan lebih dari 9 kali sebanyak 6 responden atau 12.5%.

Sedangkan untuk lebih mengetahui mengenai sebaran distribusi frekuensi para praktisi BMT mengikuti pelatihan bisa dilihat dalam histogram dibawah ini:



Gambar 4.4 Histogram Distribusi Frekuensi Responden Dalam Mengikuti Pelatihan

Dari histogram diatas jelas terlihat bahwa pada kelompok responden yang frekuensinya mengikuti pelatihan antara 1 sampai 3 kali mempunyai frekuensi terbanyak.

5. Deskripsi Pemahaman Responden Terhadap PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah (Pengakuan dan Pengukuran Produk *Funding*)

Dalam pembahasan ini tingkat pemahaman responden terhadap PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah pengakuan dan pengukuran produk *funding* akan dibagi menjadi tiga kategori. Selanjutnya untuk mengetahui lebih mendalam tingkat pemahaman responden terhadap PSAK No. 59, maka akan dilihat dari berbagai karakteristik umur, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan.

Dalam mengelompokkan kedalam ketiga kategori tersebut digunakan statistik deskriptif. Dari 26 item pertanyaan dengan skor bergerak antara 1 sampai 3, maka nilai maksimal adalah 78 dan nilai minimal 26. Maka mean-nya (M) = (nilai maksimal + nilai minimal) : 2 = 52. Kemudian standar deviasinya = $(78-26):6 = 8,7$. Selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

Rendah = $M-3SD$ s/d $M-1SD$

Sedang = $M-1SD$ s/d $M+1SD$

Tinggi = $M+1SD$ s/d $M+3SD$

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengelompokan tingkat pemahaman responden tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10 Kategori Tingkat Pemahaman

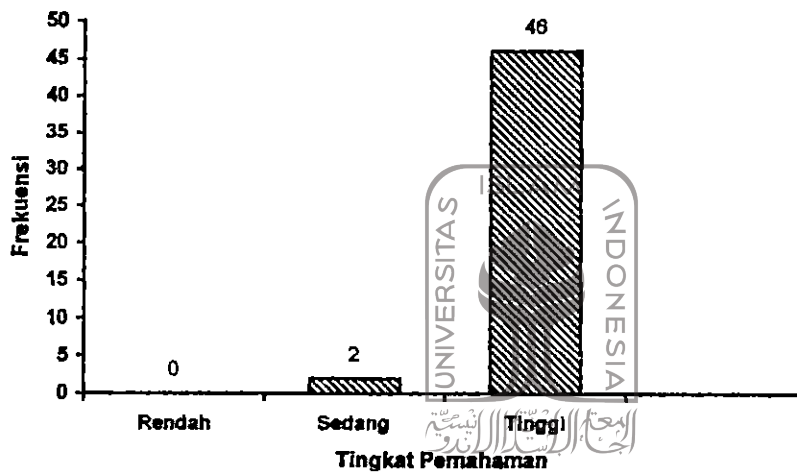
Kategori Tingkat Pemahaman	Skor
Rendah	26 - 43,4
Sedang	43,4 - 60,7
Tinggi	60,8 - 78

Berdasarkan pada hasil perhitungan ini dan juga berdasarkan pada angket yang disebar, dapat diketahui tingkat pemahaman responden terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding*, seperti tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman Responden Terhadap PSAK 59 Pengakuan dan Pengukuran Produk *Funding*

Tingkat Pemahaman	Frekuensi	Prosentase
Rendah	-	-
Sedang	2	4,2%
Tinggi	46	95,8%
Jumlah	48	100,0%

Sedangkan sebaran distribusi frekuensi tingkat pemahaman responden terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding* ini, bisa dilihat pada histogram pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.5 Histogram Tingkat Pemahaman Responden Terhadap PSAK 59 Pengakuan dan Pengukuran Produk *Funding*

Pada tabel 4.11. dan histogram gambar 4.5 diatas menunjukkan bahwa responden yang mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding* mencapai 46 responden atau 95.8%, pada level sedang sebanyak 2 responden atau 4.2%, sedangkan responden pada level rendah tidak ditemukan. Tingginya tingkat pemahaman responden terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding* ini menunjukkan bahwa praktisi BMT anggota Pukopsyah di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup *familiar* dengan pengakuan dan pengukuran produk *funding* ini secara teori maupun praktek.

a. Deskripsi Pemahaman Responden Menurut Kelompok Umur, Lama Bekerja, Latar Belakang Pendidikan, dan Frekuensi Mengikuti Pelatihan

Pada bagian ini, akan dilakukan tabulasi silang antara hasil jawaban responden terhadap butir pertanyaan skala pemahaman dengan variabel umur, lama bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan.

1) Tingkat Pemahaman Responden Menurut Kelompok Umur

Usia seseorang akan mempengaruhi kemampuannya dalam memahami sesuatu. Dalam penelitian ini tingkat pemahaman responden ditentukan dari kemampuan responden menjawab kuesioner. Apabila tingkat pemahaman responden terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding* dicross-kan dengan kelompok umur, maka akan diperoleh hasil seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.12 Tingkat Pemahaman Responden Menurut Kelompok Umur

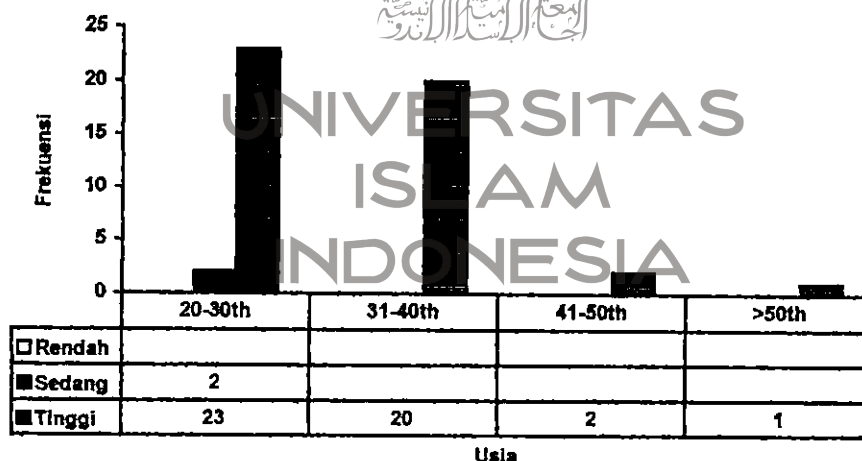
Tingkat Pemahaman	Kelompok Umur				Total
	20-30 th	31-40 th	41-50 th	>50 th	
Rendah	-	-	-	-	-
Sedang	2 (4.2%)	-	-	-	2 (4.2%)
Tinggi	23 (47.9%)	20 (41.7%)	2 (4.2%)	1 (2.1%)	46 (95.8%)
Jumlah	25	20	2	1	48 (100%)

Sumber: Data Primer

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada kelompok umur 20-30 tahun, responden yang mempunyai tingkat pemahaman sedang sebanyak 2 responden (4.2%) dan yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi 23 responden (47.9%). Pada kelompok umur 31 sampai 40 tahun, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 20

responden (41.7%), dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah dan sedang. Pada kelompok umur 41 sampai 50 tahun, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 2 responden (4.2%), dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah dan sedang. Pada kelompok umur diatas 50 tahun, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 1 responden (2.1%), dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah dan sedang.

Untuk lebih mengetahui sebaran distribusi frekuensi tingkat pemahaman responden menurut kelompok umur ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.6 Histogram Tingkat Pemahaman Responden Menurut Kelompok Umur

Dari histogram 4.6 diatas jelas terlihat bahwa, responden pada kelompok umur 20 sampai 30 tahun mempunyai tingkat pemahaman tinggi dengan frekuensi terbanyak, dan kemudian frekuensi terbanyak kedua ditempati oleh kelompok umur

31 sampai 40 tahun. Selanjutnya adalah kelompok umur 41-50 tahun dan terakhir kelompok umur diatas 50 tahun.

2). Tingkat Pemahaman Responden Menurut Lamanya Bekerja

Lamanya seseorang praktisi BMT menggeluti bidang tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap pemahamannya mengenai hal-hal berkaitan dengan bidangnya. Dalam penelitian ini tingkat pemahaman responden menurut lamanya bekerja dapat di ketahui berdasarkan penguasaan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, dimana apabila tingkat pemahaman responden terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding* dicross-kan dengan kelompok lama bekerja, maka akan diperoleh hasil seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.13 Tingkat Pemahaman Responden Menurut Lamanya Bekerja

Tingkat Pemahaman	Lamanya Bekerja				Total
	<3th	3-5th	5-7th	>7th	
Rendah	-	-	-	-	-
Sedang	2 (4.2%)	-	-	-	2 (4.2%)
Tinggi	13 (27.1%)	15 (31.3%)	10 (20.8%)	8 (16.7%)	46 (95.8%)
Jumlah	15	15	10	8	48 (100%)

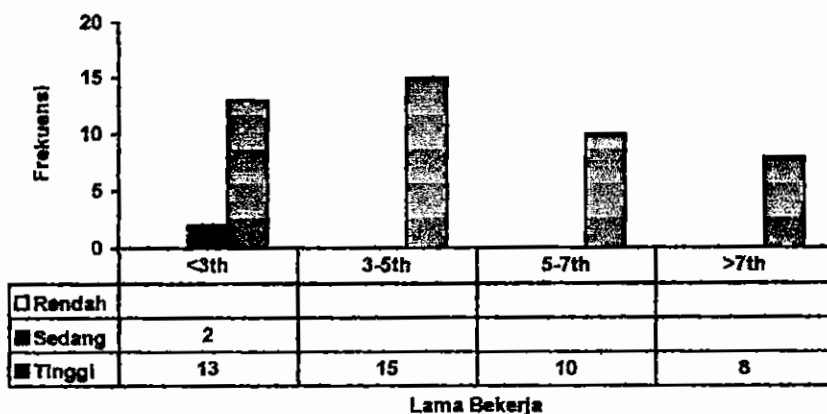
Sumber: Data Primer

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada semua kelompok lama bekerja, 95.8% responden mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi. Jadi berdasarkan penelitian ini responden mempunyai penguasaan materi yang cukup tinggi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Secara lebih detail, prosentase tingkat pemahaman pada masing-masing kelompok adalah sebagai berikut: pada kelompok lama bekerja kurang dari 3 tahun, responden yang mempunyai tingkat pemahaman

sedang sebanyak 2 responden (4.2%) dan yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi 13 responden (27.1%).

Kemudian, pada kelompok lama bekerja 3 sampai 5 tahun, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 15 responden (31.3%), dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah dan sedang. Pada kelompok lama bekerja 5 sampai 7 tahun, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 10 responden (20.8%), dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah dan sedang. Pada kelompok lama bekerja diatas 50 tahun, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 8 responden (16.7%), dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah dan sedang.

Untuk lebih mengetahui mengenai sebaran distribusi frekuensi untuk tingkat pemahaman menurut kelompok lama bekerja , dapat dilihat pada histogram berikut:



Gambar 4.7 Histogram Tingkat Pemahaman Responden Menurut Lama Bekerja

Dari histogram diatas nampak sekali bahwa frekuensi responden yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi, cukup merata pada tiap kelompoknya. Disini pada kelompok responden yang lamanya bekerja antara 3 sampai dengan 5 tahun mempunyai frekuensi tertinggi meskipun dengan *range* yang tidak besar.

3). Tingkat Pemahaman Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan mempunyai potensi besar terhadap pemahaman dan penyerapan materi-materi yang berbasis kepadanya. Dalam penelitian ini, apabila dilakukan *crosstabs* antara tingkat pemahaman responden terhadap PSAK 59 produk *funding* dengan kelompok latar belakang pendidikan, maka akan diperoleh hasil seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan

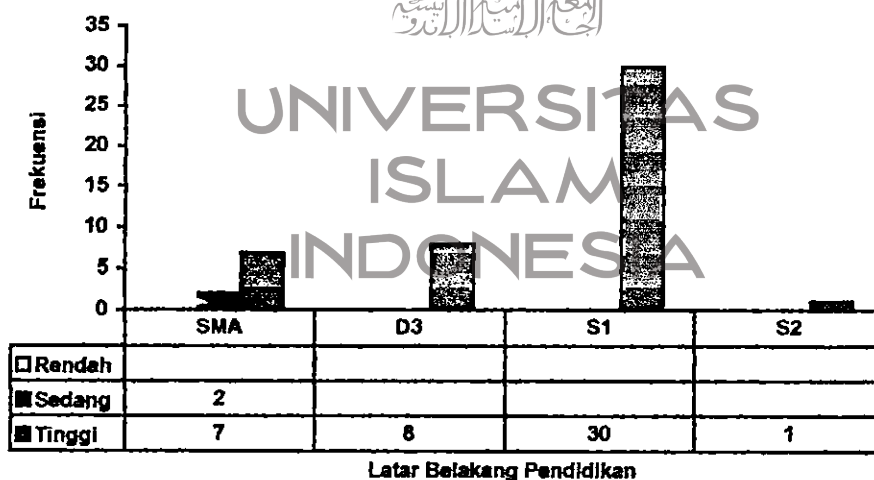
Tingkat Pemahaman	Latar Belakang Pendidikan				Total
	SMA	D3	S1	S2	
Rendah	-	-	-	-	-
Sedang	2 (4.2%)	-	-	-	2 (4.2%)
Tinggi	7 (14.6%)	8 (16.7%)	30 (62.5%)	1 (2.1%)	46 (95.8%)
Jumlah	9	8	30	1	48 (100%)

Sumber: Data Primer

Dari tabel 4.14 diatas terlihat bahwa pada kelompok latar belakang pendidikan SMA dan sederajat, responden yang mempunyai tingkat pemahaman sedang sebanyak 2 responden (4.2%) dan yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi sebanyak 7 responden (14.6%). Pada kelompok latar belakang pendidikan Diploma 3, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 8 reponden (16.7%), dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah dan

sedang. Pada kelompok latar belakang pendidikan Strata 1, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 30 responden (62.5%), dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah dan sedang. Pada kelompok latar belakang pendidikan Strata 2, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 1 responden (2.1%), dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah dan sedang.

Untuk mengetahui sebaran distribusi frekuensi tingkat pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding* menurut kelompok latar belakang pendidikan ini, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.8 Histogram Tingkat Pemahaman Praktisi BMT Terhadap PSAK No. 59 Pengakuan dan Pengukuran Produk *Funding* Menurut Latar Belakang Pendidikan

Dari histogram diatas nampak sekali bahwa responden yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi, frekuensi yang terbanyak terletak pada responden yang

mempunyai latar belakang pendidikan Strata 1 (Sarjana) yaitu sebanyak 62.5%. Kemudian yang berpendidikan D3 sebanyak 16.7%, SMA 14.6%, dan S2 sebanyak 2.1%.

4). **Tingkat Pemahaman Responden Menurut Frekuensi Mengikuti Pelatihan**

Seseorang yang sering mengikuti pelatihan terhadap bidang tertentu diharapkan akan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik. Dalam penelitian ini, apabila dilakukan *cross tabs* antara tingkat pemahaman responden terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding* dengan kelompok frekuensi mengikuti pelatihan, maka akan diperoleh hasil seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.15 Tingkat Pemahaman Responden Menurut Frekuensi Mengikuti Pelatihan

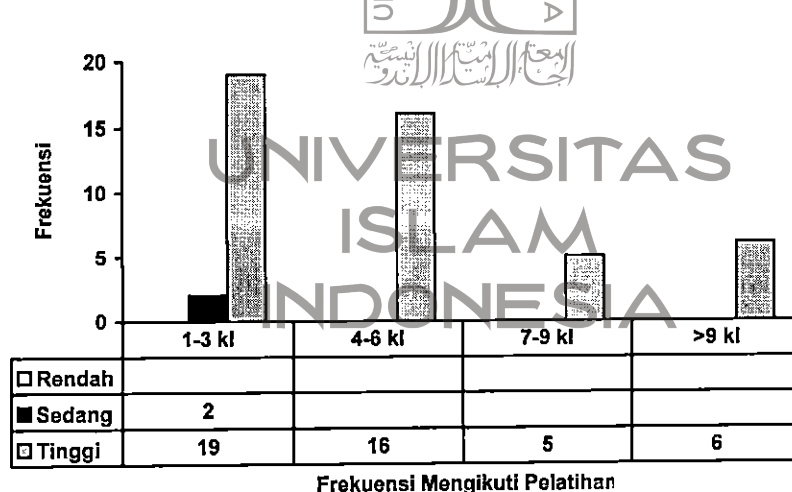
Tingkat Pemahaman	Frekuensi Mengikuti Pelatihan				Total
	1-3	4-6	7-9	>9	
Rendah	-	-	-	-	-
Sedang	2 (4.2%)	-	-	-	2 (4.2%)
Tinggi	19 (39.6%)	16 (33.3%)	5 (10.4%)	6 (12.5%)	46 (95.8%)
Jumlah	21	16	5	6	48 (100%)

Sumber: Data Primer

Dari tabel 4.15 diatas terlihat bahwa pada kelompok responden yang frekuensinya mengikuti pelatihan antara 1 sampai 3 kali, 39.6% responden berada pada kategori tinggi tingkat pemahamannya dan 4.2% responden pada kategori sedang. Pada kelompok frekuensi mengikuti pelatihan antara 4 sampai 6 kali, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 16 responden (33.3%), dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah dan

sedang. Pada kelompok frekuensi mengikuti pelatihan antara 7 sampai 9 kali, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 5 responden (10.4%), dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah dan sedang. Pada kelompok frekuensi mengikuti pelatihan lebih dari 9 kali, responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi sebanyak 6 responden (12.5%), dan tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah dan sedang.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebaran distribusi frekuensi tingkat pemahaman responden menurut frekuensinya mengikuti pelatihan, bisa dilihat pada histogram di bawah ini:



Gambar 4.9 Histogram Tingkat Pemahaman Responden Menurut Frekuensi Mengikuti Pelatihan

Dari histogram diatas nampak sekali bahwa responden yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi cukup merata pada setiap kelompoknya. Frekuensi responden yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi yang terbanyak terletak pada

responden yang mempunyai frekuensi mengikuti pelatihan antara 1 sampai 3 kali. Kemudian disusul frekuensi mengikuti pelatihan antara 4 sampai 6 kali. Selanjutnya responden yang mempunyai frekuensi mengikuti pelatihan lebih dari 9 kali dan terakhir responden yang mempunyai frekuensi mengikuti pelatihan antara 7 sampai 9 kali.

b. Deskripsi Mengenai Jawaban Responden Terhadap Butir Angket Skala Pemahaman

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir-butir angket skala pemahaman, secara umum responden sudah tepat dalam menjawab butir-butir pertanyaan dalam angket. Namun, terdapat beberapa nomor butir angket dimana masih cukup banyak responden yang menjawab tidak tepat.

Dalam butir pertanyaan nomor 3 misalnya (lihat lampiran, butir pertanyaan skala pemahaman nomor urut 3), mengenai pertanyaan standar akuntansi apa yang sementara ini sesuai untuk BMT karena standar akuntansi yang formal belum ada, menurut hasil angket ada 62.5% responden yang menjawab standar akuntansi yang sementara ini sesuai untuk BMT adalah PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah. Kemudian 20.8% responden menjawab standar akuntansi yang sementara ini sesuai untuk BMT adalah PSAK No. 27 Akuntansi Koperasi. Selanjutnya 16.7% responden menjawab lain-lain, yaitu standar akuntansi yang sementara ini sesuai untuk BMT adalah gabungan PSAK No. 59 dan PSAK No. 27. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16 Tingkat Jawaban Responden Terhadap Butir Pertanyaan Standar Akuntansi Yang Sesuai Untuk BMT

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
PSAK N0. 59	30	62.5%
PSAK No. 27	10	20.8%
Lain-lain	8	16.7%
Jumlah	48	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan hasil penelitian ini, meskipun tingkat pemahaman praktisi BMT pada PSAK No. 59 tersebut pada kategori tinggi yaitu 95.8% (lihat tabel 4.11) namun hanya 62.5% yang setuju bahwa standar akuntansi yang sesuai untuk BMT adalah PSAK No. 59. Sedangkan sisanya menganggap PSAK 59 tidak sesuai untuk BMT. Hal ini patut menjadi perhatian, karena di satu sisi mereka cukup paham terhadap PSAK 59 namun di sisi lain mereka kurang setuju dengan penerapan PSAK 59 di BMT.

BMT sebagai sebuah lembaga keuangan idealnya memiliki praktisi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman memadai tentang hal-hal yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam bidang keuangan dan perbankan. Salah satu hal yang paling umum yaitu seperti pada pertanyaan nomor 8 (lihat lampiran, butir pertanyaan skala pemahaman nomor urut 8), yaitu mengenai perbedaan antara tabungan dengan giro. Pada pertanyaan ini, 77.1% responden menjawab dengan tepat, yaitu tabungan mirip dengan giro dan bisa diambil setiap saat. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 23% responden tidak menjawab dengan tepat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.17 Tingkat Jawaban Responden Terhadap Butir Pertanyaan Perbedaan Antara Tabungan dengan Giro

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
A. Tabungan mirip dengan giro, yaitu tabungan yang bisa diambil setiap saat	37	77.1%
B. Giro tidak dapat diambil setiap saat	9	18.8%
C. Tabungan dapat ditarik dengan cek	2	4.2%
Jumlah	48	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel tersebut jelas terlihat bahwa ternyata masih cukup banyak responden yang belum memahami perbedaan antara tabungan dengan giro, yaitu sekitar 23%.

Selanjutnya, hal yang juga patut untuk dijadikan perhatian adalah jawaban responden pada pertanyaan nomor 13 (lihat lampiran, butir pertanyaan skala pemahaman nomor urut 13). Pada butir pertanyaan ini (mengenai kasus misalkan BMT membayarkan bonus kepada nasabah), sebagian besar responden tidak menjawab sesuai dengan PSAK 59 (PAPSI). Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 4.18 Tingkat jawaban responden terhadap Butir Pertanyaan No. 13

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
A	10	20.8%
B	38	79.2%
C	-	-
Jumlah	48	100%

Sumber: Data Primer

Pada butir pertanyaan ini hanya 20.8% responden yang menjawab bahwa setiap bonus yang dibayarkan kepada nasabah dikenakan pajak penghasilan sebesar 15%. Sedangkan 79.2%nya menjawab bahwa setiap bonus yang dibayarkan kepada

nasabah tidak dikenakan pajak penghasilan. Kiranya, minimnya pengetahuan dan juga pemahaman praktisi terhadap pengenaan pajak penghasilan terhadap semua jenis pendapatan merupakan suatu temuan yang patut ditindaklanjuti.

5. Hasil Uji Statistik Mengenai Hubungan Antara Usia, Lamanya Bekerja, Latar Belakang Pendidikan, dan Frekuensinya Mengikuti Pelatihan Terhadap Pemahaman Praktisi BMT Pada PSAK No. 59 Pengakuan dan Pengukuran Produk *Funding*.

Agar hasil yang diperoleh melalui kuesioner mempunyai keandalan dan kekuatan argumentasi, maka dibutuhkan uji statistik terhadap elemen-elemen yang menjadi fokus penelitian. Berikut ini adalah hasil uji statistik mengenai hubungan antara usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensinya mengikuti pelatihan terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding*.

Berdasarkan uji validitas instrumen penelitian dengan produk momen r pearson, diperoleh hasil bahwa instrumen penelitian berupa angket yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai validitas yang cukup. Dalam arti instrumen penelitian tersebut dapat digunakan untuk proses selanjutnya, yaitu untuk menguji hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini uji hubungan dimaksud adalah analisis korelasi ganda dan analisis korelasi parsial.

a. Uji F Untuk Analisis Korelasi Ganda

Berdasar analisis korelasi ganda dengan program SPSS versi 13, diperoleh hasil bahwa antara usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan

frekuensinya mengikuti pelatihan mempunyai hubungan terhadap pemahaman praktisi BMT pada PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding*. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil dari uji korelasi tersebut.

Tabel 4.19 Hasil Pengujian dengan Analisa Korelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682 ^a	.466	.416	3.291

a. Predictors: (Constant), X4) Frekuensi Mengikuti Pelatihan , X3 Latar Belakang Pendidikan, X1 Usia, X2 Lama Bekerja di BMT

Hasil pengujian dengan menggunakan analisa korelasi ganda ini adalah koefisien korelasi ganda (R). Dari tabel 4.16 diatas diketahui bahwa harga R yaitu sebesar 0.682. Interpretasi dari nilai R ini adalah, karena R (0.682) berada diantara 0.61 sampai 0.81 (lihat tabel 3.3), yang berarti bahwa antara variabel-variabel bebas yang terdiri dari umur, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan, secara bersama-sama mempunyai keeratan hubungan yang *cukup* terhadap variabel terikat (pemahaman responden terhadap PSAK No. 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding*), sebesar 0.682.

Selanjutnya untuk mengetahui/menguji apakah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan variabel terikat secara nyata/signifikan atau tidak, maka dilakukan Uji F. Dalam melakukan uji F ini, akan dibandingkan F hitung yaitu hasil perhitungan komputer dengan program SPSS versi 13 dengan F tabelnya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas

secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan variabel terikat secara nyata/signifikan. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil Uji F tersebut.

Tabel 4.20 Hasil Uji F Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	405.902	4	101.475	9.368	.000 ^a
	Residual	465.765	43	10.832		
	Total	871.667	47			

a. Predictors: (Constant), X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan, X3 Latar Belakang Pendidikan, X1 Usia, X2 Lama Bekerja di BMT

b. Dependent Variable: Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui F_{hitung} adalah 9.368. Untuk menentukan F_{tabel} dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) 43 diperoleh F_{tabel} sebesar 2,589. Atas dasar hasil penghitungan tersebut, karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel terikat.

b. Uji t Untuk Analisis Korelasi Parsial

Hasil dari analisis korelasi parsial adalah koefisien korelasi parsial (r_p).

Koefisien korelasi parsial adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel jika variabel lainnya konstan pada hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel. Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan komputer program SPSS versi 13 diperoleh hasil korelasi masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara parsial sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.21 Koefisien Korelasi Parsial Variabel Umur, Lama Bekerja, Latar Belakang Pendidikan, dan Frekuensi Mengikuti Pelatihan Terhadap Variabel Pemahaman

Coefficients^a

Model		Correlations		
		Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)			
	X1 Usia	.419	.361	.283
	X2 Lama Bekerja di BMT	.465	.326	.252
	X3 Latar Belakang Pendidikan	.344	.401	.320
	X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan	.383	.319	.246

a. Dependent Variable: Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59

Dari tabel 4.18 tersebut, angka koefisien korelasi parsial untuk variabel usia (X_1) adalah 0.361, koefisien korelasi parsial variabel lama bekerja (X_2) di BMT adalah 0.326, koefisien korelasi parsial variabel latar belakang pendidikan (X_3) adalah 0.401, dan koefisien korelasi parsial variabel frekuensi mengikuti pelatihan (X_4) adalah 0.319.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini, variabel latar belakang pendidikan merupakan variabel yang paling tinggi keeratan hubungannya dengan variabel pemahaman. Besarnya hubungan ini yaitu sebesar 0.401. Kemudian diikuti oleh variabel usia sebesar 0.361, kemudian variabel lama

bekerja sebesar 0.326, dan terakhir variabel yang mempunyai keeratan hubungan paling kecil adalah variabel frekuensi mengikuti pelatihan yaitu sebesar 0.319.

Kemudian untuk menguji apakah koefisien korelasi parsial (r_p) yang diperoleh tersebut signifikan atau tidak, maka dilakukan uji t. Kriteria pengujian dengan menggunakan uji t ini adalah, jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka tidak signifikan. Hasil uji t tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.22 Uji t Hubungan Secara Parsial Antara Umur, Lama Bekerja, Latar Belakang Pendidikan, dan Frekuensi Mengikuti Pelatihan Terhadap Pemahaman

		Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	62.695	2.068		30.319	.000
	X1 Usia	1.940	.765	.307	2.536	.015
	X2 Lama Bekerja di BMT	1.108	.490	.277	2.263	.029
	X3 Latar Belakang Pendidikan	1.688	.589	.323	2.866	.006
	X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan	1.061	.480	.253	2.209	.033

Kemudian untuk mendapatkan t_{tabel} dilakukan dengan menentukan taraf signifikansi (α) sebesar 5% (0.05) dan derajat kebebasan (df) N-2 (dimana N adalah jumlah responden), maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2.017. Jadi karena t_{hitung} (lihat tabel 4.18) untuk semua variabel bebas tersebut lebih besar dari t_{tabel} nya, maka hubungan

antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat jika variabel lainnya konstan adalah signifikan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Seperti yang sudah dikemukakan pada subbab diatas, bahwa atas dasar angket yang telah disebarakan kepada responden para praktisi BMT di lingkungan PUSKOPSYAH Daerah Istimewa Yogyakarta, diketahui bahwa para praktisi BMT yang terdiri dari manajer dan staf akuntansinya mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang berada dalam kategori tinggi tingkat pemahamannya mencapai prosentase 95,8%. Selanjutnya yang berada dalam kategori sedang sebanyak 4.2% dan yang berkategori rendah 0%.

Selain itu, setelah diketahui tingkat pemahaman responden yang berada dalam kategori tinggi cukup besar, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah usia, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensinya mengikuti pelatihan mempunyai hubungan dengan tingginya pemahaman responden terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding*? Hasil ini tentunya sangat menarik untuk dikaji, karena berdasarkan observasi dan wawancara dengan responden diketahui bahwa masih cukup banyak BMT yang menjadi anggota Puskopsyah ini belum menerapkan PSAK No. 59 di institusi BMT mereka.

Berdasarkan hasil pengujian antar variabel yang telah dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang (*crosstabs*), analisis korelasi ganda, analisis korelasi parsial, dan uji statistik menggunakan uji F dan uji t, terdapat beberapa temuan yang

cukup menarik untuk dibahas. Beberapa temuan tersebut akan diuraikan pada bagian dibawah ini.

Pertama, berdasarkan pengelompokan tingkat pemahaman, diketahui bahwa tingkat pemahaman responden secara umum berada pada kategori tinggi. Tingkat pemahaman responden terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding* yang berada dalam kategori tinggi mencapai 95.8%, kemudian yang berada dalam kategori sedang sebesar 4.2% dan tidak ditemukan responden yang berada pada kategori rendah. Tingginya tingkat pemahaman responden terhadap PSAK No. 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding* ini merupakan fenomena yang menarik, mengingat masih cukup banyak BMT yang belum menerapkan PSAK 59.

Kedua, berdasarkan uji analisis hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, ternyata tingginya tingkat pemahaman responden ini mempunyai hubungan dengan variabel usia, lama kerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan. Nilai koefisien korelasi ganda (R) 0.682 memberikan arti bahwa antara variabel bebas yang terdiri dari usia, lama bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan dengan variabel terikat (pemahaman) mempunyai tingkat keeratan yang cukup (lihat tabel 3.3).

Berdasarkan uji statistik, hasilnya menunjukkan bahwa dari semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel usia, lama kerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan, terhadap variabel pemahaman, secara bersama-sama mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah.

pengakuan dan pengukuran *produk funding*. Hal ini didasarkan hasil penghitungan yaitu, $F \text{ hitung } (9.368) > F \text{ tabel } (2.589)$, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah signifikan. Yang artinya, antara umur, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemahaman responden terhadap PSAK No. 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding*.

Ketiga, dalam penelitian ini, berdasarkan analisis koefisien korelasi parsial, diperoleh hasil bahwa faktor yang paling kuat hubungannya terhadap variabel pemahaman adalah latar belakang pendidikan. Menurut distribusi frekuensi pada tabel 4.3 diketahui bahwa sebagian besar responden berlatar belakang sarjana (S1) yaitu mencapai 62.5%. Kemudian disusul dengan responden yang berlatar belakang pendidikan SMA yaitu 18.8%, berlatar belakang pendidikan D3 sebanyak 16.7%, dan berlatar belakang pendidikan strata dua (S2) sebanyak 2.1%.

Bila variabel latar belakang pendidikan ini dihubungkan dengan tingkat pemahaman (lihat tabel 4.14), tidak ditemukan responden yang mempunyai tingkat pemahaman rendah, dan hanya 4.2% responden yang mempunyai tingkat pemahaman sedang. Sedangkan dari kelompok responden yang berlatar belakang sarjana (S1), seluruhnya (62.5%) mempunyai tingkat pemahaman tinggi terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding*. Demikian pula dari kelompok responden yang berlatar belakang Diploma 3 (16.7%) dan strata 2 (2.1%) seluruhnya juga mempunyai tingkat pemahaman tinggi. Sedangkan untuk kelompok responden yang

berlatar belakang SMA sebanyak 14.6% responden mempunyai tingkat pemahaman tinggi dan 4.2% responden mempunyai tingkat pemahaman sedang.

Faktor latar belakang pendidikan mempunyai hubungan terbesar dikarenakan, dengan perbedaan latar belakang pendidikannya, maka berbeda pula tingkat pemahamannya. Disamping itu, responden yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya akan lebih mudah menyerap materi-materi yang berkaitan. Terlebih lagi, hal ini didukung oleh umur responden yang masih dalam usia produktif (yaitu usia 20 sampai 30 tahun), serta lama bekerja dan frekuensi mengikuti pelatihan yang cukup.

Keempat, faktor umur menempati posisi kedua dari faktor-faktor yang mempunyai hubungan dengan pemahaman. Berdasarkan distribusi frekuensi seperti terlihat pada subbab Karakteristik Responden, diketahui bahwa pada variabel usia/umur, sebagian besar responden berusia antara 20 sampai 30 tahun, yaitu sebanyak 52.1%. Kemudian disusul dengan responden yang berusia 31 sampai 40 tahun sebanyak 41.7%. Bila variabel usia ini dihubungkan dengan tingkat pemahaman, maka pada kelompok umur 20 sampai 30 tahun sebanyak 47.9% responden berada pada tingkat pemahaman yang tinggi dan 4.2% pada level sedang. Sedangkan pada kelompok umur 30 sampai 40 tahun, sebanyak 41.7% responden berada pada level pemahaman tinggi.

Tingginya tingkat pemahaman responden pada usia 20 sampai 30 tahun, yang mana pada rentang waktu ini merupakan usia yang produktif, merupakan suatu fenomena yang menarik. Karena, mengingat apa yang sudah disebutkan pada

landasan teori, bahwa atas landas usia, daya kecerdasan seseorang akan meningkat terus dan mencapai titik optimal antara 20 sampai 30 tahun. Jadi, berdasar penelitian ini bisa dikatakan bahwa faktor usia mempunyai hubungan terhadap pemahaman. Hal ini ternyata bisa dibuktikan melalui uji statistik dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisis hubungan variabel umur dengan variabel pemahaman, hasilnya menunjukkan bahwa variabel usia mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah pengakuan dan pengukuran produk *funding* meskipun hubungannya rendah (lihat tabel 3.5). Besarnya hubungan variabel umur dengan variabel pemahaman ini adalah sebesar 0.361.

Kelima, faktor ketiga yang mempengaruhi pemahaman adalah variabel lama bekerja di BMT. Menurut distribusi frekuensi pada tabel 4.7 diketahui bahwa penyebaran lamanya responden bekerja di institusi BMT cukup merata. Responden terbanyak bekerja di institusi BMT antara 3 sampai 5 tahun sebanyak 31.3%. Kemudian responden yang bekerja antara 1 sampai 3 tahun juga sebanyak 31.3%, responden yang bekerja antara 5 sampai 7 tahun sebanyak 10 responden (20.8%) , dan responden yang bekerja lebih dari 7 tahun sebanyak 8 responden (16.7%).

Bila variabel lamanya bekerja ini dihubungkan dengan tingkat pemahaman, tidak ditemukan adanya responden yang rendah tingkat pemahamannya. Pada kelompok responden yang bekerja antara 3 sampai dengan 5 tahun memiliki 31.3% yang berada pada tingkat pemahaman yang tinggi. Kemudian pada kelompok lama

bekerja kurang dari 3 tahun, 27.1% responden berada pada level tinggi, sedangkan 4.2% berada pada kategori sedang. Pada kelompok responden yang bekerja antara 5 sampai 7 memiliki 20.8% yang berada pada tingkat pemahaman yang tinggi, dan pada kelompok responden yang bekerja lebih dari 7 tahun sebanyak 16.7% mempunyai tingkat pemahaman tinggi.

Berdasarkan analisis hubungan variabel lama bekerja dengan variabel pemahaman, hasilnya menunjukkan bahwa variabel lama bekerja mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah pengakuan dan pengukuran produk *funding* meski hubungannya rendah. Besarnya hubungan variabel lama bekerja dengan variabel pemahaman ini adalah sebesar 0.326. Jadi, berdasar penelitian ini ternyata bisa dibuktikan melalui uji statistik mengenai hubungan faktor lama bekerja terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah pengakuan dan pengukuran produk *funding*.

Tingginya tingkat pemahaman responden pada responden yang bekerja antara 3 sampai 5 tahun mengindikasikan bahwa responden sebenarnya sudah cukup memahami dasar-dasar teori maupun praktek dari pengakuan dan pengukuran produk *funding* ini. Meskipun usianya sudah diluar masa produktif dan latar belakang pendidikannya kurang sesuai, namun bila responden sudah cukup lama mengenal BMT maka bukan tidak mungkin responden akan memahami pekerjaannya.

Keenam, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pemahaman adalah frekuensi responden mengikuti pelatihan, seminar, atau kegiatan semacam itu. Menurut distribusi frekuensi pada tabel 4.9 diketahui bahwa 43.8% responden mengikuti pelatihan sekitar 1 sampai 3 kali. Dari jumlah ini, bila frekuensi pelatihan dikaitkan dengan tingkat pemahaman maka 4.2% responden berada pada tingkat pemahaman sedang dan 39.6% berada pada tingkat pemahaman tinggi. Kemudian disusul dengan responden yang mengikuti pelatihan sekitar 4 sampai 6 kali sebanyak 33.3%, responden yang mengikuti pelatihan sekitar 7 sampai 9 kali sebanyak 10.4%, dan responden yang mengikuti pelatihan lebih dari 9 kali sebanyak 12.5% berada pada kategori tinggi. Jadi, meskipun sebanyak 39.6% responden hanya mengikuti pelatihan/seminar antara 1 sampai 3 kali, dan 33.3% responden mengikuti pelatihan/seminar antara 4 sampai 6 kali, namun tingkat pemahaman responden dalam kategori tinggi. Ditambah lagi, berdasar hasil wawancara dengan responden, sebagian besar mengetahui keberadaan PSAK 59 karena mengikuti pelatihan atau seminar.

Berdasarkan analisis hubungan variabel frekuensi mengikuti pelatihan terhadap variabel pemahaman, hasilnya menunjukkan bahwa variabel frekuensi mengikuti pelatihan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah pengakuan dan pengukuran produk *funding* meskipun hubungannya rendah. Besarnya hubungan variabel frekuensi mengikuti pelatihan dengan variabel pemahaman ini adalah sebesar

0.319. Jadi, berdasar penelitian ini ternyata bisa dibuktikan melalui uji statistik mengenai hubungan antara variabel frekuensi mengikuti pelatihan terhadap pemahaman.

Ketujuh, dari jawaban-jawaban responden terhadap butir-butir pertanyaan dalam angket, secara umum responden mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi. Hal ini dapat dimungkinkan karena pada dasarnya teori-teori tentang produk tabungan *mudārabah* dan tabungan *wadiah* sudah dikenal dengan baik.

Namun demikian, berdasarkan hasil dari angket ini pula ada beberapa hal yang cukup menarik untuk dicermati. Atas dasar jawaban responden, seperti terlihat dari tabel 4.16 pada subbab diatas, meskipun tingkat pemahaman praktisi BMT pada PSAK No. 59 tersebut pada kategori tinggi yaitu 95.8% (lihat tabel 4.11) namun hanya 62.5% yang setuju bahwa standar akuntansi yang sesuai untuk BMT adalah PSAK No. 59. Sedangkan sisanya menganggap PSAK 59 tidak sesuai untuk BMT. Hal ini patut menjadi perhatian, karena di satu sisi mereka cukup paham terhadap PSAK 59 namun di sisi lain mereka kurang setuju dengan penerapan PSAK 59 di BMT. Hal ini bisa terjadi, sangat dimungkinkan karena belum tersosialisasikannya PSAK 59 ke pengelola BMT tersebut, sehingga meskipun mereka cukup paham namun karena belum ada *political will* dari pengelola. Dari sini tergambar bahwa keberadaan PSAK 59 tersebut masih membutuhkan proses panjang untuk sampai ke implementasinya.

Sedangkan pada pertanyaan skala pemahaman nomor 8 seperti yang sudah disebutkan pada tabel 4.17 mengenai perbedaan antara tabungan dengan giro, 77.1% responden menjawab dengan tepat. Sedangkan sisanya, 23% responden tidak menjawab dengan tepat. Dari tabel tersebut jelas terlihat bahwa ternyata masih cukup banyak responden yang belum memahami perbedaan antara tabungan dengan giro, yaitu sekitar 23%. Hal ini haruslah dicermati mengingat BMT merupakan sebuah lembaga keuangan sehingga praktisi-praktisinya selayaknya mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai yang hal-hal berkaitan dengan lembaga keuangan (terutama yang bersifat umum). Tujuannya adalah agar praktisi dapat memberikan informasi yang tidak menyesatkan kepada nasabah khususnya, dan masyarakat umumnya.

Selanjutnya, pada butir pertanyaan nomor 13 seperti tersebut pada tabel 4.18 (mengenai kasus misalkan BMT membayarkan bonus kepada nasabah), disana disebutkan bahwa hanya 20.8% responden yang dapat menjawab dengan tepat, sedangkan 79.2%nya tidak tepat menjawab. Sepertinya para praktisi BMT belum mengetahui/memahami bahwa menurut PSAK 59, bonus yang dibayarkan kepada nasabah dikenakan pajak penghasilan sebesar 15%. Jadi misalkan bonus yang akan dibayarkankan adalah Rp 40.000,- maka jumlah bonus yang diterimakan kepada nasabah adalah Rp 36.000,-. Sedangkan Rp 6.000,- merupakan kewajiban pajak penghasilan. Oleh karenanya perlu ada sosialisasi tambahan khususnya mengenai perpajakan di institusi keuangan.

Kedelapan, atas dasar uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel bebas yang dipakai dalam penelitian ini yaitu umur,

lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemahaman responden terhadap PSAK No. 59 produk *funding*. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan “ada hubungan antara umur, lamanya bekerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah pengakuan dan pengukuran produk *funding*”, atas dasar hasil uji statistik tersebut, maka hipotesis tersebut diterima.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

Pertama, responden yang merupakan praktisi BMT anggota Puskopsyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari manajer dan staf akuntansinya, pada umumnya mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi terhadap pengakuan dan pengukuran produk *funding* PSAK No. 59. Berdasarkan hasil angket yang disebarkan, responden yang berada pada kategori tinggi ini mencapai 95.8%, sedangkan sisanya 4.2% berada pada kategori sedang.

Namun demikian, terkait dengan realitas ini, tingginya tingkat pemahaman responden ini tersebut ternyata belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktek. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara, observasi dan juga hasil dari beberapa pertanyaan dalam angket yang berbentuk contoh kasus, diketahui bahwa 45% responden masih belum mengimplementasikan PSAK No. 59 di institusinya, sedangkan 30%nya masih dalam proses.

Kedua, berdasarkan hasil dari uji analisis hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, ternyata antara variabel usia, lama kerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan mempunyai hubungan dengan tingginya tingkat pemahaman responden. Berdasarkan uji statistik koefisien korelasi ganda hasilnya menunjukkan bahwa dari semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel usia, lama kerja, latar belakang pendidikan, dan frekuensi mengikuti pelatihan, terhadap variabel pemahaman, secara bersama-sama mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemahaman praktisi BMT terhadap PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah pengakuan dan pengukuran *produk funding*. Sedangkan berdasarkan analisis korelasi parsial, variabel bebas yang mempunyai hubungan paling erat terhadap pemahaman adalah latar belakang pendidikan (0.401), kemudian disusul faktor usia (0.361), lama bekerja (0.326) dan frekuensi mengikuti pelatihan (0.319).

B. Saran-saran

Pertama, pemerintah melalui departemen terkait perlu mengadakan sosialisasi ke BMT-BMT mengenai akuntansi syari'ah umumnya dan PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah khususnya secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk lebih memaksimalkan pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan pemahaman pengelola BMT terutama praktisi akuntansinya.

Kedua, Bank Indonesia bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia perlu menjembatani kesamaan kepentingan akan penggunaan standar akuntansi syari'ah

yang sama dengan menambahkan beberapa klausul dalam *scope* penerapan PSAK No. 59, sehingga lembaga keuangan maupun non keuangan yang berlandaskan syari'ah yang memiliki *underlying transaction* yang sama juga dapat mengacu pada PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syari'ah. Dengan demikian organisasi yang menggunakan transaksi sejenis termasuk BMT tidak akan ragu-ragu lagi untuk menerapkan PSAK No. 59 di institusinya.

C. Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi

Sebagaimana yang sudah disebutkan pada pembatasan masalah, sudah tentu penelitian ini mempunyai keterbatasan. Oleh karenanya penulis memberikan rekomendasi untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Pemahaman Praktisi BMT Terhadap PSAK No. 59 Produk *Financing*.
2. Implementasi Akuntansi Syari'ah (PSAK No. 59) Pada BMT Di Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Akhyar. **"Kritik atas Konsep Akuntansi Keuangan Lembaga Syari'ah Mikro"**. Workshop Merancang Format Akuntansi Keuangan Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Hotel Inna Garuda-Yogyakarta tanggal 9-12 Agustus 2004 oleh Pusat Pengembangan Ekonomi (PPE) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Hidayatul Muamalah Wonogiri.
- Adnan, Akhyar dkk. 2005. **Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Ekonomi Islam (Perspektif Lembaga Keuangan Syari'ah di DIY)**. Laporan Penelitian. MSI UII.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. **Bank Syariah Dari Teori ke Praktik**. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 1990. **Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 1986. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Cetakan III. Jakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi III**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Blomm, Benjamin, S. et.al. 1961. **Evaluation to Improve Learning**. Sydney: Prentice Hall of Australia Pty Ltd.
- Budiningsih, Asri. 2004. **Belajar dan Pembelajaran**. Modul. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Davies, Ivor, K. 1987. **Pengelolaan Belajar** (Terjemahan Sudarsono S, dkk). Jakarta: Rajawali dan PAU-UT.
- Degeng, I.N.S. 1989. **Ilmu Pengajaran: Taksonomi Variabel**. Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti, P2LPTK.
- Dimyati dan Mudjiono. 2002. **Belajar dan Pembelajaran**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faisal, Sanapiah. 2005. **Format-format Penelitian Sosial**. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

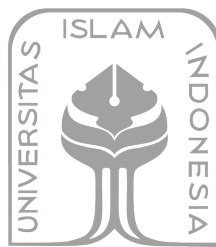
- Halim, Abdul. 2003. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Edisi 3. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Harahap, Sofyan Syafri. 1999. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Kritik terhadap PSAK Perbankan Syari'ah LAI dan AAOIFI*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi. Volume 1 No. 3. Desember 2001.
- Hasan, Iqbal. 2005. *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, Iqbal. 2005. *Pokok-pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Horngren, Charles T. 1996. *Accounting 3th Edition*. Alih Bahasa Thomas H. Secokusumo. *Pengantar Akuntansi (Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2003. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Akuntansi Perbankan Syari'ah*.
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Institute of Islamic Banking and Insurance. 1994. *Accounting Issues in Islamic Banking*. London.
- Makmun, Abin Syamsudin. 2005. *Psikologi Pendidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Meidawati, Neni. *Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Volume 2 No.2, 1998.
- Moloeng, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2000. *Prinsip-prinsip Akuntansi Dalam Al-Quran*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Edisi 2 (Revisi). Jakarta: Salemba Empat.

- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2000. *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ratmono, Dwi. *Pengungkapan Islamic Values Dalam Pelaporan Keuangan Bank Syari'ah Paradigma Akuntansi Syari'ah Filosofis Teoritis dan PSAK 59*. Makalah. Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam II. Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Universitas Brawijaya Malang, 28-29 Mei 2004.
- Rosjidan dkk. 2001. *Belajar dan Pembelajaran*. Malang, FIP Universitas Negeri Malang.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*. Yogyakarta, UII Press.
- Sigit, Soehardi. 1999. *Pengantar Metodologi Penelitian untuk Sosial Bisnis Manajemen*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed). 1998. *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta: LP3ES.
- Slameto. 1988. *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Syah, Muhibbin. 1997. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rodakarya.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 2. Cet. 9. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (IAI). 2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syari'ah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Volume 1 No.1. Mei 1997.

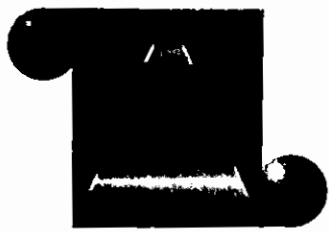
- Triyuwono, Iwan. *Metafora Zakat dan Shari'ah Enpterpise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Voleme 5 No. 2. Desember 2001.
- Triyuwono, Iwan dan As'udi Moh. 2001. *Akuntansi Syari'ah Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Triyuwono, Iwan. *Kritik atas Konsep Teori yang Digunakan dalam Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Makalah. Seminar dan Musyawarah FOSSEI Forum Studi dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 23 Juli 2002.
- Umar, Husein. 1998. *Riset Akuntansi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Husaini dan R. Purnomo Setiady Akbar. 1995. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utami, Nur Fitri. 2003. *Penerapan Akuntansi Syari'ah Produk Jual Beli Murabahah di BPRS Margirizki Bahagia*. Skripsi. Yogyakarta: STIS.
- Warren, Carl S. et. al. 2005. *Accounting 21th Edition*. Alih Bahasa. Aria Farahmita, dkk. *Pengantar Akuntansi Edisi 21*. Buku 1. Jakarta: Salembat Empat.
- Widodo, Hertanto. 2000. *Pedoman Akuntansi Syariat Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil*. Bandung: Mizan.
- Yaya, Rizal. *Mengkritisi Konsep Akuntansi Keuangan Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Workshop Merancang Format Akuntansi Keuangan Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Hotel Inna Garuda-Yogyakarta tanggal 9-12 Agustus 2004 oleh Pusat Pengembangan Ekonomi (PPE) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Hidayatul Muamalah Wonogiri.
- Yeni, Nofriza. 2004. *Pengaruh Perbedaan Latar Belakang Pendidikan Karyawan Terhadap Perkembangan BMT Jaringan Muamalat Center Indonesia Wilayah Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Agama Islam Jurusan Muamalat Konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

//www.msi_uui.net.id

//www.republika.co.id.



LAMPIRAN-LAMPIRAN
UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PUSAT KOPERASI SYARIAH (PUSKOPSYAH) BMT MITRA NUGRAHA

Jl. Kebun Raya, Gg. Karangsari No. 286 Yogyakarta 55171 Telp./Fax. (0274) 417122

No. : 071/Puskopsyah BMT-Mitha/SP/VIII/06
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Ykh.
Manager BMT Anggota Puskopsyah
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita semua. Ehalawat dan Salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan rencana penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah berupa Tesis, yang dilakukan oleh:

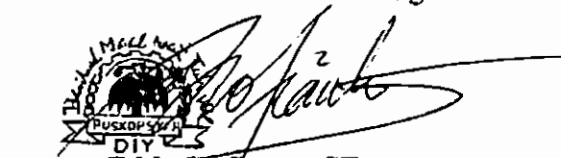
Nama : **Eny Iroh Hayati**
NIM : 04913009
Perguruan Tinggi : **MAGISTER STUDI ISLAM**
Universitas Islam Indonesia
Konsentrasi : **Ekonomi Islam**
Alamat : **Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II**
Yogyakarta. 55281
Judul Tesis : **"Pemahaman Praktisi BMT di Yogyakarta Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Akuntansi Perbankan Syari'ah Produk Funding"**

dengan ini dimohon perkenan dari BMT anggota Puskopsyah BMT Mitra Nugraha untuk memberi data / keterangan yang diperlukan oleh yang bersangkutan.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 29 Agustus 2006
PUSKOPSYAH BMT Mitra Nugraha


Eddy Nofianto, SE.
MANAGER



PUSAT KOPERASI SYARIAH (PUSKOPSYAH) BMT MITRA NUGRAHA

Jl. Kebun Raya, Gg. Karangsari No. 286 Yogyakarta 55171 Telp./Fax. (0274) 417122

SURAT KETERANGAN

No : 009/Puskopsyah Bmt-Mitha/II/07

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Enny Iroh Hayati**
N I M : 04913009
Program Studi : **MAGISTER STUDI ISLAM**
Universitas Islam Indonesia
Konsentrasi : **Ekonomi Islam.**

Adalah mahasiswa **MAGISTER STUDI ISLAM** Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penelitian pada BMT anggota Puskopsyah BMT Mitra Nugraha dalam rangka penyusunan tesis dengan judul : **"Pemahaman Praktisi BMT di Yogyakarta Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Akuntansi Perbankan Syari'ah Produk Funding"** dan telah menyelesaikan kegiatan dimaksud.

Demikianlah keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 13 Februari 2007

PUSKOPSYAH BMT Mitra Nugraha


Eddy Nofianto, SE
MANAJER

**DAFTAR NAMA DAN ALAMAT BMT ANGGOTA
PUSKOPSYAH BMT "MITRA NUGRAHA"
YOGYAKARTA**

NO	NAMA BMT	ALAMAT	NO TELPON
KABUPATEN SLEMAN			
1	Agawe Makmur	Jl. Agrowisata Km. 1, Murangan, Triharjo, Sleman	867843
2	Al-Ikhwan	Jl. Flamboyan 383 Perumnas Condong Catur, Depok, Sleman	7449134
3	Amanah	Jl. Monumen Jogja Kembali No. 12 Mlati, Sleman	624925
4	Artha Mulia Insani	Kompleks Masjid Baitul Hidayah, Adisucipto, Maguwoharjo, Sleman	523677
5	BIF Sleman	Jl. Wonosari Km. 9 Tegalsari, Sendang Tirto, Berbah, Sleman	0817272890
6	Bina Sparta	Jl. Perumnas Condong Catur No. C 03 Sleman	7485993
7	Bina Ummah	Jl. JAE Jumanitoto No. 24 Godean, Sleman	798868
8	Bina Usaha Sejahtera	Jl. Solo, Kradenan No. 62 Maguwoharjo, Depok, Sleman	7481620
9	Budi Mulia	Jl. Piyungan Km. 1 Bokoharjo, Prambanan, Sleman	497988
10	Dana Syari'ah (Pakem)	Jl. Kaliurang Km. 17, Pakem, Sleman	895272
11	Djaja Wira Adhi Insani	Jl. Prambanan-Piyungan, Madubaru, Sleman	496744
12	Ghifari	Jl. Laksda Adisucipto, Ambarukmo No. 243 CT, Depok, Sleman	7427245
13	Insan Mandiri	Jl. Magelang Km. 14 Murangan, Triharjo, Sleman	865223
14	Jami' Insan Mulia	Jl. Prambanan-Piyungan Km. 5, Madubaru, Sleman	4398502 / 7800642
15	KUBE Sejahtera 017	Jl. Jambon Km. 2 Trihanggo, Gamping, Sleman	7408829
16	KUBE Sejahtera 018	Jl. Godean, Patran Rt 01/Rw 01 Banyuraden Gamping Sleman	08175466651
17	KUBE Sejahtera 019	Jl. Magelang Km. 7,5 Sendangadi, Mlati, Sleman	08157990951

18	KUBE Sejahtera 020	Jl. Kebon Agung Km. 3,5 Toragan, Tlogoadi, Mlati, Sleman	865110
19	Mandiri	Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 10 Rejodani, Ngaglik, Sleman	865110
20	Mitra Surya	Jl. Yogya-Solo Km.14, Kios Pasar Kalasan, Sleman	7480118
21	Mitra Muamallah	Jl. Wates, Ambarketawang, Gamping tengah, Gamping, Sleman	7453587
22	Mitra Reksa Bakti	Jl. Pakem-Turi, Purwibinangun, Pakem, Sleman	7496898
23	Mitra Sembada	Pasar Ngijon, Minggir, Sleman	7490772
24	Mitra Usaha Insani	Jl. Kaliurang Km. 10 Gentan, Sleman	883946
25	Mitra Usaha Mulia	Jl. Turi Km. 01, Pasar Tempel, Sleman	865403
26	Mitra Usaha Ummat	Jangkar, Wedomartani, Ngemplak, Sleman	7491477
27	Mlati Sejahtera	Jl. Gajah Mada Km. 1, Sendari, tirtoadi, Mlati, Sleman	7130438
28	Prima Artha	Kompleks Pasar Ngino, Seyegan, Sleman	08882743780
29	Reja Mulya	Ruko 12 Pasar Sidorejo Baru, Selomartani, Kalasan, Sleman	4395634
30	Rizky Amanah	Jl. Solo, Bogem, Kalasan, Sleman	08122776159
31	Rizky Mandiri	Jl. Palagan Tentara Pelajar No. 63, Mlati, Sleman	884923
32	Surya Amanah	Jl. Kaliurang Km. 6 Pasar Kolombo, Depok, Sleman	886294
33	USP Al Barokah	Ngepos, Lumbungrejo, Tempel, Sleman	7141875
KOTA YOGYAKARTA			
1	Al-Ikhlas	Jl. Herman Yohanes 103 E, Sagan, Yogyakarta	580992 / 558010
2	Amratani Sejahtera	Jl. Hayam Wuruk No. 68 Lempuyangan, Yogyakarta	562134
3	Bangun Rakyat Sejahtera	Jl. Timoho 2, Gg. Delima No. 2 Yogyakarta	7492205
4	Barokah Padi Melati	Jl. Bugisan No. 21 Patangpuluhan, Yogyakarta	413850
5	BIF Nitikan	Jl. Sorogenen 116B Nitikan, Yogyakarta	08157877334
6	Bina Ikhsanul Fikri	Jl. Semangu No. 2B, Gedongkuning, Yogyakarta	387860
7	Bina Martabat Insani	Jl. Tritunggal No. 9, Sorosutan, UH Yogyakarta	389200

8	Dana Syari'ah (Giwangan)	Jl. Pemukti Selatan No. 7, Mrican, UH Yogyakarta	
9	DD Beringharjo	Jl. Kauman No. 14 Yogyakarta	373075
10	Dhuafa Makmur	Jl. Lowanu UH IV/20, Sorosutan UH Yogyakarta	7440826
11	Hamfara Artha Investama	Jl. Parangtritis No. 44-46 Yogyakarta	7414257
12	Jogjatama	Jl. Nyi Ahmad Dahlan No. 5 Yogyakarta	374051
13	Khitoh Insani	Jl. P. Diponegoro, Pasar Kranggan Lt. 2 Kios 45 Yk	7484894
14	Multazam	Jl. Sultan Agung No. 33 Yogyakarta	562686
15	Natura	Jl. Sukonandi I, No. 2, Yogyakarta	518033
16	Sunan Kalijaga	Jl. Imogiri Tinur No. 217, Giwangan UH Yogyakarta	7482119
17	Surya Asa Artha	Jl. Sosro Dipuran GT 1/415 Gedongtengen, Yogyakarta	583206
18	Tamzis	Jl. Mondorakan No. 35 Kotagede, Yogyakarta	7408551
KABUPATEN BANTUL			
1	Al-Muthi'in	Jl. Cendrawasih Rt 14/17, Maguwo, Banguntapan, Bantul	444382
2	Artha Amanah	Sanden, Murtigading, Sanden, Bantul	7483724
3	As-Salam	Jl. Sorowajan No. 136 Banguntapan, Bantul	08562877859
4	Barokah	Jl. Imogiri, Blawong Trimulyo, Jetis, Bantul	7412043
5	Dana Insani	Jl. Bantul Km. 6,8 Pasar Niten, Bantul	08562878914
6	Dana Syariah (Piyungan)	Jl. Wonosari Km. 14 Trimulyo, Piyungan, Bantul	7498717
7	Insan Sadar Usaha	Jl. Flamboyan No. 232 Krapyak Kulon, Sewon, Bantul	081578178973
8	Jureng	Jl. Dewi Sri 11, Tegal Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	376481
9	Mitra Loh Jinawi	Jl. WR Supratman No. 129 Gandekan, Bantul	7497490
10	Mitra Usaha Ummat	Jl. Wonosari, Srimulyo (Barat Polsek) Bantul	7453908
11	Mitrarna	Jl. Srandakan Km. 9 Pasar Mangiran, Bantul	

12	Sakagiri	Salaman, Karangtalun, Imogiri, Bantul	753044
13	Syirkah Baitu Rizqina	Jl. Pasarean No. 4A, Kota Gede, Banguntapan Bantul	371198
KABUPATEN KULON PROGO			
1	Amanah	Jl. Dekso-Muntilan, Banjararum, Kalibawang, KP	7445717
2	Amratani Sentosa	Ruko Pasar Gawok No. 76 Wates, KP	08121562845
3	Arafah	Serang, Sendangsari, Pengasih, KP	8122744477
4	Bangun Insani	Jl. Sutijab No. 19, Wates, KP	778279
5	Bina Sejahtera	Kasihani I, Ngentakrejo, Lendah, KP	7100167
6	Dana Mandiri	Jl. Sutijab No. 49, Wates, KP	08122744477
7	Dana Sejahtera	Jl. Raya Brosot No. 30, Brosot, Galur, Kulon Progo	7476640
8	Graha Artha Muamallat	Pasar Bendungan, Wates, KP	7496772
9	Karomah	Jl. Yogya-Purworejo Km. 40 Temon Kulon, Temon, KP	778536
10	Surya Parama Artha	Jl. Wates Sentolo, Kulon Progo	6472064
KAB. GUNUNG KIDUL			
1	Dana Insani	Jl. Tentara Pelajar 40, Trimulto II, Kepek, Wonosari, GK	7435726 / 7159276
2	Kartika	Banteng Wareng, Tancep, Ngawen, GK	081329582897
3	Mitra Amratani	Jl. Sugiyo Pranoto 35, Baleharjo, Wonosari, GK	0817467314
4	Mubarook	Pasar Argosari No. 33, Wonosari, GK	7469415
5	Rizky Muamallah	Playen I, Playen, GK	7498707
6	Sumber Rejeki	Jl. Ngawen-Nglipar Km. 1 Kampung Ngawen, GK	081328445895

Reliability

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

PE.PRA Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
PE.PRA1	71.4375	17.9535	.4675	.8304
PE.PRA2	71.4375	17.9535	.4675	.8304
PE.PRA3	71.9583	15.4450	.4139	.8348
PE.PRA4	71.4375	17.9535	.4675	.8304
PE.PRA5	71.5833	16.1206	.5172	.8225
PE.PRA6	71.4375	17.8684	.5383	.8294
PE.PRA7	71.7500	16.1064	.3758	.8333
PE.PRA8	71.6875	16.6449	.3694	.8305
PE.PRA9	71.7500	14.6596	.5754	.8218
PE.PRA10	71.4375	17.9535	.4675	.8304
PE.PRA11	71.4375	17.8684	.5383	.8294
PE.PRA12	71.4583	17.7855	.4226	.8296
PE.PRA13	72.2083	17.2323	.3361	.8305
PE.PRA14	71.4375	17.9535	.4675	.8304
PE.PRA15	71.4375	17.8684	.5383	.8294
PE.PRA16	71.6250	15.6011	.5257	.8227
PE.PRA17	71.5000	17.2766	.5131	.8256
PE.PRA18	71.4375	17.9535	.4675	.8304
PE.PRA19	71.4375	17.8684	.5383	.8294
PE.PRA20	71.5833	17.1418	.4048	.8278
PE.PRA21	71.4375	17.9535	.4675	.8304
PE.PRA22	71.4583	17.8706	.3718	.8306
PE.PRA23	71.5833	16.7163	.4115	.8277
PE.PRA24	71.5000	17.5319	.4002	.8288
PE.PRA25	71.4583	17.8280	.3972	.8301
PE.PRA26	71.5000	17.6596	.3444	.8303

Reliability Coefficients

N of Cases = 48.0

N of Items = 26

Alpha = .8347

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59	74.42	4.307	48
X1 Usia	1.56	.681	48
X2 Lama Bekerja di BMT	2.23	1.077	48
X3 Latar Belakang Pendidikan	2.48	.825	48
X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan	1.92	1.028	48

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan , X3 Latar Belakang Pendidikan, X1 Usia, X2 Lama Bekerja di BMT		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682 ^a	.466	.416	3.291

a. Predictors: (Constant), X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan , X3 Latar Belakang Pendidikan, X1 Usia, X2 Lama Bekerja di BMT

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	405.902	4	101.475	9.368	.000 ^a
	Residual	465.765	43	10.832		
	Total	871.667	47			

a. Predictors: (Constant), X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan , X3 Latar Belakang Pendidikan, X1 Usia, X2 Lama Bekerja di BMT

b. Dependent Variable: Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	62.695	2.068		30.319	.000
	X1 Usia	1.940	.765	.307	2.536	.015
	X2 Lama Bekerja di BMT	1.108	.490	.277	2.263	.029
	X3 Latar Belakang Pendidikan	1.688	.589	.323	2.866	.006
	X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan	1.061	.480	.253	2.209	.033



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Coefficients^a

Model		Correlations		
		Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)			
	X1 Usia	.419	.361	.283
	X2 Lama Bekerja di BMT	.465	.326	.252
	X3 Latar Belakang Pendidikan	.344	.401	.320
	X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan	.383	.319	.246

a. Dependent Variable: Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59



UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

Case Summaries

	X1 Usia	X2 Lama Bekerja di BMT	X3 Latar Belakang Pendidikan	X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan	Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59
1	2	2	3	2	66
2	1	1	1	1	71
3	1	3	3	3	77
4	1	3	3	3	74
5	2	4	3	1	75
6	2	3	2	2	77
7	1	3	3	4	75
8	1	3	3	2	77
9	2	4	3	2	77
10	1	1	3	2	74
11	4	2	2	1	78
12	1	3	3	1	77
13	2	4	2	4	77
14	1	2	3	1	75
15	2	4	2	3	77
16	1	2	2	2	74
17	2	1	3	3	78
18	1	1	3	1	71
19	1	1	3	1	74
20	1	2	1	1	72
21	1	1	1	1	60
22	2	3	3	2	77
23	3	4	1	2	78
24	1	1	3	1	74
25	1	1	1	3	72
26	1	2	1	2	73
27	2	1	4	4	78
28	1	1	3	1	65
29	2	2	3	2	76
30	1	2	3	1	74
31	2	4	3	4	78
32	2	4	3	1	78
33	1	2	2	1	73
34	1	2	3	1	75
35	2	2	3	2	75
36	2	3	1	2	75
37	2	3	3	1	75
38	1	1	1	1	58
39	3	2	1	2	78
40	1	1	2	1	73
41	2	1	3	1	75
42	1	1	3	1	74

Case Summaries

		X1 Usia	X2 Lama Bekerja di BMT	X3 Latar Belakang Pendidikan	X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan	Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59
43		2	2	3	2	76
44		2	2	3	2	76
45		1	3	3	2	77
46		1	1	3	4	78
47		2	4	3	1	77
48		2	2	2	4	78
Total	N	48	48	48	48	48



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Case Summaries

	PE.P RA1	PE.P RA2	PE.P RA3	PE.P RA4	PE.P RA5	PE.P RA6	PE.P RA7	PE.P RA8	PE.P RA9	PE.P RA10
1	3	3	2	3	2	3	1	2	1	3
2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
5	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	3	3	1	3	3	3	3	2	3	3
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	3	3	2	3	3	3	3	1	3	3
19	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
20	3	3	2	3	3	3	1	3	3	3
21	2	2	1	2	3	3	2	3	1	2
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	3	3	2	3	1	3	3	2	3	3
26	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	3	3	2	3	1	3	2	2	1	3
29	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	3	3	2	3	3	3	1	3	3	3
34	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3
35	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
37	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3
38	3	3	1	3	1	2	2	2	1	3
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	3	3	1	3	3	3	3	1	3	3
41	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3
42	3	3	1	3	3	3	3	2	3	3
43	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3

Case Summaries

		PE.P RA1	PE.P RA2	PE.P RA3	PE.P RA4	PE.P RA5	PE.P RA6	PE.P RA7	PE.P RA8	PE.P RA9	PE.P RA10
44		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
47		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
48		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Total	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Case Summaries

	PE.P RA11	PE.P RA12	PE.P RA13	PE.P RA14	PE.P RA15	PE.P RA16	PE.P RA17	PE.P RA18	PE.P RA19	PE.P RA20
1	3	3	2	3	3	1	3	3	3	2
2	3	3	2	3	3	1	3	3	3	3
3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
5	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
6	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
8	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
9	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
10	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
14	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2
15	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
16	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2
19	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3
20	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3
21	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3
22	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2
25	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
26	3	3	2	3	3	1	3	3	3	3
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	3	3	2	3	3	1	3	3	3	2
29	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
30	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
34	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
35	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
36	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
37	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
38	2	2	2	3	2	1	2	3	2	2
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
41	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
42	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
43	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3

Case Summaries

		PE.P RA11	PE.P RA12	PE.P RA13	PE.P RA14	PE.P RA15	PE.P RA16	PE.P RA17	PE.P RA18	PE.P RA19	PE.P RA20
44		3	3	2	3	3	3	3	3	3	2
45		3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
46		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
47		3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
48		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Total	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Case Summaries

	PE.P RA21	PE.P RA22	PE.P RA23	PE.P RA24	PE.P RA25	PE.P RA26
1	3	3	2	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	1	3	3	3
5	3	3	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3
8	3	3	3	3	3	3
9	3	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3	3
11	3	3	3	3	3	3
12	3	3	3	3	3	3
13	3	3	3	3	3	3
14	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	2	2
19	3	3	3	2	3	3
20	3	3	3	3	3	2
21	2	3	2	2	3	2
22	3	3	3	3	3	3
23	3	3	3	3	3	3
24	3	2	3	3	3	3
25	3	3	3	3	3	2
26	3	3	3	3	3	3
27	3	3	3	3	3	3
28	3	3	2	2	3	3
29	3	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3	3
33	3	3	3	2	3	3
34	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3
36	3	3	1	3	3	3
37	3	3	3	3	3	3
38	3	2	2	3	3	3
39	3	3	3	3	3	3
40	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3	3
43	3	3	3	3	3	3

Case Summaries

		PE.P RA21	PE.P RA22	PE.P RA23	PE.P RA24	PE.P RA25	PE.P RA26
44		3	3	3	3	3	3
45		3	3	3	3	3	3
46		3	3	3	3	3	3
47		3	3	3	3	3	3
48		3	3	3	3	3	3
Total	N	48	48	48	48	48	48



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

tabel r

1 tail	0.01	0.05	0.15	0.3
1	0.985	0.929	0.814	0.649
2	0.881	0.770	0.640	0.486
3	0.776	0.663	0.542	0.404
4	0.695	0.590	0.479	0.353
5	0.634	0.536	0.433	0.317
6	0.586	0.495	0.399	0.290
7	0.548	0.462	0.371	0.270
8	0.516	0.434	0.349	0.253
9	0.489	0.411	0.330	0.237
10	0.465	0.392	0.314	0.227
11	0.445	0.375	0.300	0.216
12	0.427	0.360	0.288	0.207
13	0.411	0.346	0.277	0.199
14	0.397	0.334	0.267	0.192
15	0.384	0.323	0.258	0.186
16	0.373	0.313	0.250	0.180
17	0.362	0.305	0.243	0.175
18	0.352	0.296	0.237	0.170
19	0.343	0.289	0.230	0.165
20	0.335	0.282	0.225	0.161
21	0.327	0.275	0.219	0.157
22	0.320	0.269	0.214	0.154
23	0.313	0.263	0.210	0.150
24	0.307	0.258	0.206	0.147
25	0.301	0.253	0.201	0.144
26	0.295	0.248	0.198	0.141
27	0.290	0.244	0.194	0.139
28	0.285	0.239	0.191	0.136
29	0.280	0.235	0.187	0.134
30	0.275	0.231	0.184	0.132
31	0.271	0.228	0.177	0.130
32	0.268	0.225	0.170	0.128
33	0.264	0.222	0.163	0.127
34	0.261	0.219	0.156	0.125
35	0.257	0.215	0.149	0.123
36	0.253	0.213	0.142	0.121
37	0.250	0.210	0.135	0.119
38	0.246	0.207	0.128	0.118
39	0.243	0.204	0.121	0.116
40	0.239	0.201	0.114	0.114
41	0.237	0.199	0.113	0.113
42	0.235	0.197	0.112	0.112
43	0.233	0.196	0.111	0.111
44	0.230	0.194	0.110	0.110
45	0.228	0.192	0.109	0.109
46	0.226	0.191	0.108	0.108
47	0.224	0.188	0.107	0.107
48	0.222	0.187	0.106	0.106
49	0.220	0.185	0.105	0.105
50	0.218	0.183	0.104	0.104

sumber : Magic 2000 Solver telp (0274) 523858

tabel t

1-tail	0.005	0.01	0.025	0.05
2-tail	0.01	0.02	0.05	0.1
1	63.657	31.821	12.706	6.314
2	9.925	6.965	4.303	2.920
3	5.841	4.541	3.182	2.353
4	4.604	3.747	2.776	2.132
5	4.032	3.365	2.571	2.015
6	3.707	3.143	2.447	1.943
7	3.499	2.998	2.365	1.895
8	3.355	2.896	2.306	1.860
9	3.250	2.821	2.262	1.833
10	3.169	2.764	2.228	1.812
11	3.106	2.718	2.201	1.796
12	3.055	2.681	2.179	1.782
13	3.012	2.650	2.160	1.771
14	2.977	2.624	2.145	1.761
15	2.947	2.602	2.131	1.753
16	2.921	2.583	2.120	1.746
17	2.898	2.567	2.110	1.740
18	2.876	2.552	2.101	1.734
19	2.861	2.539	2.093	1.729
20	2.845	2.528	2.086	1.725
21	2.831	2.518	2.080	1.721
22	2.819	2.508	2.074	1.717
23	2.807	2.500	2.069	1.714
24	2.797	2.492	2.064	1.711
25	2.787	2.485	2.060	1.708
26	2.779	2.479	2.056	1.706
27	2.771	2.473	2.052	1.703
28	2.763	2.467	2.048	1.701
29	2.756	2.462	2.045	1.699
30	2.750	2.457	2.042	1.697
31	2.744	2.453	2.040	1.696
32	2.738	2.449	2.037	1.694
33	2.733	2.445	2.035	1.692
34	2.728	2.441	2.032	1.691
35	2.724	2.438	2.030	1.690
36	2.719	2.434	2.028	1.688
37	2.715	2.431	2.026	1.687
38	2.712	2.429	2.024	1.686
39	2.708	2.426	2.023	1.685
40	2.704	2.423	2.021	1.684
41	2.701	2.421	2.020	1.683
42	2.698	2.418	2.018	1.682
43	2.695	2.416	2.017	1.681
44	2.692	2.414	2.015	1.680
45	2.690	2.412	2.014	1.679
46	2.687	2.410	2.013	1.679
47	2.685	2.408	2.012	1.678
48	2.682	2.407	2.011	1.677
49	2.680	2.405	2.010	1.677
50	2.678	2.403	2.009	1.676

sumber : Magic 2000 Solver telp (0274) 52385P



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

tabel F

5%

df	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	161.448	199.500	215.707	224.583	230.162	233.986	236.768	238.883	240.543
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371	19.385
3	10.128	9.552	9.277	9.117	9.013	8.941	8.887	8.845	8.812
4	7.709	6.941	6.591	6.388	6.256	6.163	6.094	6.041	5.999
5	6.608	5.780	5.409	5.192	5.050	4.950	4.876	4.818	4.772
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387	4.284	4.207	4.147	4.099
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972	3.866	3.787	3.726	3.677
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.687	3.581	3.500	3.438	3.388
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482	3.374	3.293	3.230	3.179
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326	3.217	3.135	3.072	3.020
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204	3.095	3.012	2.948	2.896
12	4.747	3.885	3.490	3.259	3.106	2.996	2.913	2.849	2.796
13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025	2.915	2.832	2.767	2.714
14	4.600	3.739	3.344	3.112	2.958	2.848	2.764	2.699	2.646
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901	2.790	2.707	2.641	2.588
16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852	2.741	2.657	2.591	2.538
17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.810	2.699	2.614	2.548	2.494
18	4.414	3.555	3.160	2.928	2.773	2.661	2.577	2.510	2.456
19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.740	2.628	2.544	2.477	2.423
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711	2.599	2.514	2.447	2.393
21	4.325	3.467	3.072	2.840	2.685	2.573	2.488	2.420	2.366
22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661	2.549	2.464	2.397	2.342
23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.640	2.528	2.442	2.375	2.320
24	4.260	3.403	3.009	2.776	2.621	2.508	2.423	2.355	2.300
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603	2.490	2.405	2.337	2.282
26	4.225	3.369	2.975	2.743	2.587	2.474	2.388	2.321	2.265
27	4.210	3.354	2.960	2.728	2.572	2.459	2.373	2.305	2.250
28	4.196	3.340	2.947	2.714	2.558	2.445	2.359	2.291	2.236
29	4.183	3.328	2.934	2.701	2.545	2.432	2.346	2.278	2.223
30	4.171	3.316	2.922	2.690	2.534	2.421	2.334	2.266	2.211
31	4.160	3.305	2.911	2.679	2.523	2.409	2.323	2.255	2.199
32	4.149	3.295	2.901	2.668	2.512	2.399	2.313	2.244	2.189
33	4.139	3.285	2.892	2.659	2.503	2.389	2.303	2.235	2.179
34	4.130	3.276	2.883	2.650	2.494	2.380	2.294	2.225	2.170
35	4.121	3.267	2.874	2.641	2.485	2.372	2.285	2.217	2.161
36	4.113	3.259	2.866	2.634	2.477	2.364	2.277	2.209	2.153
37	4.105	3.252	2.859	2.626	2.470	2.356	2.270	2.201	2.145
38	4.098	3.245	2.852	2.619	2.463	2.349	2.262	2.194	2.138
39	4.091	3.238	2.845	2.612	2.456	2.342	2.255	2.187	2.131
40	4.085	3.232	2.839	2.606	2.449	2.336	2.249	2.180	2.124
41	4.079	3.226	2.833	2.600	2.443	2.330	2.243	2.174	2.118
42	4.073	3.220	2.827	2.594	2.438	2.324	2.237	2.168	2.112
43	4.067	3.214	2.822	2.589	2.432	2.318	2.232	2.163	2.106
44	4.062	3.209	2.816	2.584	2.427	2.313	2.226	2.157	2.101
45	4.057	3.204	2.812	2.579	2.422	2.308	2.221	2.152	2.096
46	4.052	3.200	2.807	2.574	2.417	2.304	2.216	2.147	2.091
47	4.047	3.195	2.802	2.570	2.413	2.299	2.212	2.143	2.086
48	4.043	3.191	2.798	2.565	2.409	2.295	2.207	2.138	2.082
49	4.038	3.187	2.794	2.561	2.404	2.290	2.203	2.134	2.077
50	4.034	3.183	2.790	2.557	2.400	2.286	2.199	2.130	2.073

source : Magic 2000 Solver telp (0274) 523858

X1 Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 20 - 30 th	25	52.1	52.1	52.1
	2 31 - 40 th	20	41.7	41.7	93.8
	3 41 - 50 th	2	4.2	4.2	97.9
	4 >50 th	1	2.1	2.1	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

X2 Lama Bekerja di BMT

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 <3 th	15	31.3	31.3	31.3
	2 3 - 5 th	15	31.3	31.3	62.5
	3 5 - 7 th	10	20.8	20.8	83.3
	4 > 7 th	8	16.7	16.7	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

X3 Latar Belakang Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 SMA	9	18.8	18.8	18.8
	2 D3	8	16.7	16.7	35.4
	3 S 1	30	62.5	62.5	97.9
	4 S 2	1	2.1	2.1	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 1 - 3	21	43.8	43.8	43.8
	2 4 - 6	16	33.3	33.3	77.1
	3 7 - 9	5	10.4	10.4	87.5
	4 > 9	6	12.5	12.5	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

K_Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 Sedang	2	4.2	4.2	4.2
	3 Tinggi	46	95.8	95.8	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X1 Usia * K_Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59	48	100.0%	0	.0%	48	100.0%

X1 Usia * K_Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59 Crosstabulation

			K_Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59		
			2 Sedang	3 Tinggi	Total
X1 Usia	1 20 - 30 th	Count	2	23	25
		Expected Count	1.0	24.0	25.0
	2 31 - 40 th	Count	0	20	20
		Expected Count	.8	19.2	20.0
	3 41 - 50 th	Count	0	2	2
		Expected Count	.1	1.9	2.0
	4 >50 th	Count	0	1	1
		Expected Count	.0	1.0	1.0
Total	Count	2	46	48	
	Expected Count	2.0	46.0	48.0	

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.200	.589
	Cramer's V	.200	.589
	Contingency Coefficient	.196	.589
N of Valid Cases		48	

- Not assuming the null hypothesis.
- Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X2 Lama Bekerja di BMT * K_Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59	48	100.0%	0	.0%	48	100.0%

X2 Lama Bekerja di BMT * K_Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59 Crosstabulation

		K_Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59		
		2 Sedang	3 Tinggi	Total
X2 Lama Bekerja di BMT	1 <3 th	Count	2	13
		Expected Count	.6	14.4
	2 3 - 5 th	Count	0	15
		Expected Count	.6	14.4
	3 5 - 7 th	Count	0	10
		Expected Count	.4	9.6
	4 > 7 th	Count	0	8
		Expected Count	.3	7.7
Total		Count	2	46
		Expected Count	2.0	46.0

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.309	.204
	Cramer's V	.309	.204
	Contingency Coefficient	.295	.204
N of Valid Cases		48	

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X3 Latar Belakang Pendidikan * K_Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59	48	100.0%	0	.0%	48	100.0%

X3 Latar Belakang Pendidikan * K_Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59 Crosstabulation

			K_Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59		
			2 Sedang	3 Tinggi	Total
X3 Latar Belakang Pendidikan	1 SMA	Count	2	7	9
		Expected Count	.4	8.6	9.0
	2 D3	Count	0	8	8
		Expected Count	.3	7.7	8.0
	3 S 1	Count	0	30	30
		Expected Count	1.3	28.8	30.0
	4 S 2	Count	0	1	1
		Expected Count	.0	1.0	1.0
Total	Count	2	46	48	
	Expected Count	2.0	46.0	48.0	

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.434	.029
	Cramer's V	.434	.029
	Contingency Coefficient	.398	.029
N of Valid Cases		48	

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan * K_Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59	48	100.0%	0	.0%	48	100.0%

X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan * K_Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59 Crosstabulation

			K_Y Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59		
			2 Sedang	3 Tinggi	Total
X4 Frekuensi Mengikuti Pelatihan	1 1 - 3	Count	2	19	21
		Expected Count	.9	20.1	21.0
	2 4 - 6	Count	0	16	16
		Expected Count	.7	15.3	16.0
	3 7 - 9	Count	0	5	5
		Expected Count	.2	4.8	5.0
	4 > 9	Count	0	6	6
		Expected Count	.3	5.8	6.0
Total	Count	2	46	48	
	Expected Count	2.0	46.0	48.0	

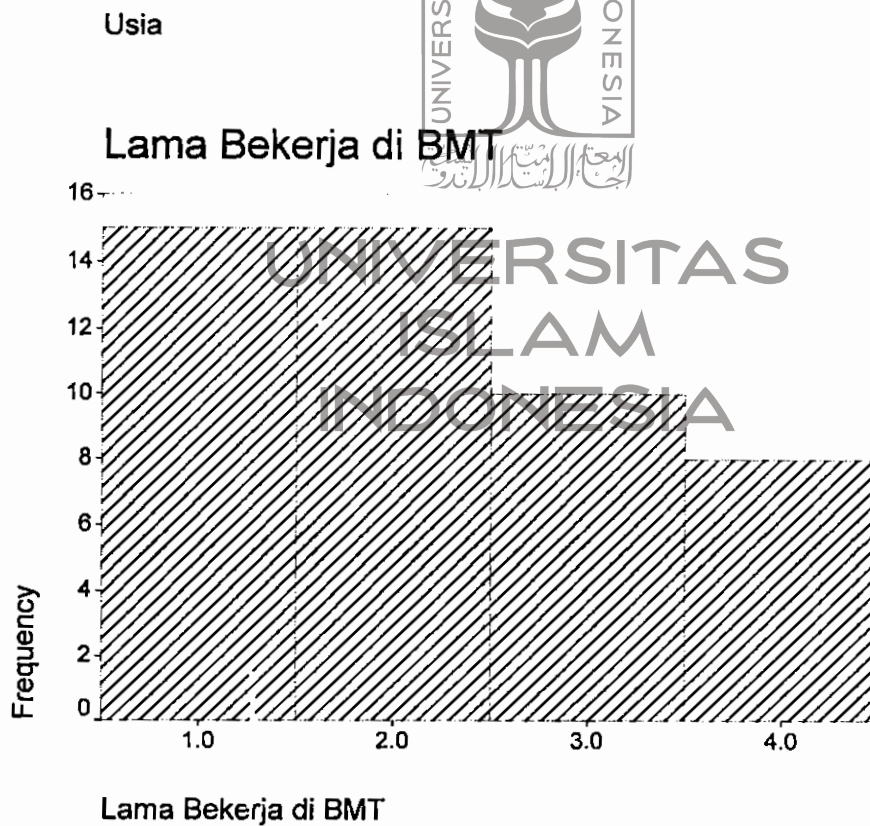
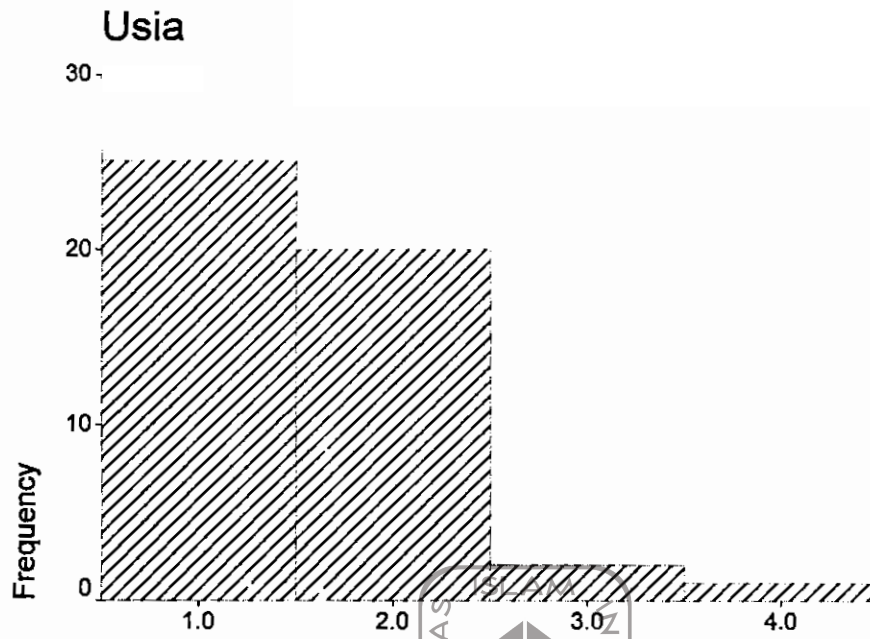
Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.236	.443
	Cramer's V	.236	.443
	Contingency Coefficient	.230	.443
N of Valid Cases		48	

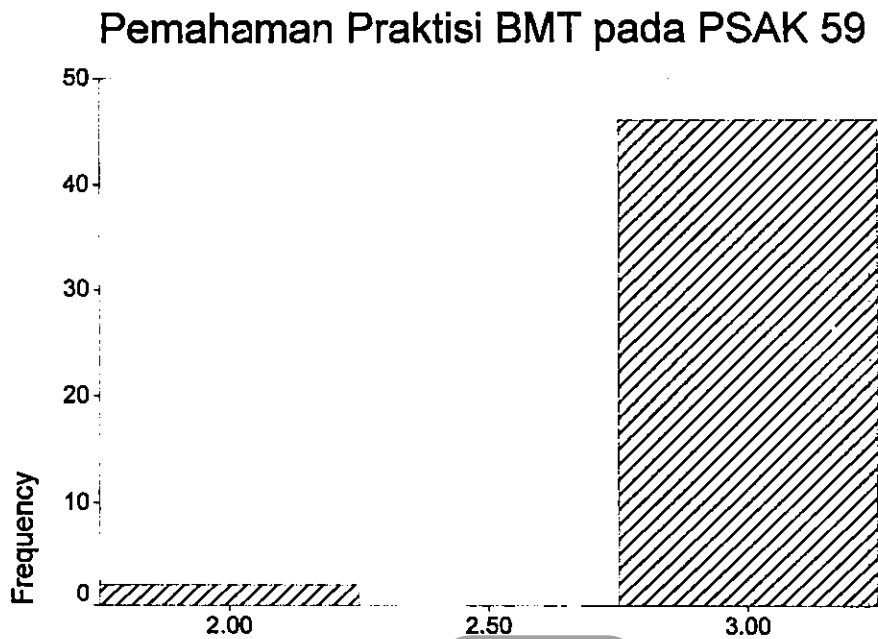
a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Histogram







Pemahaman Praktisi BMT pada PSAK 59



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
YOGYAKARTA

Jl. Demangan Baru No. 24 Lt. II, Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0271) 523637; Website: www.msi-iii.net; E-mail: info@msi-iii.net.

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri. Praktisi BMT

Di _
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang dalam proses menyelesaikan tugas akhir (tesis) pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan konsentrasi Ekonomi Islam. Oleh karenanya, ditengah kesibukan bapak/ibu praktisi BMT, perkenankanlah kami memohon bantuannya/kesediaannya untuk mengisi angket/kuesioner ini.

Angket ini merupakan instrumen penelitian dengan judul **"Pemahaman Praktisi BMT Di Yogyakarta Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Akuntansi Perbankan Syari'ah Produk *Funding*"**. Karenanya bapak/ibu dimohon memilih jawaban yang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang bapak/ibu miliki.

Demikian, atas bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Agustus 2006.

Peneliti,

Enny Iroh Hayati
NIM. 04913009

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET/KUESIONER

1. ***“Bismillaahirrohmaanirrohiim”***
2. Angket ini terbagi atas tiga bagian, yaitu:
 - a. Bagian **pertama**, mengenai identitas responden,
 - b. Bagian **kedua**, mengenai angket untuk pengukuran tingkat pemahaman,
 - c. Bagian **ketiga**, mengenai pertanyaan-pertanyaan pendukung penelitian.
3. Mohon **seluruh pertanyaan dijawab** menurut pengetahuan dan pemahaman yang bapak/ibu miliki.
4. Terima kasih atas kesediaannya mengisi angket ini.
5. ***“Alhamdulillahirabbil’alamiin”***.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**BAGIAN I
IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama responden : (Boleh Samaran)
2. Jabatan di BMT :
3. No. Telpon :

Berilah tanda silang (X) atau lingkari pada jawaban yang anda pilih !!!

4. Umur responden : (pilih salah satu)
- a. 20 s/d 30 tahun
 - b. 31 s/d 40 tahun
 - c. 41 sd/ 50 tahun
 - d. Diatas 50 tahun
5. Lama Bekerja di BMT : (pilih salah satu)
- a. Kurang dari 3 tahun
 - b. Lebih dari 3 tahun dan kurang dari 5 tahun
 - c. Lebih dari 5 tahun dan kurang dari 7 tahun
 - d. Lebih dari 7 tahun.



6. Latar Belakang Pendidikan :

- a. SMA/SMK/MAN/ (sebutkan)
- b. D3 Jurusan (sebutkan)
- c. S1 Jurusan (sebutkan)
- d. S2 (sebutkan)

7. Pelatihan/Seminar/Workshop atau Kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional BMT yang pernah diikuti:

- a. 1 s/d 3 kali
- b. 4 s/d 6 kali
- c. 7 s/d 9 kali
- d. Lebih dari 9 kali

Sebutkan Pelatihan/Seminar/Workshop atau Kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional BMT yang pernah diikuti tersebut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- dst.....

BAGIAN II
ANGKET/KUESIONER UNTUK SKALA PEMAHAMAN

Berilah tanda silang (X) atau lingkari pada jawaban yang anda pilih !!!

1. Dalam akuntansi, tujuan pencatatan adalah:
 - a. Pertanggungjawaban, penentuan pendapatan, dan juga sebagai informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
 - b. Menghindari kesalahpahaman
 - c. Untuk mengetahui arus kas keluar dan masuk.
2. Tujuan penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah adalah ?
 - a. Untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah
 - b. Untuk mengatur prosedur pencatatan.
 - c. Untuk menghindari kecurangan.
3. Sampai saat ini konsep akuntansi BMT secara formal belum ada, menurut anda standar akuntansi mana yang sementara ini sesuai untuk BMT?
 - a. PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah
 - b. PSAK 27 Akuntansi Koperasi
 - c. Lain-lain (sebutkan).....
4. Yang dimaksud dengan wadi'ah adalah:
 - a. Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki dan bank/BMT bertanggungjawab atas pengembalian titipan.
 - b. Sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa.
 - c. Akad kerja sama diantara pemilik modal untuk mencari keuntungan.
5. Titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan, merupakan akad wadi'ah yang berjenis:
 - a. Wadi'ah yad-dhamanah
 - b. Wadi'ah yad-amanah
 - c. Wadi'ah muqayyadah
6. Apabila penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip, adalah prinsip dari:
 - a. Wadi'ah yad-amanah
 - b. Wadi'ah yad-dhamanah
 - c. Wadi'ah muqayyadah

7. Mengapa produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah?
- Karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat.
 - Karena barang yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh pengelola dana.
 - Karena barang dititipkan tersebut dapat menghasilkan manfaat.
8. Perbedaan antara tabungan dengan giro adalah
- Tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.
 - Giro tidak dapat diambil setiap saat
 - Tabungan dapat ditarik dengan cek
9. Dalam transaksi wadi'ah, penerima titipan (BMT) dapat:
- Meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut; dan memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.
 - Memberikan bonus sesuai kesepakatan.
 - Memanfaatkan semua jenis titipan dan memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan.
10. Yang membedakan bonus dalam transaksi wadi'ah dengan jasa lainnya adalah
- Bonus tidak diperjanjikan dan ditentukan besarnya sesuai dengan keuntungan riil yang diterima.
 - Bonus diperjanjikan dan disebutkan dalam akad.
 - Bonus ditentukan dalam persentase yang tetap.
11. Dana wadi'ah diakui sebesar nilai nominal penyeteroran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening.
Misalkan tgl 1 Juli 2006 Pak Ali membuka tabungan wadi'ah ke BMT "Harapan" dan menyeter dananya sebesar Rp 5.000.000,-
Tgl 15 Juli 2006 Pak Ali menarik dananya sebesar Rp 1.000.000,-
Maka atas transaksi tersebut, maka pencatatan yang dilakukan BMT Harapan adalah:

a.

1/7/2006	Kas Tabungan Wadi'ah	5.000.000	5.000.000
15/7/2006	Tabungan Wadi'ah Kas	1.000.000	1.000.000

b.

1/7/2006	Tabungan Wadi'ah Kas	5.000.000	5.000.000
15/7/2006	Kas Tabungan Wadi'ah	1.000.000	1.000.000

c.

1/7/2006	Kas Pembiayaan Wadi'ah	5.000.000	5.000.000
15/7/2006	Pembiayaan Wadi'ah Kas	1.000.000	1.000.000

12. Apabila BMT Harapan mempunyai inisiatif untuk memberikan bonus kepada nasabah dalam transaksi wadi'ah, maka bagaimana pengakuan pemberian bonus kepada nasabah tersebut?
- Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
 - Bonus diakui sebagai pendapatan BMT.
 - Tidak ada pengakuan.

13. Misalkan BMT Harapan pada tanggal 31 Oktober 2006 memberikan/membayarkan bonus kepada nasabah atas nama Pak Ali sebesar Rp 40.000,-. Atas transaksi ini maka pencatatan yang dilakukan BMT adalah:

a.

31/10/2006	Beban bonus tabungan Wadi'ah Tabungan Wadi'ah an. Pak Ali Kewajiban Pajak Penghasilan	40.000	34.000 6.000
------------	---	--------	-----------------

b.

31/10/2006	Biaya/beban bonus Tabungan Wadi'ah an. Pak Ali	40.000	40.000
------------	---	--------	--------

c.

31/10/2006	Beban bonus tabungan Wadi'ah Tabungan Wadi'ah an. Pak Ali Kewajiban Pajak Penghasilan	4.000.000	4.000.000 40.000
------------	---	-----------	---------------------

14. Apabila dana wadi'ah dari nasabah BMT Harapan tersebut dikelola oleh BMT, misalkan disimpan di Bank Syari'ah atau disalurkan dalam pembiayaan, maka pengakuan atas pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan dana tabungan wadi'ah tersebut adalah
- Diakui sebagai pendapatan BMT dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.
 - Diakui sebagai beban
 - Tidak diakui

Bila anda lelah, silahkan istirahat sejenak sebelum melanjutkan pengisian angket. Tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan nafas secara perlahan. Silahkan anda mulai mengisi angket berikutnya.

15. Manakah yang merupakan definisi dari Mudharabah?
- Akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka.
 - Akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.
 - Akad jual beli barang.
16. Dalam akad mudharabah, jika usaha terjadi kerugian maka.....
- Seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan atau penyalahgunaan dana.
 - Seluruh kerugian ditanggung oleh pengelola dana.
 - Kerugian ditanggung bersama-sama antara pemilik dana dan
17. Mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Yang dimaksud dengan Mudharabah Mutlaqah adalah
- Mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dalam pengelolaan investasinya.
 - Mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.
 - Mudharabah dimana seluruh kerugian ditanggung oleh pengelola dana.
18. Yang dimaksud dengan Mudharabah Muqayyadah adalah.....
- Mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.
 - Mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.
 - Mudharabah dimana seluruh kerugian ditanggung oleh pengelola dana.
19. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau dengan bagi pendapatan (*revenue sharing*), apa yang dimaksud bagi laba?
- Bagi laba yaitu cara membagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.
 - Bagi laba yaitu cara membagi hasil yang dihitung dari total pendapatan.
 - Bagi laba yaitu cara membagi hasil yang dihitung dari biaya-biaya yang terjadi.
20. Apa yang dimaksud dengan bagi pendapatan (*revenue sharing*)?
- Cara membagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.
 - Cara membagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.
 - Cara membagi hasil yang dihitung dari biaya-biaya yang terjadi.

21. Dalam akad mudharabah, BMT memiliki dua fungsi, yaitu
- Kepada penabung ia berfungsi sebagai pengelola (mudharib), dan kepada dunia usaha ia berfungsi sebagai pemilik dana (shahibul maal).
 - Fungsi sosial dan fungsi profit
 - Fungsi individu dan fungsi masyarakat.

22. Dana dari tabungan mudarabah diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Misalnya, BMT Harapan menerima dana mudarabah sebagai berikut:

Tgl 10 Juli 2006, nasabah Pak Ali membuka rekening dengan menyetor dana investasi tidak terikat sebesar Rp. 1.000.000,-

Tgl 31 Juli 2006, nasabah Pak Ali mengambil Rp 200.000,- atas dana yang disimpan di BMT Harapan.

Atas transaksi tersebut, maka pencatatan yang dilakukan BMT Harapan adalah:

a.

10 Juli 2006	Kas Investasi tidak terikat	1.000.000	1.000.000
31 Juli 2006	Investasi tidak terikat Kas	200.000	200.000

b.

10 Juli 2006	Kas Tabungan	1.000.000	1.000.000
31 Juli 2006	Tabungan Kas	200.000	200.000

c.

10 Juli 2006	Kas Pendapatan	1.000.000	1.000.000
31 Juli 2006	Pendapatan Kas	200.000	200.000

23. Dari pertanyaan No. 22 diatas, apabila sampai dengan 31 Desember 2006 tidak ada penambahan atau pengurangan saldo maka di neraca investasi tidak terikat akan dicatat sebesar nilai tercatat, yaitu :

- Rp. 800.000,-
- Rp. 1.200.000,-
- Rp. 1.000.000,-

24. Misalkan, BMT Harapan memperoleh pendapatan opsional tahun 2006 sebesar Rp 20.000.000,-
 Total seluruh dana yang dihimpun Rp 100.000.000,-
 Investasi tidak terikat milik Tuan Ali Rp 800.000,-
 Nisbah bagi hasil = 60:40 (nasabah:BMT)
 Maka besarnya bagi hasil untuk Tuan Ali adalah:
- Rp. 96.000,-
 - Rp. 120.000,-
 - Rp. 75.000,-

25. Atas bagi hasil tersebut BMT Harapan akan mencatat bagi hasil yang akan dibagikan sebagai berikut:

a.

31/12/2006	Beban bagi hasil mudarabah	96.000	
	Kewajiban bagi hasil mudarabah		96.000

b.

31/12/2006	Kewajiban bagi hasil mudarabah	96.000	
	Kas		96.000

c.

31/12/2006	Utang bagi hasil mudarabah	75.000	
	Kewajiban bagi hasil mudarabah		75.000

26. Pada saat membayar bagi hasil tersebut, BMT Harapan akan mencatat:

a.

Tgl	Kewajiban bagi hasil mudarabah	96.000	
	Kas		96.000

b.

Tgl	Beban bagi hasil mudarabah	66.000	
	Kewajiban bagi hasil mudarabah		66.000

c.

Tgl	Kas	196.000	
	Bagi hasil		196.000

Sebelum melanjutkan ke Bagian III, mohon dipastikan semua pertanyaan diatas sudah dijawab!!!

BAGIAN III

PERTANYAAN PENDUKUNG

Bapak/ibu yang kami hormati, mohon pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dijawab dengan singkat dan jelas!!!

1. a. Menurut pendapat anda apakah BMT memerlukan suatu standar akuntansi?
Jelaskan pendapat anda!
- b. Menurut anda, apakah produk BMT serupa dengan produk bank syari'ah?

Jawab:

a.....

.....

b.....

.....

2. a. Darimana anda tahu tentang PSAK No. 59?
- b. Bagaimana pendapat anda setelah tahu tentang PSAK No. 59

Jawab:

a.....

b.....

3. a. Apakah BMT anda sudah mempraktekkan PSAK No. 59 ?
- b. Jika sudah mempraktekkan PSAK 59, apakah anda merasa kesulitan?
Jelaskan kesulitan anda!
- c. Hal-hal apa saja yang mendorong BMT anda menerapkan PSAK 59?

Jawab:

a.....

.....

b.....

.....

.....

.....

c.....

.....

4. a. Jika BMT anda belum mempraktekkan PSAK 59, apakah anda merasa perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi pada BMT anda selama ini sudah sesuai dengan syari'ah Islam? Jelaskan alasan anda!

b. Kenapa BMT anda belum mempraktekkan PSAK No. 59 ?

Jawab:

a.....

.....

b.....

.....

5. a. Standar akuntansi apa yang dipakai pada BMT anda saat ini?

b. Jika BMT dianjurkan untuk menggunakan PSAK 59, bagaimana reaksi anda?
Jelaskan alasan anda!

Jawab:

a.....

.....

b.....

.....

6. Menurut anda, apakah seminar, pelatihan, dan semacamnya memberi pengaruh terhadap kemungkinan penerapan PSAK 59 pada BMT? Jelaskan!

Jawab:

.....

.....

.....

7. Bagaimanakah cara BMT anda memberikan bonus kepada nasabah yang menyimpan dananya di tabungan wadiah?

Jawab:

.....

.....

.....

8. Dalam menentukan bagi hasil tabungan mudarabah, metode apa yang BMT anda gunakan? *Profit sharing* (bagi keuntungan) atau *revenue sharing* (bagi pendapatan)? Jelaskan alasan anda!

Jawab:

.....

.....

BIOGRAFI



Enny Iroh Hayati lahir di Magelang pada 21 September 1975 dari pasangan H. Tatag (alm.) dengan Hj. Siti Zani'ah. Meski terlahir sebagai anak tunggal, namun didikan orang tuanya membuatnya menjadi anak yang mandiri.

Pendidikan formalnya diawali dari MI Muhammadiyah Sucen yang lulus tahun 1988, kemudian tahun 1991 lulus dari SMPN 1 Muntilan, dan tahun 1994 lulus dari SMAN 1 Sleman. Gelar kesarjanaannya diperoleh di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1999 dengan predikat *cumlaude*. Kemudian, sejak tahun 2000 hingga sekarang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada 14 Januari 2001 menikah dengan Ujang Sihabudin, MSI. kelahiran Sukabumi 13 Maret 1973 dan hingga saat ini sudah dikaruniai dua orang putera, yaitu M. Faqih Haikal Mufti yang lahir pada tanggal 10 Desember 2001, dan M. Ghiyatsulmaula Alfurqoni yang lahir pada tanggal 4 April 2003. Sekarang ini peneliti bersama keluarga tinggal di Dsn. Ngaglik, Sucen, Salam, Magelang, Jawa Tengah 56484. Tlp. 081328393124.